



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TA. 2023

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	11
d. Jumlah Kecamatan dan Nagari	13
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah ...	15
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	22
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	22
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah	23
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan	
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	35
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen	
Perencanaan Tahunan	41
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	79
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..	138
2.1 Capaian Kinerja Makro	138
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	138
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	138
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	148
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan	
Pemerintahan	195
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	198
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	429
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	429

2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	429
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	431
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan	431
3.1.1	Target Kinerja	431
3.1.2	Realisasi	432
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan	434
3.2.1	Target Kinerja	434
3.2.2	Realisasi	435
3.3	Permasalahan dan Kendala	437
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	437
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	438
4.1	Urusan Pendidikan	438
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	438
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	438
4.1.3	Realisasi	439
4.1.4	Alokasi Anggaran	442
4.1.5	Dukungan Personil	442
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	443
4.2	Urusan Kesehatan	444
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	444
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	445
4.2.3	Realisasi	447
4.2.4	Alokasi Anggaran	456
4.2.5	Dukungan Personil	456
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	456
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	458
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	458
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	460
4.3.3	Realisasi	460
4.3.4	Alokasi Anggaran	462
4.3.5	Dukungan Personil	463
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	463
4.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	464
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	464
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	464

4.4.3	Realisasi	465
4.4.4	Alokasi Anggaran	467
4.4.5	Dukungan Personil	467
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	467
4.5	Urusan Keamanan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	468
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	468
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	469
4.5.3	Realisasi	469
4.5.4	Alokasi Anggaran	476
4.5.5	Dukungan Personil	476
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	477
4.6	Urusan Sosial	478
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	478
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	478
4.6.3	Realisasi	479
4.6.4	Alokasi Anggaran	482
4.6.5	Dukungan Personil	482
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	483
4.7	Program dan Kegiatan	489
BAB V	PENUTUP	501
LAMPIRAN	502

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah, karena atas limpahan Rahmat, Karunia serta Perkenaan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyampaian LPPD Kabupaten Solok pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun 2023. Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sudah pasti dengan segala keterbatasan menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan bobot pelaksanaan tugas kami kedepan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga senantiasa memperoleh petunjuk serta dari Ridha Allah SWT.

Arosuka, Maret 2024
BUPATI SOLOK

H. EPYARDI ASDA, M. Mar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28); dan
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok 2021-2026.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi 00 32' 14" dan 01 46' 45" Lintang Selatan, serta 100 25' 00" dan 101 41' 41" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738 Km²). Secara umum daerah Kabupaten Solok beriklim tropis dengan tinggi wilayah di atas permukaan laut berkisar antara 284 sampai 1.458 meter (Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2023).

Daerah bagian Utara mempunyai curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan bagian Selatan. Berdasarkan Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2023 rata-rata curah hujan di Kabupaten Solok berada pada kisaran 1.951,9 mm/tahun, dengan distribusi yang berbeda-beda pada setiap wilayah di Kabupaten Solok, hal ini mengakibatkan kebutuhan air untuk sektor pertanian pada bulan-bulan kering harus diupayakan oleh para petani. Topografi wilayah Kabupaten Solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit mulai dari dataran tinggi di bagian selatan hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara .329 m hingga 1.458 m di atas permukaan laut.

Selanjutnya berdasarkan kemiringan lereng dan luasnya yang bersumber dari data Status Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, wilayah Kabupaten Solok dapat dibagi atas beberapa klasifikasi sebagaimana terlihat di bawah ini:

Tabel 1.1
Klasifikasi Lereng di Kabupaten Solok

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar, Agak Landai	0 – 8	84.642,97	22,64
2.	Landai	8 – 15	90.005,35	24,08
3.	Agak Curam	15 – 25	118.176,04	31,61
4.	Curam	25 – 40	70.286,53	18,80
5.	Sangat Curam	> 40	10.689,11	2,86

Sumber: Hasil Analisis Peta, 2011

Berdasarkan kondisi kemiringan lereng pada Tabel 1.1, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0-8% (datar), terkonsentrasi di beberapa tempat yang mencakup sebagian Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Kubung, Bukit Sundi, Gunung Talang, Payung Sekaki, Danau Kembar, dan Lembah Gumanti;
2. Kondisi kemiringan 8-15% (datar s/d landai), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok;
3. Kondisi kemiringan 15-25% (agak curam), yang menyebar secara merata di semua kecamatan;
4. Kondisi kemiringan 25-40% (curam), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok khususnya pada daerah barat dan selatan;

5. Lahan dengan kemiringan >40% (sangat curam), tersebar secara merata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dan lebih terkonsentrasi pada daerah bagian barat dan selatan.

Sedangkan Peta Geologi skala 1:250.000 Lembar Solok (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1995) Strata Batuan Penyusun Kabupaten Solok adalah:

1. Endapan Permukaan (Qal dan Qf)
2. Endapan Gunung Api Muda (Qyu, Qatg)
3. Endapan Gunung Api Tua (Qtau, Qou, Qol)
4. Endapan Sedimen (Tmo, Pbl)
5. Batuan Metamorfosis (Pb, PCkq, PCks, Rts)
6. Batuan Terobosan (Kgr, gd, g)

Struktur geologi yang berkembang adalah:

1. Struktur patahan aktif adalah struktur yang paling dominan dengan arah jalur struktur patahan ini berarah barat laut – tenggara. Mulai dari Danau Atas, Danau Bawah menerus ke arah barat laut ke Danau Singkarak. Struktur ini termasuk dalam jalur Patahan Besar Sumatera yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi konvergen antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Benua Asia. Pergerakan struktur patahan aktif menghasilkan juga dataran antar perbukitan (graben) di sekitar Solok.
2. Patahan-patahan yang terbentuk sebagai akibat pergerakan patahan utama Sumatera, dengan sebaran hampir merata khususnya di wilayah bagian selatan mulai dari Danau Dibawah ke arah selatan meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Tigo Lurah. Sedangkan wilayah dengan sebaran patahan kecil meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kubung, X Koto Singkarak, IX Koto Sungai Lasi dan Payung Sekaki.
3. Kekar/rekahan berkembang pada batuan dan untuk batuan malihan dan terobosan berkembang struktur kekar/rekahan berkembang di Kecamatan Tigo Lurah dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Solok terdiri atas:

1. Kawasan Lindung

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi:

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung dengan luas seluruhnya lebih kurang 118.141 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Solok kecuali kecamatan Bukit Sundi. Luas kawasan hutan lindung ini 31.60 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang meliputi wilayah kecamatan Gunung Talang, Lembang Jaya, Payung Sekaki, Bukit Sundi, Hiliran Gumanti dan Tigo Lurah.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan setempat dan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.

d. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Kawasan suaka alam dengan luas lebih kurang 47.279 Ha meliputi Kawasan Suaka Alam Barisan I, Kawasan Suaka Alam Air Tarusan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam ini 12,65% dari luas wilayah Kabupaten Solok.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan kawasan rawan bencana gempa bumi/ gerakan tanah.

f. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan letusan Gunung Berapi Gunung Talang dan rawan bencana akibat pergeseran patahan Sumatera (Sesar Semangko).

2. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Solok terdiri atas:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas (dengan luas lebih kurang 12.793 Ha), kawasan hutan produksi tetap (dengan luas lebih kurang 5.685 Ha), kawasan

hutan produksi yang dapat dikonversi (dengan luas lebih kurang 9.810 Ha). Luas kawasan hutan produksi ini adalah 7,57% dari luas wilayah Kabupaten Solok.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan (dengan luas lebih kurang 33.974 Ha), kawasan tanaman hortikultura (dengan luas lebih kurang 72.475 Ha), kawasan perkebunan (dengan luas lebih kurang 42.778 Ha) dan kawasan peternakan diarahkan di seluruh kecamatan. Luas kawasan untuk pertanian ini adalah 39,92% dari luas wilayah Kabupaten Solok.

c. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar (dengan luas lebih kurang 10.182,5 Ha), kawasan peruntukan perikanan tangkap perairan danau (dengan Luas 168,95 Ha). Luas kawasan perikanan ini adalah 10.351,45 Ha atau 2,77% dari luas wilayah Kabupaten Solok.

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan pertambangan mineral dan batu bara serta energi.

e. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan (dengan luas lebih kurang 1.348 Ha) dan kawasan permukiman pedesaan (luas lebih kurang 5.690 Ha).

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya.

g. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil.

h. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan kawasan keamanan.

Wilayah Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Salah satu

penyebabnya adalah karena kedudukan Kabupaten Solok secara tektonik yang termasuk dalam lempeng Benua Asia yang ditunjang lempeng Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera. Penunjangan kedua lempeng tersebut menghasilkan beberapa patahan aktif di daratan Sumatera berupa Patahan Besar Sumatera (Patahan Semangko).

Gambar 1.1
Peta Rawan Bencana Kabupaten Solok



Sumber: RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Patahan aktif Semangko tersebut memanjang pada ruas Kecamatan Pantai Cermin, Danau Diatas, Danau Dibawah ke utara sampai Danau Singkarak dan membentuk graben Kota Solok yang merupakan bagian dari patahan aktif sepanjang Sumatera. Jalur patahan-patahan aktif di Kabupaten Solok melintas mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah, Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak.

Akibat pergerakan patahan aktif utama timbul patahan aktif ikutan lain yang berdimensi lebih kecil sejajar dengan jalur patahan utama (Sumatera) yang tersebar di Kecamatan Gunung Talang dan Kubung. Patahan ini juga menyebar sedikit sampai ke Kecamatan Hiliran Gumanti, Tigo Lurah, Payung Sekaki terus ke utara.

Jalur gempa utama di Kabupaten Solok berada pada sepanjang jalur patahan Sumatera yang melintasi Kabupaten Solok. Bila terjadi pelepasan energi di Samudera Hindia dengan kekuatan > 7 SR, maka akan sangat berpotensi menghasilkan gempa sepanjang patahan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian serta observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kabupaten Solok terdiri dari:

1. Bencana Alam Gempa Bumi Patahan Aktif

Kabupaten Solok didominasi oleh perbukitan dan pegunungan serta dijumpai Gunung Api Talang yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Potensi bahaya gempa di bagian tengah Kabupaten Solok sangat besar, hal ini mengingat daerah bagian tengah khususnya jalur patahan aktif di Kabupaten Solok yang melintasi mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan

Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah Kecamatan Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak sangat rentan terjadinya pergerakan.

Gempa Bumi yang besar terjadi pada tahun 2007 yang berpusat di Singkarak dengan kekuatan 5,8 Skala Richter dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang cukup banyak.

2. Bencana Alam Gunung Api Talang

Kabupaten Solok mempunyai satu gunung api yaitu Gunung Talang, yang sampai sekarang masih aktif. Potensi yang paling besar terhadap bencana letusan Gunung Api Talang terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Talang, Bukit Sundi dan Lembang Jaya. Dimana keberadaan wilayah tersebut berada pada lereng utara Gunung Talang. Letusan yang terjadi sebelumnya, baik yang terjadi pada Pleistosen maupun Holosen telah mengeluarkan lahar dan material lainnya (Qyu, Qatg, Qou) yang cukup luas di Kecamatan Gunung Talang dan Lembang Jaya.

Gunung api Talang merupakan gunung api aktif bertipe strato atau berlapis, memiliki lapangan fumarola yaitu Solfatara Gabuo Gadang Bawah dan Gabuo Gadang Ateh. Gunung api ini kembar dengan pasar Arbaa yang telah padam. Di puncak tidak terdapat kawah. Tempat terjadinya letusan dan lapangan fumarola merupakan sebuah lembah sepanjang 300 m dengan lebar 30 sampai 90 meter. Terdapat dua buah danau yang mungkin dulunya kawah yaitu Danau Talang dan Danau Kecil. Mata air panas terdapat di kaki Gunung Talang, di antara Bukik Kili, Batu Bajanjang, Buah Batung dan Sapan.

Letusan Gunung Talang pada tahun 2005 mengakibatkan rekahan sepanjang 500 meter di selatan puncak Gunung Talang dan paling tidak ada tiga lobang letusan dalam segaris. Letusan pada

tahun itu dipicu oleh adanya peningkatan aktivitas tumbukan lempeng di Selatan Sumatera menyebabkan gempa tektonik (Mentawai) pada 10 April 2005, dengan magnitudo 6,8. Selanjutnya terjadi peningkatan gejala kegempaan di Gunung Talang berupa gempa tektonik lokal dan gempa vulkanik. Setelah tahun 2007, kegiatan Gunung Talang bersifat fluktuatif tetapi tidak ada status yang membahayakan masih dalam kategori siaga. Beberapa sejarah kegiatan Gunung Talang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Sejarah Kegiatan Gunung Talang di Kabupaten Solok

No	Tahun	Kegiatan
1	1833	Letusan dengan tiang asap tebal dan batu membara dari kawah parasit.
2	1843	Letusan serupa dengan letusan Tahun 1833.
3	1845	Letusan pada tiap asap raksasa berwarna hitam dari kawah parasit.
4	1883	Terbentuknya sistem rekahan NE – SW, rekahan di lereng Selatan sangat aktif.
5	1963	Peningkatan kegiatan.
6	1967	Peningkatan kegiatan tembusan fumarola pada satu retakan sepanjang 800 m, lebar 10 – 50 m, dengan 7 lubang utama tanpa letusan.
7	1980-1981	Peningkatan kegiatan, 65 kali gempa tektonik, 10 kali gempa vulkanik disertai suara gemuruh dan asap putih tebal dari kepundan Panjang.
8	2000	Peningkatan kegiatan.
9	2003	Peningkatan kegiatan diikuti dengan letusan preatik di Kawah Gabuo Ateh (Atas).
10	2005	Letusan abu.
11	2007	Letusan Central Vent Eruption dan Explosive Eruption

Sumber: Pengamatan Gunung Api Talang (PGA Talang)

3. Gerakan Tanah (Longsor)

Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan

tanah/longsoran yang terjadi di Kabupaten Solok umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geologi, morfologi, curah hujan, bahaya gunung api dan kegempaan. Hasil pengamatan di lapangan, daerah yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit dan serpih Formasi Tuhur (PCks) dan batuan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).

Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, berdimensi panjang antara 10 - 15 m, lebar antara 5 – 7 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40 – 50 persen. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu. Menurut informasi penduduk gerakan tanah berupa galodo pernah terjadi di desa Anau Kadok, Gunung Talang pada tahun 1926 dan tahun 1987, mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di daerah tersebut. Galodo termasuk salah satu tipe gerakan tanah yang dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di Kabupaten Solok dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan dan kegempaan.

4. Bencana Alam Erosi

Bencana alam erosi dikelompokkan menjadi (tiga) tingkatan erosi, yaitu:

- a. Tinggi; Erosi tertinggi terjadi di wilayah yang tersusun oleh batuan hasil letusan gunung api muda, berupa pasir – pasir krikilan seperti yang terdapat di sekitar wilayah Gunung Api Talang dan Aripan Paninjauan. Di daerah ini erosi pasir lepas sangat aktif bahkan pada waktu musim hujan material pasir dapat terbawa oleh air permukaan;

- b. Sedang; Erosi sedang umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan tufa dan breksi berupa lempung–lempung lanauan;
- c. Rendah; Erosi sedang umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan lava, breksi dan pada endapan aluvium serta kipas aluvium. Pada wilayah ini erosi jarang terjadi karena tingkat pelapukannya cukup rendah dengan vegetasi lebat.

5. Banjir

Daerah yang paling rawan terhadap banjir di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dimana hal ini dipicu karena luapan air dari Sungai Batang Lembang, dan Sungai Batang Sungai Lasi. Penyebab utama banjir di Kabupaten Solok disebabkan karena tingginya curah hujan dan terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan pada Tahun 2023

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
13.02.03	Pantai Cermin	11.871	11.921	23.792
13.02.04	Lembah Gumanti	33.116	32.744	65.860
13.02.05	Payung Sekaki	4.774	4.796	9.570
13.02.06	Lembang Jaya	15.874	15.531	31.405
13.02.07	Gunung Talang	27.950	28.034	55.984
13.02.08	Bukit Sundi	13.545	13.940	27.485
13.02.09	Ix Koto Sungai Lasi	5.504	5.392	10.896
13.02.10	Kubung	31.153	30.775	61.928
13.02.11	X Koto Singkarak	17.458	17.688	35.146
13.02.12	X Koto Diatas	9.632	9.818	19.450

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
13.02.13	Junjung Sirih	6.763	6.600	13.363
13.02.17	Hiliran Gumanti	9.649	9.503	19.152
13.02.18	Tigo Lurah	5.459	5.503	10.962
13.02.19	Danau Kembar	11.929	11.502	23.431
JUMLAH		204.677	203.747	408.424

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
	PRIA	WANITA	
00-04	14.792	13.794	28.586
05-09	19.236	18.008	37.244
10-14	20.064	18.764	38.828
15-19	16.178	16.478	32.656
20-24	19.553	18.702	38.255
25-29	16.822	15.094	31.916
30-34	13.953	13.122	27.075
35-39	14.973	14.424	29.397
40-44	15.039	14.475	29.514
45-49	12.802	12.704	25.506
50-54	10.660	10.912	21.572
55-59	8.673	9.957	18.630
60-64	7.813	9.017	16.830
65-69	6.553	7.993	14.546
70-74	4.111	4.631	8.742
>75	3.455	5.672	9.127
JUMLAH	204.677	203.747	408.424

Sumber: DKB Semester II Tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri

d. Jumlah Kecamatan dan Nagari

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong, dengan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Solok sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto.

Yang dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Batas-Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok

Kecamatan	Sebelah			
	Utara	Selatan	Timur	Barat
Pantai Cermin	Kec. L. Gumanti	Kab. Sol Sel	Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Pessel
Lembah Gumanti	Kec. Payung Sekaki	Kec. Pantai Cermin	Kec. Hiliran Gumanti & Kec. Tigo Lurah	Kec. Danau Kembar
Hiliran Gumanti	Kec. Tigo Lurah	Kec. Pantai Cermin	Kec. Tigo Lurah	Kec. Lembah Gumanti
Payung Sekaki	Kec. IX Koto Sungai Lasi	Kec. Lembah Gumanti	Kec. Tigo Lurah	Kec. Lembang Jaya & Kec. Bukik Sundi
Tigo Lurah	Kab. Sijunjung	Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Sijunjung	Kec. Lembah Gumanti
Lembang Jaya	Kec. Bukit Sundi	Kec. Danau Kembar	Kec. Payung Sekaki	Kec. Gunung Talang
Danau Kembar	Kec. Lembang Jaya	Kab. Pessel	Kec. Lembah Gumanti	Kec. Gunung Talang
Gunung Talang	Kec. Kubung	Kab. Pessel	Kec. Lembang Jaya	Kota Padang
Bukit Sundi	Kec. Sungai Lasi	Kec. Lembang Jaya	Kec. Payung Sekaki	Kec. Kubung
IX Koto Sungai Lasi	Kota Sawahlunto	Kec. Bukit Sundi	Kec. Tigo Lurah	Kota Solok
Kubung	Kota Solok	Kec. Gunung Talang	Kec. Bukit Sundi	Kota Padang
X Koto Diatas	Kab. Tanah Datar	Kec. X Koto Singkarak	Kota Sawahlunto	Kab. Tanah Datar
X Koto Singkarak	Kec. X Koto diatas	Kec. Kubung	Kec. X Koto Diatas	Kec. Junjung Sirih

Kecamatan	Sebelah			
	Utara	Selatan	Timur	Barat
Junjung Sirih	Kab. Tanah Datar	Kec. X Koto Singkarak	Kec. X Koto Diatas	Kab. Pdg Pariaman
Kabupaten Solok	Kab. Tanah Datar	Kab. Sol Sel	Kota Sawahlunto	Kota Padang & Kab. Pessel

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari.

Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dengan jumlah 52 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.6

Luas Daerah dan Persentase Terhadap Luas Kab. Solok Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Daerah (Km ²)
1.	Pantai Cermin	Surian	2	28	366
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	439
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	284
4.	Payung Sekaki	Sirukam	3	11	392
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	575
6.	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	94
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	76
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	385
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	109
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	171
11.	Kubung	Kotobaru	8	37	192

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Daerah (Km ²)
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	251
13.	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11	147
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	257
Total			74	414	3.738

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Dari tabel di atas kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha.

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Solok sebanyak 40 (empat puluh), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Sebaran jumlah perangkat daerah beserta jumlah pegawai di Kabupaten Solok dengan kondisi Bulan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7

Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	PPPK	Total
1	Sekretariat Daerah	83		83
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21		21
3	Inspektorat Daerah	35		35

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	PPPK	Total
4	Dinas Pendidikan	93		93
	* Guru SD dan SMP	2633	534	3167
5	Dinas Kesehatan	52		52
	RSUD	191		191
	*Puskesmas, Labkesda, IFK	580		580
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86		86
7	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	27		27
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	49		49
9	Dinas Sosial	22		22
10	Dinas Lingkungan Hidup	21		21
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25		25
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29		29
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27		27
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	34		34
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	33		33
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	24		24
17	Dinas Perhubungan	42		42
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	23		23
19	Dinas Perikanan dan Pangan	27		27
20	Dinas Pertanian	95	36	131
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27		27
22	Badan Keuangan Daerah	49		49
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	30		30

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	PPPK	Total
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27		27
25	Badan Kesbangpol	9		9
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16		16
27	Kecamatan Pantai Cermin	10		10
28	Kecamatan Lembah Gumanti	10		10
29	Kecamatan Payung Sekaki	12		12
30	Kecamatan Lembang Jaya	13		13
31	Kecamatan Gunung Talang	14		14
32	Kecamatan Bukit Sundi	13		13
33	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	12		12
34	Kecamatan Kubung	18		18
35	Kecamatan X Koto Singkarak	14		14
36	Kecamatan X Koto Diatas	12		12
37	Kecamatan Junjung Sirih	11		11
38	Kecamatan Hiliran Gumanti	11		11
39	Kecamatan Danau Kembar	9		9
40	Kecamatan Tigo Lurah	15		15
Jumlah		4.584	570	5.154

Sumber: BKPSDM Kab. Solok Tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.275.690.510.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.231.534.247.460,54 atau 96,54%, penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp92.869.080.640,54 dan penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.137.481.166.820,00. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp101.576.847.916,00 dapat direalisasikan sebesar Rp92.869.080.640,54 atau 91,43%, penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Hasil Pajak Daerah sebesar Rp24.446.039.170,27, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp3.316.110.261,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar Rp8.389.815.737,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp56.717.115.472,27. Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.169.485.662.784,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.137.481.166.820,00 atau sebesar 97,26%, yang dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
PENDAPATAN DAERAH	1.275.690.510.700,00	1.231.534.247.460,54	96,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.576.847.916,00	92.869.080.640,54	
Hasil Pajak Daerah	25.098.900.089,00	24.446.039.170,27	97,40
Hasil Retribusi Daerah	6.298.984.035,00	3.316.110.261,00	52,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00	8.389.815.737,00	99,76
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	61.769.148.055,00	56.717.115.472,27	91,82
PENDAPATAN TRANSFER	1.169.485.662.784,00	1.137.481.166.820,00	97,26
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.091.004.032.290,00	1.077.978.355.469,00	98,81
Dana Bagi Hasil	21.864.715.290,00	22.914.956.095,00	104,80
Dana Alokasi Umum	681.191.523.000,00	681.158.599.384,00	100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	87.282.593.000,00	79.481.643.058,00	91,06
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	220.354.011.000,00	214.398.963.332,00	97,30
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA INSENTIF DAERAH			
Dana Insentif Daerah			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA DESA	80.311.190.000,00	80.024.193.600,00	99,64
Dana Desa	80.311.190.000,00	80.024.193.600,00	99,64
TRANSFER ANTAR DAERAH	78.481.630.494,00	59.502.811.351,00	75,82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	73.831.630.494,00	54.852.811.351,00	74,29
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	100,00

Sumber: BKD Kab. Solok (Laporan Keuangan TA. 2023)

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kab. Solok TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
BELANJA DAERAH	1.337.775.104.063,00	1.238.773.497.841,48	92,60
Belanja Operasi	985.771.459.439,00	902.919.516.447,48	91,60
Belanja Modal	191.387.781.541,00	178.969.196.899,00	93,51
Belanja Tak Terduga	2.508.140.000,00	1.242.050.000,00	49,52
Belanja Transfer	158.107.723.083,00	155.642.734.495,00	98,44

Sumber : BKD Kab. Solok (Laporan Keuangan TA. 2023)

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.337.775.104.063,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.238.773.497.841,48 atau sebesar 92,60 %, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp985.771.459.439,00, Belanja Modal sebesar Rp191.387.781.541,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.508.140.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 158.107.723.083,00.

Tabel 1.10
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Daerah	1.247.720.963.365,81	1.134.633.302.664,80	1.160.519.035.134,20	1.234.314.965.505,26	1.238.773.497.841,48
Belanja Operasi	900.110.242.112,50	847.838.293.017,03	870.146.031.190,78	909.561.817.817,65	902.919.516.447,48
Belanja Modal	194.815.396.237,56	110.707.851.887,02	135.593.799.612,62	181.887.479.131,61	178.969.196.899,00
Belanja Tak Terduga	309.763.500,00	25.655.513.480,00	4.154.477.993,00	562.885.000,00	1.242.050.000,00
Belanja Transfer	152.485.561.515,75	150.431.644.280,75	150.624.726.337,80	142.302.783.556,00	155.642.734.495,00
Belanja Daerah	1.247.720.963.365,81	1.134.633.302.664,80	1.160.519.035.134,20	1.234.314.965.505,26	1.238.773.497.841,48

Sumber: BKD Kab. Solok (Laporan Keuangan TA. 2023)

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar 1.234 triliun naik sebesar 4 milyar menjadi 1.238 triliun pada Tahun 2023.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Solok TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.528.593.363,00	65.479.129.181,49	99,92
Penggunaan SiLPA	65.528.593.363,00	65.447.169.181,49	99,88
Penerimaan Piutang Daerah	-	31.960.000,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.444.000.000,00	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.444.000.000,00	-	-

Sumber : BKD Kab. Solok (Laporan Keuangan TA. 2023)

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp65.479.129.181,49 terdiri dari Penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp65.447.169.181,49, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dana bergulir sebesar Rp28.560.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah P2KU sebesar Rp3.400.000,00.

Realisasi penggunaan SiLPA Tahun 2023 menjadi Rp65.447.169.181,49, sedangkan realisasi penggunaan SiLPA Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Penggunaan SiLPA TA. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
A.	SISA DANA DAK FISIK	7.540.320.434,00
	DAK REGULER	2.683.704.810,00
1	DAK Bidang Pendidikan SD	12.706.050,00
2	DAK Bidang Pendidikan SMP	2,00
3	DAK Bidang Kesehatan dan KB	203.518.637,00
4	DAK Penguatan Sistem Kesehatan	160.683.000,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	92.600.000,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	76.778.800,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	162.100,00
8	DAK Bidang Pertanian	23.885.506,00

NO	URAIAN	JUMLAH
9	DAK Bidang Pariwisata	8.637.200,00
10	DAK Bidang Pendukung Konektivitas/Jalan	1.869.692.000,00
11	DAK Bidang Pendidikan Perpustakaan Daerah	3.015.064,00
12	DAK Bidang Perumahan Pemukiman	18.154.000,00
13	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	213.872.451,00
	DAK PENUGASAN	4.856.615.624,00
1	Bidang Kesehatan dan KB	68.694.827,00
2	Bidang Jalan	2.165.920.693,00
3	Bidang Air Minum	1.400.239.559,00
4	Bidang Pasar	79.224.234,00
5	Bidang Irigasi	211.383.650,00
6	Bidang Lingkungan Hidup	140.000,00
7	Pengendalian Penyakit	132.999.981,00
8	Bidang Pertanian	599.640.000,00
9	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.896.000,00
10	Bidang Pariwisata	196.476.680,00
B.	SISA DANA DAK NON FISIK	10.046.829.622,00
1	Sisa Dana BOS	87.390.811,00
2	Sisa BOP PAUD	390.732.500,00
3	Sisa Tunjangan Khusus Guru	17.966.200,00
4	Sisa Tunjangan Profesi Guru	2.178.921.135,00
5	Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	577.113.000,00
6	Sisa Dana BOK – Kesehatan	4.336.726.911,00
7	Sisa Dana BOK - Kesehatan Tambahan	522.031.741,00
8	Sisa Dana BOK – KB	1.012.664.176,00
9	BOP Pendidikan Kesetaraan	578.150.000,00
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	25.941.058,00
11	Dana Peningkatan Kapasitas dan UKM	1.514.900,00
12	Sisa Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan	185.055.540,00
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	69.916.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
14	Dana Fasilitas Penanaman Modal	27.855.650,00
15	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.850.000,00
C.	DANA INSENTIF DAERAH	2.934.070.945,00
1	Dana Insentif Daerah	2.934.070.945,00
D.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	3.838.115.781,23
1	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.838.115.781,23
	Jumlah A + B + C+D	24.359.336.782,23
D.	SISA DANA ALOKASI UMUM (DAU)/PAD/LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH/ BAGI HASIL	41.087.832.399,26
1	SiLPA BLUD RSUD	5.546.757.009,05
2	SiLPA BLUD Puskesmas	1.333.241.312,59
	Koreksi SiLPA Saldo Awal Dana Bos Tahun 2023	(8.670.558,00)
	Setoran Sisa Kas BOP PAUD TA 2022 ke Kas Negara pada Tahun 2023	(51.432.500,00)
3	Sisa DBH CHT	2.783.290,00
4	Sisa DBH Dana Reboisasi	982.914,00
5	Kewajiban	9.230.586.030,90
6	Efisiensi atau sisa dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD	25.054.906.024,72
	Lebih Bayar PFK Gaji ASN (PPh Pasal 21) Tahun 2021	(21.303.450,00)
	Kesalahan Potong Pajak Giro LABKESDA oleh pihak Bank	(17.674,00)
	PENGUNAAN SiLPA TAHUN ANGGARAN 2022	65.447.169.181,49

Sumber : BKD Kab. Solok (Laporan Keuangan TA. 2023)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi permasalahan, terdapat beberapa isu strategis jangka menengah Kabupaten Solok

tahun 2021-2026. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Optimal Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat;
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Baik Dari Segi Kuantitas Maupun Kualitas;
3. Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat; dan
6. Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Pelestarian Adat dan Budaya untuk Memperkuat Modal Sosial Masyarakat.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD merupakan visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan pada suatu daerah atau kondisi pada masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021- 2026 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2026 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut:

***“Membangkit Batang Tarandam,
Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”***

Visi pembangunan daerah ini mempunyai dua bagian kalimat yang perlu mendapat perhatian, yaitu ***“Membangkit Batang Tarandam”*** dan ***“Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”***. Makna dari kalimat ***“Membangkit Batang Tarandam”*** adalah ungkapan untuk mengembalikan marwah Kabupaten Solok yang tenggelam semenjak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan indikator pembangunan sosial ekonomi selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Solok tidak berada pada peringkat teratas atau masuk kelompok terbaik di Sumatera Barat. Misalnya, Indeks Pembangunan Kabupaten Solok pada tahun 2020

hanya 68,60 menempati posisi 16 dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya data kemiskinan juga memperlihatkan bahwa peringkat kedua tertinggi di Sumatera Barat. Kedua indikator ini jelas memperlihatkan bahwa posisi Kabupaten Solok saat ini betul-betul pada posisi yang sangat tidak menggembirakan. Oleh sebab itu, pernyataan “*Membangkit Batang Tarandam*” tidak lain untuk memberi semangat dan motivasi bagi semua *stakeholders* dan masyarakat Kabupaten Solok untuk bangkit dari keterpurukan kinerja pembangunan daerah.

Selanjutnya pernyataan “**Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat**” untuk menjaga konsistensi atau relevansi dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Solok, “Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”. Selanjutnya pernyataan “Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat” adalah bersifat heroik dan melambungkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan masyarakat Kabupaten Solok.

Adapun Misi merupakan upaya dalam mewujudkan rencana dalam bentuk cara serta langkah yang akan dikerjakan selama satu periode yang telah ditetapkan. Misi merupakan penggambaran dari visi yang ingin dicapai yang berisi uraian dari upaya-upaya apa yang harus dilakukan secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri. Dengan demikian misi memberikan arah dan juga batasan dalam upaya melakukan proses pencapaian tujuan.

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 berfokus pada pembangunan dan peningkatan kompetensi seluruh sumber daya yang terdapat di Kabupaten Solok dalam segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Solok. Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran belanja Kabupaten Solok dimaksimalkan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan *stakeholder* yang ada di nagari, sehingga usulan dari Musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

Misi ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur yang merata di setiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari. Kabupaten Solok memiliki kondisi geografis yang berbukit-bukit dan masyarakatnya tinggal menyebar di seluruh wilayah baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.

Keberadaan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar kegiatan dan aktivitas di masyarakat khususnya di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang berkeadilan maksudnya adalah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing nagari. Selama ini pembangunan infrastruktur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah dan masih menyisakan beberapa daerah tertinggal.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus untuk kedepannya adalah peningkatan jalan kabupaten yang berkualitas (jalan mantap) termasuk di dalamnya jembatan. Jalan kabupaten merupakan jalan poros utama yang menghubungkan antar nagari dan juga penghubung ke pusat-pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kegiatan lainnya.

Saat sekarang ini masih ada beberapa nagari yang masih sulit diakses karena belum tersedianya akses jalan yang layak. Di samping itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya di jalan utama, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana keselamatan seperti penyediaan rambu-rambu lalu lintas, guadril, deliniator dan juga Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Pembangunan dan perbaikan irigasi menjadi fokus selanjutnya karena merupakan pendukung utama sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten Solok sekaligus menjadi lumbung pangan di Provinsi Sumatera Barat dan juga nasional. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan jaringan irigasi yang sudah rusak dan penambahan pembangunan irigasi baru guna meningkatkan produksi pertanian.

Infrastruktur air minum dan sanitasi juga perlu ditingkatkan karena terkait langsung dengan derajat kesehatan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya *stunting*. Kabupaten Solok memiliki sumber air baku yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan layanan

PDAM masih belum bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten. Sama halnya dengan sanitasi, perlu disediakan sarana jamban yang sehat di setiap rumah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Infrastruktur yang berkeadilan juga dimaksudkan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Perubahan iklim dan juga bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan lingkungan hidup seperti penurunan kualitas air, udara dan tanah. Selanjutnya pengelolaan sampah juga perlu ditingkatkan karena di samping berdampak kepada kualitas lingkungan hidup juga berpengaruh kepada sektor pariwisata.

Sejauh ini Kabupaten Solok memanfaatkan TPA regional yang berada di Ampang Kualo sebagai tempat pembuangan akhir sampah, yang mana usia penggunaannya sudah tidak lama lagi, untuk itu diperlukan pembangunan TPA sampah alternatif untuk menampung pembuangan sampah di Kabupaten Solok.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan meningkatkan kepatuhan pembangunan terhadap dokumen RTRW Kabupaten Solok. Kabupaten Solok juga merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan gunung api. Untuk itu kedepannya perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Solok.

Di samping itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur penunjang sektor pariwisata baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jalan dan jembatan menuju objek wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta transportasi menuju objek wisata.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Misi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata adalah upaya pemerintah Kabupaten Solok untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya memberi dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Dengan demikian peningkatan ekonomi yang terjadi diharapkan akan dapat memberikan dampak nyata yang signifikan serta dapat diukur terhadap peningkatan pendapatan rata-rata atau daya beli masyarakat di Kabupaten Solok. Peningkatan ekonomi juga akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi berskala besar di Kabupaten Solok, yang sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil, koperasi dan menengah untuk ikut tumbuh.

Oleh karena itu upaya Kabupaten Solok untuk dapat menciptakan peningkatan ekonomi berkelanjutan harus tetap dijaga. Peningkatan ekonomi yang berkesinambungan juga diharapkan dapat menciptakan berbagai peluang dalam kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan kondisi ini menjadikan perekonomian Kabupaten Solok yang lebih baik dan berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Produk-produk ciri kas lokal yang unik dan kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Kabupaten Solok diharapkan akan menjadi salah satu keunggulan produk yang akan di perjual belikan. Perkembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan akan sangat ditentukan oleh pemikiran serta ide ide baru, inovasi dan pengetahuan dari berbagai sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Dengan demikian, dalam mewujudkan perkembangan ekonomi kreatif akan membutuhkan keterlibatan banyak sumber daya manusia dan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan volume dan transaksi ekonomi. Pada akhirnya kondisi ini akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi kreatif yang potensial berbasis lokal di Kabupaten Solok antara lain, seperti kuliner, kerajinan, dan berdampak terhadap peningkatan sektor perdagangan dan PDRB di Kabupaten Solok.

Di Kabupaten Solok pariwisata termasuk sektor penentu dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan menjadi industri dan dasar pembangunan Kabupaten Solok untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Solok berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pengelolaan pariwisata halal, wisata nyaman dan berkesan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Solok yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, nilai budaya yang Islami dan menghargai kearifan lokal di masyarakat.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, tidak akan berjalan dengan efektif, apabila peran dan kontribusi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol, tidak diberdayakan.

Dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan menghasilkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkualitas sehingga akuntabilitas, transparansi dan kinerja birokrasi akan meningkat, transparansi dan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah harus didukung oleh komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi secara terus menerus di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sampai kepada pemerintahan terendah di Nagari- Nagari yang ditopang dengan ketersediaan ASN yang profesional serta dukungan pemanfaatan teknologi informasi dengan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (IT).

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima (*excellent service*) kepada masyarakat Kabupaten Solok. Selain itu pemerintah Kabupaten Solok juga dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien.

5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang

diharapkan mampu berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta optimalisasi pembangunan kepemudaan dan olahraga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting terutama dalam kondisi saat ini. Perubahan yang sangat cepat dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang juga sangat cepat. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok yang mampu bersaing dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri.

Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun *networking* dengan berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang diharapkan terjadi di segala bidang kehidupan, dilakukan secara sengaja dan terencana. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Solok merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Kekayaan intelektual serta sumber daya manusia sebagai potensi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri harus mampu mewujudkan peran manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam dalam mencapai kesejahteraan.

6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran *Tungku Tigo Sajaringan* dan *Tali Tigo Sapilin* yang

merupakan ciri khas daerah.

Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tenteram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, dimana salah satunya adalah norma agama.

Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan.

Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*).

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan dapat tercapai, rasional selama 5 tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 s/d 2026 yang mengemban 6 misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang responsif. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya anggaran berbasis kebutuhan masyarakat dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.13**Misi 1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang responsif	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Misi kedua ini bertujuan untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari: (1) Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah, (2) Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan, (3) Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan, (4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan (5) Meningkatnya ketahanan terhadap bencana.

Tabel 1.14**Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Infra struktur Daerah	1. Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	1. Persentase kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang
Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan		2. Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan 3. Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Persentase Infrastruktur Dasar berkondisi baik 3. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman berkondisi baik 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

		5. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	5. Level Ketahanan Bencana Daerah
--	--	--	-----------------------------------

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran, indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.15

Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB Per kapita 2. Pengeluaran Riil 3. PDRB sektor pertanian 4. PDRB sektor perdagangan 5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil 7. Tingkat pengangguran terbuka

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel,
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikatornya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.16**Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK
		2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Level Maturitas SPIP 3. Indeks SPBE
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Inovasi Daerah

Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat,
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Merata dan Berkeadilan,
3. Menguatnya Karakter Peserta Didik Religius, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan,
4. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat,
5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga,
6. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat,
7. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif, serta
8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan, dan indikatornya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.17

Misi 5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Merata dan Berkeadilan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5. Angka Partisipasi Sekolah
		3. Menguatnya Karakter Peserta Didik Religius, Berbudaya dan Berwawasan Kebangsaan	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum 2. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum.
		4. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	1. Peningkatan prestasi olahraga 2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
			3. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri
		6. Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi <i>Stunting</i>
		7. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	1. Angka Kelahiran Total (TFR) 2. Indeks Pengarustamaan Gender
		8. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan

Misi 6: Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 1.18

Misi 6. Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Masyarakat	Persentase Cakupan Ketahanan Sosial Budaya	Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Solok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.19
Program pada RPJMD Kab. Solok TA.2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
01.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
01.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
01.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
01.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
01.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan
01.04.03	Program Kawasan Permukiman
01.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
	Penyelamatan Non Kebakaran
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
01.06.06	Program Penanganan Bencana
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
02.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
02.07.05	Program Hubungan Industrial
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
02.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
02.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
02.10.10	Program Penatagunaan Tanah
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
	Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
02.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
02.12.03	Program Pencatatan Sipil
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
02.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.02	Program Penataan Desa
02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
02.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
02.16.03	Program Aplikasi Informatika
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
02.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
02.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
02.17.08	Program Pengembangan Umkm
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
02.22.04	Program Pembinaan Sejarah
02.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
02.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip
02.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
02.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip
03.00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor
03.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
03.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
04.00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
04.01	SEKRETARIAT DAERAH
04.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan
04.02	SEKRETARIAT DPRD
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
05.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
05.01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
05.02	URUSAN KEUANGAN
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
05.03	KEPEGAWAIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah
05.04	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
06.00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
06.01	INSPEKTORAT DAERAH
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
07.00	UNSUR KEWILAYAHAN
07.01	KECAMATAN
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
08.00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
X.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
X.XX.	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
X.XX.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan dimuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang dimuat pada RKPD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.20
Kegiatan pada RKPD Kab. Solok TA.2023

Urusan	Program	Kegiatan
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Program Pengembangan Kurikulum	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	

Urusan	Program	Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Kab/ Kota
		Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD
		Pengadaan Obat Dan Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP , Makanan Dan Minuman Ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Urusan	Program	Kegiatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Dan Minuman Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas PUPR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten / Kota
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (Non Kecil Dan Kecil)
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
Dinas PRKPP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
	Program Peningkatan PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penatausahaan Tanah	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Satpol PP Dan Damkar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Panganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Administrasi Barang Milik Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Inspeksi Peralatan Dan Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial

Urusan	Program	Kegiatan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
DPMPTSPNAKER	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ Kota

Urusan	Program	Kegiatan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/ Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah

Urusan	Program	Kegiatan
Disdukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
DPMN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa

Urusan	Program	Kegiatan
MASYARAKAT DAN DESA		
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Urusan	Program	Kegiatan
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DPPPKBP3A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Urusan	Program	Kegiatan
		Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		ADMINISTRAS KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
		Perbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Urusan	Program	Kegiatan
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dinas Kominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten
	Program Aplikasi Dan Informatika	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Program Penyelenggaraan Statistik Dan Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten
DKUKMPP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada

Urusan	Program	Kegiatan
		Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	Program Stabilisasi Harga Barang	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kabupaten/Kota
		Pengendalian Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Dispersip	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Solok	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Solok
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Program Pengelolaan Arsip	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh Tahun)
		Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Keg. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Urusan	Program	Kegiatan
		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Keg. Pengawasan Sumberdaya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
		Keg. Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil
		Keg. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Keg. Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keg. Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Keg. Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keg. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan

Urusan	Program	Kegiatan
		Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi
	Prog. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizin
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perikanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keg. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupatn/ Kota
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten Solok/Kota
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Dan Budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota
		Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Obat Hewan Ditingkat Pengeccer

Urusan	Program	Kegiatan
		Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih / Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Penyediaan Benih / Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumber Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Roduk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesejahteraan Hewan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Urusan	Program	Kegiatan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan
		Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi Dan Teknologi

Urusan	Program	Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Badan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan

Urusan	Program	Kegiatan
		Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
BKPSDM	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn
		Mutasi Dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitai Kerumahtangan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas DPRD
		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik
		Pembahasan Kerjasama Daerah
		Fasilitasi Tugas DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD
		Layanan Administrasi DPRD
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Urusan	Program	Kegiatan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
UNSUR KEWILAYAHAN		
Kecamatan Pantai Cermin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan Payung Sekaki	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
	Kabupaten / Kota	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan Lembah Gumanti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tk Kecamatan

Urusan	Program	Kegiatan
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi , Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec. Lembang Jaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

Urusan	Program	Kegiatan
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi , Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec. Hiliran Gumanti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi , Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec. Sungai Lasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec. Singkarak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Urusan	Program	Kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan Dan Penegakkanperda Dan Perkada
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Dikecamatan
Kec. X Koto Diatas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
	Umum	
Kec. Danau Kembar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Program Koordinasi Kentenraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

Urusan	Program	Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kec. Tigo Lurah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Program	Kegiatan
Kec. Bukit Sundi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kec. Junjung Sirih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Urusan	Program	Kegiatan
	Kelurahan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec. Gunung Talang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan

Urusan	Program	Kegiatan
	Pemerintahan Desa	Desa
Kec. Kubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Dikecamatan
	Program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-

jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok segera menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan program yang paling efektif untuk mencapai sasaran dan dapat merangkai program prioritas yang inheren agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam

menentukan program prioritas yang tepat.

Untuk menjamin terpenuhinya Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Solok, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang memiliki tugas:

1. Mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati/ Wali Kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan Kabupaten/ Kota;
2. Melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten/ Kota;
8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten/ Kota;
9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten/ Kota;
10. elakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten/ Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. Melakukan rapat secara berkala; dan

14. Melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada Tahun 2023, yang dibuktikan dengan kebijakan umum anggaran yang berlandaskan pada seluruh program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten/ Kota sesuai amanat konstitusi.

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 kami lampirkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Solok	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3213 Orang/bulan	3213 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Solok	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152 Dokumen	152 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.01.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	200 Orang	80 Orang	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Undangan		Undangan			Kab. Solok		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Solok		
							1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	5 Unit		Kab. Solok		
							1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota			
							1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 buah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota			
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kab. Solok		
								1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	23 Ruang			
								1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	15 Ruang			
								1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	27 Ruang			
								1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	18 Ruang	17 Ruang			
								1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	85 Unit	128 Unit			
								1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	21 Ruang			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	41 Ruang				
							1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang				
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	4 Unit				
							1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	28 Paket	34 Paket				
							1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	739 Paket	739 Paket				
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia	50 Paket	97 Paket				
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	364 Sekolah	364 Sekolah				
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45237 Peserta Didik	45237 Peserta Didik				
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	0 Orang				
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	381 Orang	381 Orang				
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	364 Sekolah	364 Sekolah				
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	364 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	364 Orang	364 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	2 Ruang			
								1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP	2 Ruang	2 Ruang	100 %	100 %	
								1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP	0 Ruang	0 Ruang	100 %	100 %	
								1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP	5 Ruang	5 Ruang	100 %	100 %	
								1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	3 Ruang			
								1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP	5 Ruang	5 Ruang	100 %	100 %	
								1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	17 Unit				
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	3 Ruang				
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	7 Paket				
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku			
								1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2760 Paket	2760 Paket			
								1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	2 Paket			
								1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	13334 Peserta Didik	13334 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	360 Peserta Didik	360 Peserta Didik			
								1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	50 Orang			
								1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang			
								1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	450 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan			
								1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Sekolah Menengah Pertama							
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	288 Orang	288 Orang				
							1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				
							1.01.02.2.02.46 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen				
							1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang				
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	10 Unit				
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				
							1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	600 Paket	600 Paket				
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik				
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Persen	100 Persen				
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	381 Satuan Pendidikan					
				1.01.02.2.04 Pengelolaan			1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan						
								1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.04.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit			
								1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0 Paket			
								1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0 Paket			
								1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0 Paket			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik				
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	0 Orang				
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21 Satuan Pendidikan					
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang				
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal			1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	0 Dokumen	0 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Nonformal yang Tersusun Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Nonformal	370 Lembaga	370 Lembaga			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300 Dokumen	300 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150 Laporan	150 Laporan	Semua Kab/Kota		
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD	0 Dokumen	0 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.01.06.2.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	400 Buku	400 Buku	Semua Kab/Kota		
								1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Peserta Didik	42 Peserta Didik	Semua Kab/Kota		
								1.01.06.2.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	200 Dokumen	200 Dokumen	Semua Kab/Kota		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	855 Orang/bulan	855 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	63 Orang	Kab. Solok		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kab. Solok		
								1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
								1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang bayar pajak dan perizinannya	6 Unit	6 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
								1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD				1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	22 Unit	22 Unit				
								1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	1 Unit				
								1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	19 Unit	19 Unit				

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
							1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit				
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Paket	1 Paket				
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	1 Paket				
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	166 Orang				
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	204 Orang				
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan		204 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 359 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 360 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 398 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 441 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 472 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 473 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 156 Orang 549 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 740 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 860 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 938 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7923 Orang 7923 Orang				
										1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 126 Orang 126 Orang Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 158 Orang Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 195 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang	195 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	343 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	380 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	441 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	450 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	706 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	821 Orang		
										Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7563 Orang	7563 Orang		
									1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	150 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	185 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang	185 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	327 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	362 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	429 Orang		
										Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	430 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 156 Orang 499 Orang Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 782 Orang Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 853 Orang Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7203 Orang 7203 Orang				
								1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 736 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 881 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 907 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1085 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1599 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1770 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 2032 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 2098 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 2102 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 365 Orang 2441 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 3827 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3934 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4172 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35620 Orang	35620 Orang		
										Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1061 Orang	41714 Orang		
									1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	931 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1147 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1108 Orang	1147 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2022 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2023 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2239 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2653 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2658 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2976 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	3088 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	3934 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4840 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5277 Orang		
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20538 Orang	20538 Orang		
									1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232760 Orang	232760 Orang		
									1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	860 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1037 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1059 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1867 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2067 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	2450 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	2852 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4469 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38276 Orang	38276 Orang		
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1189 Orang	57474 Orang		
								1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang			
									Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	5650 Orang			
									Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85105 Orang	85105 Orang			
								1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	193 Orang			
									Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2100 Orang	2100 Orang			
								1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	17 Orang			
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	19 Orang			
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	20 Orang			
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	21 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 23 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 33 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 45 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 84 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 797 Orang 797 Orang				
								1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 74 Orang 148 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 152 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 154 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 169 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 170 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 184 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 192 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 253 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 343 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 354 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9955 Orang	9955 Orang		
								1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	11505 Dokumen	1 Dokumen		
								1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		
								1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen		
								1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen			
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen			
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen			
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	1 Orang			
									Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	10 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	12 Orang		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	15 Orang		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	18 Orang		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	25 Orang		
										Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang		
									1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen		
									1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	120 Orang	120 Orang		
									1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	1 Paket		
										Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket	5 Paket		
									1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	5 Unit		
									1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit		
									1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan		
									1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
								1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	1 Unit		
										Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
								1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota	
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	2 Orang			
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	8 Orang			
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	9 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 10 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 11 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 15 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 17 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 18 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 19 Orang				
										Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 30 Orang 30 Orang				
								1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen				
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang 30 Orang				
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 Dokumen 0 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen				
									Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit 1 Unit				
								1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Sarana 30 Sarana				
								1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	30 Sarana 30 Sarana				
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen 1 Dokumen				
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen 1 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20 Unit	20 Unit				
								1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen				
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	1 Dokumen				
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 %	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 Laporan	37 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	0 0	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	0 0	Kab. Solok		
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 a	1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	0 0	Kab. Solok		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 a	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 0	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 a	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 0	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0 0	Kab. Solok		
								1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 0	Semua Kab/Kota		
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 a	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	3.01 a	3.01 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Kab. Solok		
								1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas DI Kewenangan Kabupaten yang dilayani Jaringan Irigasi	48,2 %	48,2 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sungai dan Embung yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	Kab. Solok	
								1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	1 KM	Kab. Solok		
								1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	0 0	Kab. Solok		
					1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Pertanian yang terlayani Irigasi Berkondisi Baik	1200 Ha	1200 Ha	1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	83 KM	83 KM	Kab. Solok	
								1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	28 KM	28 KM	Kab. Solok		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	80,27 %	80,27 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang direhabilitasi dan dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	25 SR	0 0	Kab. Solok	
								1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik tertentu	50 liter/detik	50 liter/detik	Kab. Solok		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang tersedia	55 %	55 %	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang tersedia	55 %	55 %	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0 0	Kab. Solok	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15 Rumah Tangga	0 0	Kab. Solok		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	72,27 %	72,27 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	72,27 %	72,27 %	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	0 0	Kab. Solok	
								1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	Kab. Solok		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung dan Lingkungan Pemerintah Berkondisi Baik	53 %	53 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	3 Kawasan	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	3 Kawasan	Kab. Solok	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,80 %	63,80 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,8 %	63,8 %	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	2 KM	Semua Kab/Kota	
								1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5 KM	0 0	Semua Kab/Kota		
								1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4 KM	4 KM	Semua Kab/Kota		
								1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	220 KM	220 KM	Semua Kab/Kota		
								1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M	10 M	Semua Kab/Kota		
								1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	0 M	0 0	Semua Kab/Kota		
								1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	10 M	0 0	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	24,51 %	24,51 %	1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan	60 Buah	60 Buah	1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Orang	0	Kab. Solok	
		Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	24,51 %	24,51 %					1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Solok	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	57 %	57 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Solok	
									1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	Kab. Solok	
					1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang Daerah	55 %	55 %	1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Solok	
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan terhadap aturan tata ruang	55 %	55 %	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Solok	
									1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	0	Kab. Solok	
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan terhadap aturan tata ruang	55 %	55 %	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	15 Dokumen	0	Kab. Solok	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah				1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Solok		
								1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	150 Orang	150 Orang			
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang direhabilitasi	4 Unit	4 Unit			
									Pendataan Rumah Terdampak Bencana/Terkena Relokasi Program Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen			
								1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit			
									Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Terdampak Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen			
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Izin Site Plan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 rekomendasi	3 rekomendasi			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang disusun dan atau tereview serta terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
								1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Permukiman dan Permukiman Kumuh		Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	18 Dokumen	18 Dokumen		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1500 Unit Rumah	1500 Unit Rumah		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1500 Unit Rumah	1500 Unit Rumah		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Laporan	1 Laporan		
								1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3 Lokasi		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok	
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan 52 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 20 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen 15 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54 Paket	54 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kab/Kota			
							1.05.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen				
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota			
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota			
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Kasus	12 Kasus			
								1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	12 Kasus			
								1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
								1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			
								1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2900 Orang	2900 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					
									1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit		
									1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 Dokumen	3 Dokumen		
									1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan		
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	1 Laporan		
									1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	0 Laporan	0 Laporan		
									1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP						
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan perda	1 laporan	1 laporan				
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0 Laporan	0 Laporan				
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	45 Orang	45 Orang				
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	12 Unit	12 Unit				
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan				
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	0	0				
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	100 Orang				
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	40 Laporan		
									1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	75 Dokumen	75 Dokumen		
									1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Dokumen	40 Dokumen		
									1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit		
									1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan	2 Orang	2 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				
								1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		jumlah dokumen yang memuat data bangunan /gedung yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	1 dokumen		
								1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran				1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	40 Dokumen	40 Dokumen		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	200 Orang		
								1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	35 Laporan	35 Laporan		
								1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		
								1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 Unit	2 Unit		
								1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1 Laporan		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100% % 100% %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Solok	
								1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntans	100 %	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100 %	100 %	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		
								1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Solok		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pilar-pilar Sosial yang Diberdayakan	100 %	100 %	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumbangan dalam daerah kabupaten/kota yang terkumpul	100 %	100 %	1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen		
					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	100 %	100 %	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang tertangani	100 %	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	120 Orang	120 Orang		
									1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang		
									1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang		
									1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang		
									1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang		
									1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	160 orang		
									1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang					
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100 % 100 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 % 100 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24582 Orang	24582 Orang					
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	14898 Keluarga	14898 Keluarga	Semua Kab/Kota				
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100 % 100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	100 % 100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2750 Orang	2750 Orang					
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	Semua Kab/Kota				
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan kabupaten	100% % 100% %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	100 % 100 %	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota				
							1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam					
							1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan					

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dapat digambarkan dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,39	71.92	0.53
2	Angka Kemiskinan	7,12	7,13	0.14
3	Angka Pengangguran	5,89	4.99	-15.28
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.28	4.36	1.869
5	Pendapatan Per Kapita	39668,15	42.398	6.733
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,243	0.235	-3.292

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang dimuat dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi masyarakat usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91,70451	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,79146	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi masyarakat usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,34295	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,91797	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,261983	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Solok yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,75787	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,83858	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,08388	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,56653	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	88,09683	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten Solok	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten Solok	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Solok yang dilayani oleh jaringan irigasi	48,9833	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Solok	83,12854	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	55,04924	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio kepatuhan IMB kab	101,1905	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	63,84565	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	66,16314	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten Solok	100	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Solok	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Solok yang ditangani	22,72457	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,439511	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	21,80505	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah mayarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah mayarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah mayarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,04	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	73,27247	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Solok	100	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	92,36364	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1000728	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten Solok	101,0596	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,040446	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Solok	100	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,76092	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
				Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	88,420	Dinas Perikanan Pangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	66,71637	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Pertanian
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	7,53729	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Solok	75,71	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Solok	73,05641	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	0	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi dan Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	96,88992	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51,14153	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan akta kelahiran	98,05662	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	30,76923	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	23,25581	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,052	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69,92255	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,90614	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
				Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten Solok	81	Dinas Perhubungan
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten Solok	0,33	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	77,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	78,9998	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,42857	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	26,13941	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
18	Penanaman Modall	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Solok	8,524024	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3,633405	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,26422	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	33,07861	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	9,174312	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	52,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (T)	61,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (T)	48,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten Solok (sumber data: one data KKP)	102,9308	Dinas Perikanan Pangan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	16,4557	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Solok	27,1476	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Tingkat Hunian Akomodasi	436,2575	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,985389	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	33,90315	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	655,1674	Dinas Pertanian
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-72,9281	Dinas Pertanian
28	Kehutanan		0	TDI Bukan Kewenangan
29	ESDM		0	TDI Bukan Kewenangan Pemda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outcome)	Capaian kinerja	Sumber Data
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	41,63381	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk	52,09042	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5,634953	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Solok	85,70533	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	19,01975	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Solok	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	85	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
32	Transmigrasi		0	TDI Bukan Kewenangan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indikator Kinerja Kunci Hasil dimuat dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), akan tetapi karena keterbatasan waktu dokumen pendukung Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang sudah diperbaharui oleh Perangkat Daerah belum diperbaharui pada Indikator Kinerja Kunci Hasil, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	342	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	666	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10249	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada PAUD	1114	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	879	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	202	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	430	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1600	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1212	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44438	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13919	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	12	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3903	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1385	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	860	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	322	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana	1866	Dinas Pendidikan Pemuda Dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		(S1) dan sertifikat pendidik		Olahraga
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1385	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	73	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	560	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	257	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	14	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	625	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4026	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	11	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	45	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	45	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	14	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	38755	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	774	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18585	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	774	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	49560	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	774	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	621012	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	789	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	143871	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	827	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	192905	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	827	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	59740	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	827	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	70240	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	793	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2042	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	827	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	88	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	56	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12549	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	350	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18766	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	815	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	587	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	116.35	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1.5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/foa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Ruang
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	83.263	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	282.416	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	3930	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	41276	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	42076	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	84	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		yang dipelihara/dirawat		Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1152.99	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang dibangun	1372	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang dibangun	288	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	34855.72	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	58	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	17260.67	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang dipelihara	297.82	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang dipelihara	6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Ruang
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	322	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	322	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi	0	Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Penataan Ruang
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	97472	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	431	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1688	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1688	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian	0	Dinas Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	101.08	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	677	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanian
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	8.52	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Dan Pertanahan
		Jumlah rumah di kab/kota	97472	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit PK RTLH	677	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah tidak layak huni	5302	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Rasio rumah dan KK	7074	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah rumah pembangunan baru	103	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	98839	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	298	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2720	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Tersedianya sarana prasarana minimal	361	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	408424	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	445	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	340	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	408424	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	106	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	106	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	95	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Tersedianya pos sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi sarana prasarana Pemadam Kebakaran, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	89	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Pos Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan	4	Dinas Satuan Polisi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		sarana/prasarana Pemadam Kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	95	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	86	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	29	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	99	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
6	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	7887	Dinas Sosial
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	39	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	5762	Dinas Sosial
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1390	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	4023	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	11	Dinas Sosial
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	6068	Dinas Sosial
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	145	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5779	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25332	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	4	Dinas Sosial
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	2750	Dinas Sosial
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	4	Dinas Sosial
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	47	Dinas Sosial
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	9	Dinas Sosial
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	5	Dinas Sosial
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	39	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	9	Dinas Penanaman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase LPK yang terakreditasi	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah penganggur yang dilatih	240	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	240	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase penyerapan lulusan	128	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Lulusan bersertifikat kompetensi	240	Dinas Penanaman Modal Pelayanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Data tingkat produktivitas total	1100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	253	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah mogok kerja	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Penanaman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	755	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SIS)	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	26	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	26	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan	1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		kekerasan terhadap anak		Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0.004	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Dan Perlindungan Anak
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0.012	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	31	Dinas Perikanan Pangan
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	941	Dinas Perikanan Pangan
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	Dinas Perikanan Pangan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	15	Dinas Perikanan Pangan
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Perikanan Pangan
		Tertanganinya kerawanan pangan	10	Dinas Perikanan Pangan
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	941	Dinas Perikanan Pangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	3	Dinas Perikanan Pangan
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	59.41	Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.96	Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	77.34	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Lingkungan Hidup
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	6	Dinas Lingkungan Hidup
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Dinas Lingkungan Hidup
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	5	Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga	200	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		kemasyarakatan yang diberikan diklat		
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	2	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi dan Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	186.183	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan akta perceraian	4.068	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan akta kematian	1.722	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Penyajian data kependudukan	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	293	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
14	Pengendalian Penduduk dan	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan	0	Dinas Pengendalian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
	Keluarga Berencana	Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	18.586	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	410.4	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	107	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	271	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	19	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	107	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPB yang efektif	271	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	40.52	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	90	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	16365	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Perlindungan Anak
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	91.5	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	94	Dinas Perhubungan
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Dinas Perhubungan
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	81	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	3	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		telah diimplementasikan secara elektronik		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	13	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	52	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot a sesuai dengan strategi komunikasi	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		(STRAKOM)		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42.41	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	57.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	17.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Dan Perdagangan
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	55	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	41.43	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	29.66	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.45	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1.81	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.35	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.81	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	3.3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
18	Penanaman Modall	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman Modall yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Kegiatan pameran penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Kegiatan penerimaan misi penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Laporan realisasi penanaman Modall	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Pembinaan aparatur penanaman Modall tingkat kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Pembinaan penanaman Modall PMA dan PMDN	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	110	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	6	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	6	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	59	Dinas Komunikasi Dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Informatika
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	42	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	63	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	87	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	27	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	10	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	27	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0.25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase kermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0.11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.00026	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	11.42	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah masyarakat yang gemar membaca di masyarakat	2869	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	81.85	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	51.07	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	12.59	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	70	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	80	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		NSPK		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	696	Dinas Perikanan Pangan
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Perikanan Pangan
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	49	Dinas Perikanan Pangan
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	20	Dinas Perikanan Pangan
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	6.56E+08	Dinas Perikanan Pangan
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	5	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	258	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	76	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	368	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	408	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	147876	Dinas Pertanian
		Prasarana pertanian yang digunakan	581	Dinas Pertanian
		Penerbitan izin usaha pertanian	2	Dinas Pertanian
		Persentase prasarana yang digunakan	0.99	Dinas Pertanian
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	Dinas Pertanian
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	TDI Bukan Kewenangan
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	TDI Bukan Kewenangan
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	TDI Bukan Kewenangan
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	TDI Bukan Kewenangan
29	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	TDI Bukan Kewenangan
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	84.38	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8.31	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	17.24	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	5.63	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian	Sumber Data
				Perindustrian Dan Perdagangan
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	52.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	TDI Bukan Kewenangan
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	TDI Bukan Kewenangan
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	TDI Bukan Kewenangan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dimuat dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja	Sumber data
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,485273	Badan Keuangan Daerah
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,540926	Badan Keuangan Daerah
		Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Daerah
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Daerah
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	70,11069	Badan Keuangan Daerah
		Opini Laporan Keuangan	6	Badan Keuangan Daerah
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	70,36137	Bagian PBJ Setda
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	41,43725	Bagian PBJ Setda
		peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	247,3878	Badan Keuangan Daerah
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi	474,6268	Badan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja	Sumber data
		dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)		Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,20779	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,16129	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,8208	Badan Keuangan Daerah
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	92,4200	Badan Keuangan Daerah
		Assets Management	4	Badan Keuangan Daerah
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,56879	Badan Keuangan Daerah
5	Transparansi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA

I. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Kepala Daerah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola tujuan dan sasaran strategis, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terukur. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	63,71
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*)	70,70%
4	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,47%
5	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. 27.480.000
		PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. 41.010.000
		Pengeluaran Perkapita	Rp. 10.527.000
		PDRB Sektor pertanian	Rp. 3.794.366
		Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,1%
		PDRB sektor perdagangan	Rp. 1.240.025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,85%
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42%
7	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,17
		Opini BPK	WTP
9	Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	65
		Level Maturitas SPIP	3
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,51
		Indeks Inovasi Daerah	64
11	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,54
12	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,95
		Harapan Lama Sekolah	13,9
13	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,55
		Indeks Pembangunan Gender	96,48
14	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,22

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,06%
16	Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,683

II. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan **akuntabilitas kinerja** instansi pemerintah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran persentase capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dikali seratus. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas dua jenis yaitu maximize dan minimize.

a. Maximize

Rumus **maximize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Minimize

Rumus **Minimize** berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi kearah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pemerintah Kabupaten Solok menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Capaian target RPJMD untuk Tahun 2023 sebagaimana ter pada Tabel. 3 berikut:

Tabel. 3
Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	Tercapai
2.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	63,71	73,33	115,1
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,70	75,71	107,86
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,47	4,36	97,54
5.	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	27.480.000	27.155.120	98,82
6.	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	41.010.000	42.717.020	104,16
7.	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	10.527.000	15.631.812	148,49
8.	PDRB Sektor pertanian	Rupiah	3.794.366	3.934.390	103,69
9.	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	3,1	3,2	103,23
10.	PDRB sektor perdagangan	Rupiah	1.240.025	1.287.910	103,86
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	0,85	0,85	100
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,42	4,99	87,1
13.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (65,00)	B (72,81)	112,02
14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	BB (70,00)	B (67,65)	96,64
15.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,17	-	-
16.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
17.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65	61,60	94
18.	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100
19.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	3,49	124,64
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,51	3,45	98,29
21.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	64	46,56.	72,75
22.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,54	71,92	101,96
23.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	7,90	99,37
24.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,9	13,55	97,48

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
25.	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,55	2,05	119,52
26.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,48	96,29	99,80
27.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,22	72,31	104,46
28.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	7,06	7,13	99,01
29.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,683	0,72	105,44

Berdasarkan Tabel. 3 di atas dilihat bahwa dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Tahun 2023 yang telah ditetapkan, 17 Indikator mencapai target dan 11 Indikator tidak mencapai target serta 1 Indikator belum diketahui hasilnya.

Masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

TOTAL INDEKS IPKD = Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

atau

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

Dimana :

1. D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. D.4 = Penyerapan anggaran
5. D.5 = Kondisi keuangan daerah
6. D.6 = Opini BPK

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target IPKD Kabupaten Solok adalah B dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.1
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Untuk IPKD Tahun Anggaran 2023 belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri, yang disajikan dalam laporan kinerja ini adalah IPKD Tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Kemen Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan IPKD bernilai B.

Pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.1.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.2
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	Tercapai

Sumber: Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 3.1.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IPKD pada tahun 2023 tercapai.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Untuk Tahun 2022 IPKD Kabupaten Solok bernilai B, begitu juga dengan Tahun 2023 IPKD Kabupaten Solok bernilai B, dari segi indeks tetap sama bernilai B, namun dari segi nilai mengalami peningkatan, dimana untuk Tahun 2022 bernilai 52,48 sedangkan Tahun 2023 bernilai 73,112. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) yaitu nilai A maka capaian kinerja belum tercapai.

Tabel. 3.1.3
Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Indeks)	Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	A	Belum Tercapai

Sumber: Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.1.4
Efisiensi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.999.537.244	3.999.537.244	84,74
				Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.740.185.285	4.504.159.201	95,70
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	8.739.722.529	8.503.696.445	97,3
Tingkat Efisiensi 2,7%							

Pada Indikator IPKD Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 2,7% dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.739.722.529,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.503.696.445,-.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian IPKD Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dibawah koordinasi Bapelitbang dan BKD untuk memastikan:

- 1) Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
- 2) Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
- 3) Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
- 4) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
- 5) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.



Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan



Rapat penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah



Musrenbang Tahun 2023 dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024

- b. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan.
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui penggunaan aplikasi SIPD.
- d. Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sebesar 93,33%
- e. Kondisi Keuangan Daerah, telah didukung dengan Kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang dan Solvabilitas layanan
- f. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan Opini WTP lebih dari 6 tahun terakhir secara berturut-turut.
- g. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

2.2 INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Indeks Infrastruktur Daerah mengkan kondisi infrastruktur dasar berkondisi baik, kesesuaian pembangunan dengan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman berkondisi baik, indeks kualitas lingkungan hidup serta level ketahanan bencana daerah.

Formulasi indikator Indeks Infrastruktur Daerah sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Daerah

$$= \frac{\text{Persentase Infrastruktur Dasar Berkondisi Baik} + \text{Persentase Kesesuaian pembangunan dengan Tata Ruang} + \text{Persentase Perumahan dan kawasan Permukiman berkondisi baik} + \text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} + \text{Level Ketahanan Bencana Daerah}}{5}$$

Tabel 3.2.1
Indeks Infrastruk Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Inidikator	Nilai	Ket
1	Persentase Infrastruktur Dasar Berkondisi Baik	69,32%	
2	Persentase Kesuaian pembangunan dengan tata ruang	90,60%	
3	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman berkondisi baik	64,26%	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,71%	
5	Level Ketahanan Bencana Daerah	Level 3 (75%)	
Indeks Infrasturktur Daerah		74,98	

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok adalah 63,71 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.2.1
Indeks Infrastruktur Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Infrastruktur Daerah	63,71

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.2.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.2.2
Indeks Infrastruktur Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Infrastruktur Daerah	63,71	74,98	118,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.2.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 **tercapai**, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Infrastruktur Daerah dengan nilai 63,71 dan terealisasi 74,98 dengan capaian kinerja sebesar **118,0%**.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

Tabel. 3.2.3
Perkembangan Indeks Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	NA	68,43	66,05	74,98	NA	111,11	105,76	118	67,14	111,68

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.1.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 12,24%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Infrastruktur Daerah telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.2.4
Efisiensi Indeks Infrastruktur Daerah

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
Indeks Infrastruktur Daerah	63,71	73,33	115,1	Program Penyelenggaraan Jalan	71.875.991.442	67.391.576.980	93,76
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.572.293.820	9.455.664.306	98,78
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3.910.037.514	3.695.652.216	94,52
				Program Pengelolaan dan Pengembangan	945.000.000	941.326.460	99,61

				an Sistem Air Limbah			
				Program penyelenggaraan penataan ruang	699.196.074	604.923.488	86,52
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.89.815.750	Rp.74.895.500	83,39
				Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.741.000.000	Rp.640.120.950	86,38
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	343.439,040	270.137,340	78.66
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	137.159,400	134.877,400	98.34
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	438.667.946	437.122,024	99.65
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.139.300	2.870,000	69.34
				Program Pembinaan dan	23.030.000	22.850,000	99.22

				Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	103.918.380	93.835,593	90.30
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.321.000	12.784,750	83.45
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	6.300.000	5.270.000	83.65
				Program Pengelolaan Persampahan	2.211.155.168	2.199,396,126	99.47
Rata-rata capaian			115,1	Total Anggaran	17.929.059.202	17.433.215.933	97,23

Pada Tabel. 3.2.4 dapat dilihat bahwa untuk Indikator Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 2,77% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.929.059.202 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.433.215.933 atau 97,23%.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pada tahun 2023 Dinas PUPR membangun jalan sepanjang 1.372m (termasuk juga jalan lingkungan), jalan yang direhab sepanjang 17.260m dan jalan yang dipelihara sepanjang 297.820m.



- b. Pembangunan Jembatan, pada tahun 2023 Dinas PUPR membangun Jembatan Sepanjang 288m, ditingkatkan/dilebarkan 58m dan dipelihara sepanjang 6m.



- c. Dinas PUPR membangun SPAM sebanyak 10 Lokasi dengan 4 Kecamatan, yaitu: Junjung Sirih, Bukit Sundi, Lembang Jaya dan Gunung Talang.



- d. Dinas PUPR sudah memberikan Akses Perpipaan Air Minum dan juga meteran air sebanyak 620 Rumah Tangga.



- e. Kegiatan Survey lokasi atas Permohonan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR), untuk mengidentifikasi tutupan lahan serta mengambil titik koordinat dan dokumentasi lahan.



- f. Penerbitan Izin PPKRP dimana izin yang masuk sebanyak 149 dan yang bisa diterbitkan/diberi Rekomendasi sesuai dengan aturan hanya 135 izin/rekomendasi.



- g. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, dengan mengundang wali nagari se Kabupaten Solok maupun turun langsung ke Kantor Camat dan Kantor Walinagari.



2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2023 RTLH di Kabupaten Solok tertangani sebanyak 677 unit. Sedangkan untuk tercapainya sub kegiatan RTLH ini, didukung dengan program pusat yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



Survei dan konsultasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 2023

- b. Penyelenggaraan PSU Perumahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, baik, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan perumahan dan

Kawasan permukiman. Pada Tahun 2023 ada 6 Lokasi Perumahan yang dilaksanakan pembangunan PSU pada bagian Jalan.



Survei Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), 2023

3. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- b. Pengawasan Terhadap Ketaatan Perusahaan / Pelaku Usaha misalnya pembuangan limbah.
- c. Pemberian Penghargaan sekolah Adiwiyata adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah (GPBLHS) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah Lingkungan Hidup (PRLH) adalah sikap dan Tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.
- d. Melakukan Pengujian Sample air/ sungai di Kabupaten Solok secara berkala.
- e. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
- f. Pengurangan Sampah dari sumbernya melalui bank sampah.



2.3 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Solok Tahun 2023 diperoleh berdasarkan data yang bersumber dari Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.1127/PPKL/SETPPKL/REN.0/B/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 Perihal : Penyampaian hasil nilai IKLH Tahun 2023 (Terlampir).

Nilai IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH merupakan agregasi dari perhitungan data pemantauan Lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan Rumus sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Adapun angka perolehan nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Nilai IKLH, IKU, IKA, IKL Tahun 2023

IKLH	IKA	IKU	IKL
------	-----	-----	-----

75,71	59,41	89,96	77,34
-------	-------	-------	-------

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Solok adalah 70,70 dapat dilihat pada Tabel 3.3.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.3.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,70

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.3.3 sebagai berikut:

Tabel. 3.3.3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,70	75,71	107,86

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 3.3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 70,70 dan terealisasi nilai 75,71 dengan capaian kinerja sebesar 107,86.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.3.4
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,36	73,94	73,02	75,71	100,45	105,18	103,57	107,86	71,60	105,74

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 3.3.4 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,29%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Infrastruktur Daerah telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.3.5

Efisiensi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu	Realisasi	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,70	75,71	107,86	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	137.159.000	134.877.400	98,34
Rata-rata capaian			107,86	Total Anggaran	137.159.000	134.877.400	98,34
Tingkat Efisiensi 1,66							

Pada Indikator IKLH Daerah di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 1,66% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.159.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.877.400.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian IKLH Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa izin lingkungan atau Amdal sebagai salah satu syarat pengurusan izin usaha. Selain itu juga diterbitkan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Solok, yang baik secara langsung dan tidak langsung sangat berperan dalam menentukan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok, sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Solok Tahun 2018 – 2025.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 135 – 2017, tentang Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penunjukan Tim Mediator Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok.

- Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 464 – 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok .
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-096-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah di Kabupaten Solok Tahun 2021.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-095-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Solok Tahun 2021.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-323-2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-196-2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-488-2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia.
- b. Pelaksanaan fasilitasi data dan peralatan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memadai terutama terkait data IKA, IKU dan IKL. Peralatan yang difasilitasi oleh Kementerian LHK adalah alat pengukuran udara yaitu passive sampler yang nantinya hasil pengukuran menjadi data Indeks Kualitas Udara Kabupaten.
- c. Terlaksananya koordinasi antar lembaga pengawas lingkungan hidup dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder lainnya mulai dari masyarakat hingga pengusaha. Seperti akan adanya pengaduan dari masyarakat ke DLH Kabupaten Solok apabila adanya pelaku usaha yang mencemari lingkungan
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Fungsi pengawasan mempunyai peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan dan pencemaran akibat aktivitas yang dilakukan. Seperti Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia karena perusahaan mencemari lingkungan sehingga terganggunya kualitas sungai.
- e. Peningkatan penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat seperti adanya pengembangan budidaya maggot dan pengelolaan bank sampah di beberapa nagari. Untuk Tahun 2023 Nagari yang aktif mengembangkan budidaya maggot adalah:
1. Sampah Tanjung Alai
 2. Bank Sampah Singkarak,
 3. Bank Sampah Pesantren Darussalam ,Sumani
 4. Bank Sampah Pesantren Druittauhid Selayo
 5. Bank Sampah Peninggahan
 6. Bank Sampah Perambahan

- f. Pemberian Penghargaan sekolah Adiwiyata adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah (GPBLHS) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah Lingkungan Hidup (PRLH) adalah sikap dan Tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.
- g. Melakukan Pengujian Sample air/ sungai di Kabupaten Solok secara berkala.



Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

2.4 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, baik semester, tahunan, maupun triwulanan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkat maupun menurun dari periode sebelumnya, yang dapat diketahui melalui beberapa indikator. Dalam hal ini, terdapat empat komponen atau indikator pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan, yakni pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat pengangguran. Untuk mengukur indikator laju pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah indikator laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok adalah 4,47% dapat dilihat pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.4.1
Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,47

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.4.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.4.2
Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,47	4,36	97,54

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.4.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,47% dan terealisasi sebesar 4,36% dengan capaian kinerja sebesar 97,54 %.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

Tabel. 3.4.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,12	3,32	4,31	4,36	0	123,42	135,53	97,54	5,05%	86,34%

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.4.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 37,99%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Infrastruktur Daerah belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.4.4
Efisiensi Indikator Pertumbuhan Ekonomi

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pertumbuhan Ekonomi	4,47	4,36	97,54	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.065.700.712	4.696.598.782	92,71
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.186.599.409	11.992.816.171	98,41
				Pengendalian dan	266.113.954	221.506.436	83,24

				Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a			
				Program Penyuluhan Pertanian	1.563.597.200	1.427.250.175	91,28
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734	800.788.532	72,74
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	874.705.185	802.168.660	91,71
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	248.510.852	237.317.188	95,50
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.327.340	180.526.352	84,62
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	331.504.172	318.101.046	95,96
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.771.570	17.385.000	97,82
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.499.636.606	4.363.701.091	96,98
				Program Pengawasan dan	29.091.112	28.310.110	97,32

				Pemeriksaan Koperasi			
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	60.518.970	60.495.594	99,96
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	447.447.000	442.334.050	98,86
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	21.500.000	20.549.760	95,58
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	736.255.308	629.896.293	85,55
				Program Pengembangan UMKM	1.014.017.726	1.006.413.708	99,25
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.920.533.881	1.861.925.488	96,95
				Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.957.755	50.325.960	96,86
				Program Pengembangan Ekspor	71.668.076	66.129.679	92,27
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	57.227.554	47.021.531	82,17
				Program Penggunaan dan	107.224.900	106.962.300	99,76

				Pemasaran Produk Dalam Negeri			
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.209.119.294	1.816.765.589	82,24
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.055.410	4.800.150	59,59
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.082.296	56.417.291	93,90
				Program Promosi Penanaman Modal	105.584.475	101.237.532	95,88
				Program Pelayanan Penanaman Modal	319.865.436	285.444.514	89,23
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	480.000.000	374.552.260	78,03
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.294.420	12.129.150	79,30
			97,54	Total Anggaran	34.083.784.347	32.029.870.392	93,97
Rata-rata capaian							

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani sebanyak 298 unit untuk mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian berupa power thresher sebanyak 11 unit, handtraktor 5 unit, pompa air 2 unit, handsprayer 5 unit, traktor roda empat dan kendaraan roda tiga 1 unit, dan lain-lain.



Penyerahan bantuan alsintan untuk kelompok tani oleh Bupati Solok

- b. Kegiatan Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Bukit Sundi dan X Koto Singkarak.



Pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan P2L di KWT rumah gadang sejahtera nagari Selayo Kecamatan Kubung

- c. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi markisah melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas markisah.



Pemanfaatan tiang beton bertulang untuk budidaya markisah

- d. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi kopi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas berupa bibit kopi arabika sebanyak 5.000 batang dan pupuk kompos serta bibit kulit manis sebanyak 3.750 batang dan pupuk kompos untuk kelompok tani di Kec. Tigo Lurah.



Kegiatan pengembangan kulit manis



Kegiatan pengembangan Kopi Arabika

- e. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani.



Kegiatan pembibitan hortikultura di Aripian dan Penyerahan bibit ke kelompok tani.

- f. Kegiatan Pengembangan bawang merah seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa benih bawang merah bersertifikat.



Kegiatan pengembangan bawang merah

- g. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 5 Ha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi cabe merah.
- h. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 9020 kg. Pada Tahun 2023 telah di salurkan bantuan benih padi sebanyak 12.315 Kg atau sebanyak 2.463 kantong benih isi 5 Kg atau setara dengan kebutuhan benih seluas 492,6 Ha yang dari pengadaan benih di Tahun 2023 sebanyak 9.020 Kg dan Oupkup Gabah Kering Panen(GKP) dari kelompok tani penangkar tahun 2022 yang telah diproses menjadi benih padi berlabel sebanyak 3.295 Kg.



Penyerahan bantuan benih padi berlabel ke kelompok tani

- i. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok. Pemurnian varietas bertujuan untuk mempertahankan keberadaan varietas padi di Kabupaten Solok yang telah dilepas Kementerian Pertanian Ri diantaranya :
 - Caredek Merah di lepas tahun 2012
 - Siarang di lepas tahun 2015
 - Harum Solok di lepas tahun 2017

Kondisi ditahun 2023, masing varietas tidak dapat dikembangkan karena terputusnya galur benih sehingga untuk menghasilkan benih sumber dari masing masing varietas tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya benih inti (nucleus seed). Dengan adanya pemurnian padi caredek merah dan harum solok diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan benih sebar yang

dapat digunakan oleh petani sehingga dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok.



Kegiatan pemurnian varitas caredek merah dan padi harum solok

- j. Pengembangan ubi jalar seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ubi jalar.
- k. Kegiatan penyediaan semen beku, dan N₂ cair untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran pada ternak sapi.



Kegiatan fasilitasi N₂ cair untuk pelayanan IB pada ternak

- l. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 33 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Irigasi Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putuih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

- m. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 3 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanian dan produktifitas.



Kegiatan pembangunan dan parit di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai lasi

- n. Membangun jalan usaha pertanian sebanyak 67 unit dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



Kegiatan Pengerasan jalan usaha tani di nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak

- o. Penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) pada hewan berkuku genap (sapi, kerbau, kambing) dan kasus Avian Influenza (AI) di Kabupaten Solok untuk mengurangi resiko kerugian akibat kematian ternak.



Kegiatan vaksinasi PMK

- p. Pengendalian OPT dengan memfasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berupa hama, penyakit, dan gulma, merupakan faktor pengganggu dalam budidaya tanaman, oleh karena itu perlu dikendalikan agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal. fasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani bertujuan untuk mengatasi serangan hama tikus pada padi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi.



Bantuan Sarana Pengendali OPT Padi Mendukung Kegiatan Gerdal OPT Tikus di Nagari Kinari

- q. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 5 unit, bantuan pupuk hayati cair (MPW) 30.120 botol, pestisida nabati 102.000 sachet dan pupuk hayati cair 1.600 botol yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian.



Pembangunan UPPO di Kec. Gunung Talang

- r. Kegiatan untuk peningkatan produksi buah dan florikultura dengan fasilitasi screen house tanaman hias daun seluas 200 m2 dan sarana pengembangan kawasan durian seluas 30 Ha.



Kegiatan pembangunan screenhouse di nagari Batang baru Kec. Gunung Talang



Kegiatan kampung durian di Kec. Bukit Sundi

- s. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan membangun prasarana pasca panen hortikultura dan pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan dengan membangun solar dryer dome 1 unit serta pembangunan gedung pengolahan kopi 1 unit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani



Kegiatan pemasaran hasil hortikultura di kelompok tani Muaro Danau Diatas



Bangunan solar dryer dome di kelompok tani sukamaju nagari Sirukam kec. Payung Sekaki



Bangunan gedung pengolahan kopi di kelompok tani pasak bumi nagari Panyakalan kec. Kubung

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- Pekerjaan pembuatan kolam terpal diameter 2 meter (APBD) yang berlokasi di Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih Kab.Solok. Pengerjaan kolam terpal dilakukan oleh Pihak Penyedia. Kolam yang dibuat berjumlah 10 (sepuluh) buah untuk Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai.



Pembuatan Kolam Terpal di Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai

- Pendampingan dilakukan Bidang Perikanan Budidaya terhadap Tim BPBAT Provinsi Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani. Pendampingan bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol Hatchery Mini Ikan Lokal. Hatchery adalah bangunan yang digunakan untuk pembenihan ikan, dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Ikan lokal yang digunakan adalah ikan bilih.



Pendampingan Tim BPBAT Prov. Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani

- Penyerahan bantuan benih ikan merupakan wujud dari Kegiatan Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Bantuan benih ikan yang diserahkan berupa Benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan mas. Benih diserahkan ke kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Benih ikan lele 6 kelompok, benih ikan lele 3 kelompok dan benih ikan mas 3 kelompok.



Penyerahan Bantuan Benih ke Kelompok

- Pembelian pakan ikan untuk UPT Balai Benih Ikan berada pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Pakan. Jenis pakan yang di pakai yaitu spesifikasi 781, 781-1, 781-2, PF0, PF100 dan PF500.



Serah terima pakan BBI

- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok. Pelatihan diikuti oleh 20 Peserta yang berasal dari Kelompok Perikanan di Kabupaten Solok. Kegiatan Pelatihan CBIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembudidaya ikan dalam berbudidaya ikan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ideal.



Pelatihan CBIB Tahun 2023

- Pembinaan kelompok nelayan/pokmaswas dilakukan berupa Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang bertempat di Instalasi Konservasi Jenis Ikan Perairan Umum Danau Singkarak



Pembinaan Kelompok Nelayan/Pokmaswas

- Pemberian bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa benih Ikan Gariang sebanyak 40.000 ekor yang diserahkan ke Pokmaswas Sumber Rezeki, Pokmaswas Jorong Sungai Lasi dan Pokmaswas Ulu Sungai Indarung.



Kegiatan Restocking Ikan

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24 Poklahsar tetapi 3 Poklahsar sudah tidak aktif lagi sejak Tahun 2022 yaitu Poklahsar Bukit Merindu, Poklahsar Hijau Muda dan Poklahsar Mina Mandiri sehingga tersisa 21 Poklahsar yang melakukan pengolahan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan



Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 : Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan harapan para pengawas (BP) Koperasi mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan kertas kerja di Koperasi masing-masing, apakah masuk kriteria sehat, kurang sehat atau dalam pengawasan.



- b. Penilaian terhadap Laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/ USP) : Penilaian terhadap laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/USP Koperasi) dalam menilai dan mengevaluasi kesehatan usaha simpan pinjam



- e. Bimtek Pendirian dan Legalitasi Koperasi di Kabupaten Solok terhadap 25 orang peserta yang terdiri dari unsur pengurus pra koperasi (Koperasi yang belum mempunyai legalitas/Badan Hukum) dan Unsur dari Kelompok-kelompok usaha di tengah masyarakat yang berkeinginan membentuk sebuah Koperasi.



- f. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM



- g. Pelatihan Wirausaha Baru bagi 33 orang pelaku usaha (penjahit) di Kabupaten Solok tentang cara memproduksi tas sekolah yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Agustus 2023



h. Pelatihan Olahan Makanan (Olahan Singkong) bagi UMKM



i. Penyerahan Bantuan Peralatan ATBM bagi IKM Tenun



j. Pelaksanaan Operasi Pasar



- k. Bazar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Solok ke-110



4. Urusan Pariwisata

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pelaksanaan Pendampingan bagi Pengelola Desa Wisata pada ADWI 2023
 - Sosialisasi Penguatan Desa Wisata dalam Peningkatan Peran Serta
 - Pelatihan Pengelolaan Homestay di Desa Wisata
 - Pelatihan Dasar Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu
 - Pelatihan Dasar Membuat batik bagi pelaku Ekraf di Desa Wisata di Kecamatan Gunung Talang
- b. Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan Destinasi Wisata Unggulan
 - Pembangunan Rehab Pos Jaga dan Restribusi
 - Rehab Villa Alahan Panjang Resort
 - Pembangunan Miniatur Ka'bah
 - Pengadaan Panggung Seni / Amphiteater
- c. Melakukan Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan menyusun kalender event sebanyak 38 (tiga puluh delapan) event.

- Terfasilitasinya event nagari sebanyak 5 (lima) buah event yaitu
 - Event Alek Nagari Sirukam pada tanggal 5 Februari 2023
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang pada tanggal 26 s.d 29 April 2023.
 - Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 2023.
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Dalam Maupun Luar Negeri.

5. Urusan Ivestasi

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadin Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanagan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang teritegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.



Pelayanan perizinan dan non perizinan

2.5 PDRB PERKAPITA (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah harga tahun 2010. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar harga Konstan dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu.

- A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target PDRB Perkapita (ADHK) di Kabupaten Solok adalah Rp. 27.480.000 dapat dilihat pada Tabel 3.5.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.5.1
PDRB Perkapita (ADHK) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB Perkapita (ADHK)	27.480.000

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Perkapita (ADHK) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.5.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.5.2
PDRB Perkapita (ADHK) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Perkapita (ADHK)	27.480.000	27.155.120	98,82

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.5.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target PDRB Perkapita (ADHK) sebesar Rp. 27.480.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.155.120 dengan capaian kinerja sebesar 98,82%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.5.3
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHK)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian
1.	PDRB Perkapita (ADHK)	25.019.604	25.669.585	26.526.660	27.155.120	96,49	98,99	99,99	98,82	30.970.000	87,68

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.5.3 dapat dilihat bahwa capaian Realisasi PDRB Perkapita (ADHK) tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,17%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Realisasi PDRB Perkapita (ADHK) belum tercapai

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.5.4
Efisiensi Indikator PDRB Perkapita (ADHK)

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PDRB Perkapita (ADHK)	27.480.000	27.155.120	98,82	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.065.700.712	4.696.598.782	92,71
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.186.599.409	11.992.816.171	98,41
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954	221.506.436	83,24
				Program Penyuluhan Pertanian	1.563.597.200	1.427.250.175	91,28
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734	800.788.532	72,74
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	874.705.185	802.168.660	91,71
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	248.510.852	237.317.188	95,50
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.327.340	180.526.352	84,62
				Program Peningkatan Diversifikasi	331.504.172	318.101.046	95,96

				Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.771.570	17.385.000	97,82
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.499.636.606	4.363.701.091	96,98
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29.091.112	28.310.110	97,32
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	60.518.970	60.495.594	99,96
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	447.447.000	442.334.050	98,86
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	21.500.000	20.549.760	95,58
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	736.255.308	629.896.293	85,55
				Program Pengembangan UMKM	1.014.017.726	1.006.413.708	99,25
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.920.533.881	1.861.925.488	96,95

				Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.957.755	50.325.960	96,86
				Program Pengembangan Ekspor	71.668.076	66.129.679	92,27
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	57.227.554	47.021.531	82,17
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107.224.900	106.962.300	99,76
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.209.119.294	1.816.765.589	82,24
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.055.410	4.800.150	59,59
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.082.296	56.417.291	93,90
				Program Promosi Penanaman Modal	105.584.475	101.237.532	95,88
				Program Pelayanan Penanaman Modal	319.865.436	285.444.514	89,23
				Program Pengendalian Pelaksanaan	480.000.000	374.552.260	78,03

				Penanaman Modal			
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.294.420	12.129.150	79,30
Rata-rata capaian			98,82	Total Anggaran	34.083.784.347	32.029.870.392	93,97

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian PDRB Perkapita (ADHK) di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani sebanyak 298 unit untuk mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian berupa power thresher sebanyak 11 unit, handtraktor 5 unit, pompa air 2 unit, handsprayer 5 unit, traktor roda empat dan kendaraan roda tiga 1 unit, dan lain-lain.



Penyerahan bantuan alsintan untuk kelompok tani oleh Bupati Solok

- b. Kegiatan Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Bukit Sundi dan X Koto Singkarak.



Pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan P2L di KWT rumah gadang sejahtera nagari Selayo Kecamatan Kubung

- c. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi markisah melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas markisah.



Pemanfaatan tiang beton bertulang untuk budidaya markisah

- d. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi kopi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas berupa bibit kopi arabika sebanyak 5.000 batang dan pupuk kompos serta bibit kulit manis sebanyak 3.750 batang dan pupuk kompos untuk kelompok tani di Kec. Tigo Lurah.



Kegiatan pengembangan kulit manis



Kegiatan pengembangan Kopi Arabika

- e. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani.



Kegiatan pembibitan hortikultura di Aripan dan Penyerahan bibit ke kelompok tani.

- f. Kegiatan Pengembangan bawang merah seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa benih bawang merah bersertifikat.



Kegiatan pengembangan bawang merah

- g. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 5 Ha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi cabe merah.
- h. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 9020 kg. Pada Tahun 2023 telah di salurkan bantuan benih padi sebanyak 12.315 Kg atau sebanyak 2.463 kantong benih isi 5 Kg atau setara dengan kebutuhan benih seluas 492,6 Ha yang dari pengadaan benih di Tahun 2023 sebanyak 9.020 Kg dan Oupkup Gabah Kering Panen(GKP) dari kelompok tani penangkar tahun 2022 yang telah diproses menjadi benih padi berlabel sebanyak 3.295 Kg.



Penyerahan bantuan benih padi berlabel ke kelompok tani

i. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok. Pemurnian varietas bertujuan untuk mempertahankan keberadaan varietas padi di Kabupaten Solok yang telah dilepas Kementerian Pertanian Ri diantaranya :

- Caredek Merah di lepas tahun 2012
- Siarang di lepas tahun 2015
- Harum Solok di lepas tahun 2017

Kondisi ditahun 2023, masing varietas tidak dapat dikembangkan karena terputusnya galur benih sehingga untuk menghasilkan benih sumber dari masing masing varietas tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya benih inti (nucleus seed). Dengan adanya pemurnian padi caredek merah dan harum solok diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan benih sebar yang dapat digunakan oleh petani sehingga dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok.



Kegiatan pemurnian varitas caredek merah dan padi harum solok

- j. Pengembangan ubi jalar seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ubi jalar.
- k. Kegiatan penyediaan semen beku, dan N2 cair untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran pada ternak sapi.



Kegiatan fasilitasi N2 cair untuk pelayanan IB pada ternak

- l. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 33 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Irigasi Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putuih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

- m. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 3 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan pembangunan dan parit di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Iasi

- n. Membangun jalan usaha pertanian sebanyak 67 unit dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



Kegiatan Pengerasan jalan usaha tani di nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak

- o. Penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) pada hewan berkuku genap (sapi, kerbau, kambing) dan kasus Avian Influenza (AI) di Kabupaten Solok untuk mengurangi resiko kerugian akibat kematian ternak.



Kegiatan vaksinasi PMK

- p. Pengendalian OPT dengan memfasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berupa hama, penyakit, dan gulma, merupakan faktor pengganggu dalam budidaya tanaman, oleh karena itu perlu dikendalikan agar pertumbuhan dan

perkembangan tanaman baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal. fasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani bertujuan untuk mengatasi serangan hama tikus pada padi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi.



Bantuan Sarana Pengendali OPT Padi Mendukung Kegiatan Gerdal OPT Tikus di Nagari Kinari

- q. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 5 unit, bantuan pupuk hayati cair (MPW) 30.120 botol, pestisida nabati 102.000 sachet dan pupuk hayati cair 1.600 botol yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian.



Pembangunan UPPO di Kec. Gunung Talang

- r. Kegiatan untuk peningkatan produksi buah dan florikultura dengan fasilitasi screen house tanaman hias daun seluas 200 m2 dan sarana pengembangan kawasan durian seluas 30 Ha.



Kegiatan kampung durian di Kec. Bukit Sundi

Kegiatan pembangunan screenhouse di nagari Batang barus Kec. Gunung Talang

- s. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan membangun prasarana pasca panen hortikultura dan pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan dengan membangun solar dryer dome 1 unit serta pembangunan gedung pengolahan kopi 1 unit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani



Kegiatan pemasaran hasil hortikultura di kelompok tani Muaro Danau Diatas



Bangunan solar dryer dome di kelompok tani sukamaju nagari Sirukam kec. Payung Sekaki



Bangunan gedung pengolahan kopi di kelompok tani pasak bumi nagari Penyakalan kec. Kubung

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- Pekerjaan pembuatan kolam terpal diameter 2 meter (APBD) yang berlokasi di Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih Kab.Solok. Pengerjaan kolam terpal dilakukan oleh Pihak Penyedia. Kolam yang dibuat berjumlah 10 (sepuluh) buah untuk Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai.



Pembuatan Kolam Terpal di Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai

- Pendampingan dilakukan Bidang Perikanan Budidaya terhadap Tim BPBAT Provinsi Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani. Pendampingan bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol Hatchery Mini Ikan Lokal. Hatchery adalah bangunan yang digunakan untuk pembenihan ikan, dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Ikan lokal yang digunakan adalah ikan bilih.



Pendampingan Tim BPBAT Prov. Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani

- Penyerahan bantuan benih ikan merupakan wujud dari Kegiatan Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Bantuan benih ikan yang diserahkan berupa Benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan mas. Benih diserahkan ke kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Benih ikan lele 6 kelompok, benih ikan lele 3 kelompok dan benih ikan mas 3 kelompok.



Penyerahan Bantuan Benih ke Kelompok

- Pembelian pakan ikan untuk UPT Balai Benih Ikan berada pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Pakan. Jenis pakan yang di pakai yaitu spesifikasi 781, 781-1, 781-2, PF0, PF100 dan PF500.



Serah terima pakan BBI

- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok. Pelatihan diikuti oleh 20 Peserta yang berasal dari Kelompok Perikanan di Kabupaten Solok. Kegiatan Pelatihan CBIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembudidaya ikan dalam berbudidaya ikan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ideal.



Pelatihan CBIB Tahun 2023

- Pembinaan kelompok nelayan/pokmaswas dilakukan berupa Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang bertempat di Instalasi Konservasi Jenis Ikan Perairan Umum Danau Singkarak



Pembinaan Kelompok Nelayan/Pokmaswas

- Pemberian bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa benih Ikan Gariang sebanyak 40.000 ekor yang diserahkan ke Pokmaswas Sumber Rezeki, Pokmaswas Jorong Sungai Lasi dan Pokmaswas Ulu Sungai Indarung.



Kegiatan Restocking Ikan

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24 Poklahsar tetapi 3 Poklahsar sudah tidak aktif lagi sejak Tahun 2022 yaitu Poklahsar Bukit Merindu, Poklahsar Hijau Muda dan Poklahsar Mina

Mandiri sehingga tersisa 21 Poklahsar yang melakukan pengolahan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan



Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

- a. Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 : Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan harapan para pengawas (BP) Koperasi mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan kertas kerja di Koperasi masing-masing, apakah masuk kriteria sehat, kurang sehat atau dalam pengawasan.



- b. Penilaian terhadap Laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/ USP) : Penilaian terhadap laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/USP Koperasi) dalam menilai dan mengevaluasi kesehatan usaha simpan pinjam

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/KEHIDUPAN	PERKOTONGAN	Rasio (%)	NILAI RENDAH	SKOR %	SKOR
34	KELOMPOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN	1. Perolehan Perolehan: 4. Mula: 100000000 2. Total aset: 100000000 3. Total aset: 100000000	1. Perolehan Perolehan: 4. Mula: 100000000 2. Total aset: 100000000 3. Total aset: 100000000	100%	100	100	100
KATEGORI TINGKAT KESEHATAN 1. 100,00 - 100 2. 75,00 - 75,00 3. 50,00 - 50,00 4. 0 - 50,00							

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/KEHIDUPAN	PERKOTONGAN	Rasio (%)	NILAI RENDAH	SKOR %	SKOR
1	1. Perolehan Perolehan	100000000	100000000	100%	100	100	100
2	2. Total aset	100000000	100000000	100%	100	100	100
3	3. Total aset	100000000	100000000	100%	100	100	100
KATEGORI TINGKAT KESEHATAN 1. 100,00 - 100 2. 75,00 - 75,00 3. 50,00 - 50,00 4. 0 - 50,00							

- c. Pelatihan Penerapan SOP bagi Pengurus Koperasi di Kabupaten Solok yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam pembuatan atau menyusun Draft Anggaran Rumah Tangga yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 17 Maret 2023 kepada 33 orang pengurus Koperasi.



- d. Pelatihan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bagi Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam penerapan Permenkop UKM RI No 09 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi kepada Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi di masing-masing Koperasi yang dilaksanakan tanggal 10 s/d 12 Mei 2023



- e. Bimtek Pendirian dan Legalisasi Koperasi di Kabupaten Solok terhadap 25 orang peserta yang terdiri dari unsur pengurus pra koperasi (Koperasi yang belum mempunyai legalitas/Badan Hukum) dan Unsur dari Kelompok-kelompok usaha di tengah masyarakat yang berkeinginan membentuk sebuah Koperasi.



- f. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM



- g. Pelatihan Wirausaha Baru bagi 33 orang pelaku usaha (penjahit) di Kabupaten Solok tentang cara memproduksi tas sekolah yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Agustus 2023



h. Pelatihan Olahan Makanan (Olahan Singkong) bagi UMKM



i. Penyerahan Bantuan Peralatan ATBM bagi IKM Tenun



j. Pelaksanaan Operasi Pasar



- k. Bazar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Solok ke-110



4. Urusan Pariwisata

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pelaksanaan Pendampingan bagi Pengelola Desa Wisata pada ADWI 2023
 - Sosialisasi Penguatan Desa Wisata dalam Peningkatan Peran Serta
 - Pelatihan Pengelolaan Homestay di Desa Wisata
 - Pelatihan Dasar Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu
 - Pelatihan Dasar Membuat batik bagi pelaku Ekraf di Desa Wisata di Kecamatan Gunung Talang
- b. Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan Destinasi Wisata Unggulan
 - Pembangunan Rehab Pos Jaga dan Restribusi
 - Rehab Villa Alahan Panjang Resort
 - Pembangunan Miniatur Ka'bah
 - Pengadaan Panggung Seni / Amphiteater
- c. Melakukan Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan menyusun kalender event sebanyak 38 (tiga puluh delapan) event.

- Terfasilitasinya event nagari sebanyak 5 (lima) buah event yaitu
 - Event Alek Nagari Sirukam pada tanggal 5 Februari 2023
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang pada tanggal 26 s.d 29 April 2023.
 - Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 2023.
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Dalam Maupun Luar Negeri.

5. Urusan Ivestasi

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadin Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanagan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang teritegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.



Pelayanan perizinan dan non perizinan

2.6 PDRB PERKAPITA (ADHB)

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target PDRB Perkapita (ADHB) di Kabupaten Solok adalah Rp. 41.010.000 dapat dilihat pada Tabel 3.6.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.6.1
PDRB Perkapita (ADHB) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB Perkapita (ADHB)	41.010.000

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.6.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.6.2
PDRB Perkapita (ADHB) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Perkapita (ADHB)	41.010.000	42.717.020	104,16

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan Tabel. 3.6.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target PDRB Perkapita (ADHB) sebesar Rp. 41.010.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.717.020 dengan capaian kinerja sebesar 104,16.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.6.3
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	PDRB Perkapita (ADHB)	34.540.954	35.715.343	39.668.150	42.717.020	109,55	96,27	101,69	104,16	48.530.000	88,02

Sumber: . Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 3.6.3 dapat dilihat bahwa capaian PDRB Perkapita (ADHB) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 2,47%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, PDRB Perkapita (ADHB) belum tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.6.4
Efisiensi Indikator PDRB Perkapita (ADHB)

IKU	Kinerja		Keuangan
-----	---------	--	----------

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PDRB Perkapita (ADHB)	41.010.000	42.717.020	104,16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.065.700.712	4.696.598.782	92,71
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.186.599.409	11.992.816.171	98,41
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954	221.506.436	83,24
				Program Penyuluhan Pertanian	1.563.597.200	1.427.250.175	91,28
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734	800.788.532	72,74
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	874.705.185	802.168.660	91,71
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	248.510.852	237.317.188	95,50
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.327.340	180.526.352	84,62
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	331.504.172	318.101.046	95,96

			Pangan Masyarakat			
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.771.570	17.385.000	97,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.499.636.606	4.363.701.091	96,98
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29.091.112	28.310.110	97,32
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	60.518.970	60.495.594	99,96
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	447.447.000	442.334.050	98,86
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	21.500.000	20.549.760	95,58
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	736.255.308	629.896.293	85,55
			Program Pengembangan UMKM	1.014.017.726	1.006.413.708	99,25
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.920.533.881	1.861.925.488	96,95

				Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.957.755	50.325.960	96,86
				Program Pengembangan Ekspor	71.668.076	66.129.679	92,27
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	57.227.554	47.021.531	82,17
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107.224.900	106.962.300	99,76
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.209.119.294	1.816.765.589	82,24
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.055.410	4.800.150	59,59
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60,082,296	56,417,291	93.90
				Program Promosi Penanaman Modal	105,584,475	101,237,532	95.88
				Program Pelayanan Penanaman Modal	319,865,436	285,444,514	89.23
				Program Pengendalian Pelaksanaan	480,000,000	374,552,260	78.03

				Penanaman Modal			
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15,294,420	12,129,150	79.30
Rata-rata capaian			104,16	Total Anggaran	34.083.784.347	32.029.870.392	93,97
Tingkat Efisiensi 6,03%							

Pada Indikator PDRB Perkapita (ADHB) di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 6,03% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.083.784.347 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.029.870.392.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian PDRB Perkapita (ADHB) di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani sebanyak 298 unit untuk mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian berupa power thresher sebanyak 11 unit, handtraktor 5 unit, pompa air 2 unit, handsprayer 5 unit, traktor roda empat dan kendaraan roda tiga 1 unit, dan lain-lain.



Penyerahan bantuan alsintan untuk kelompok tani oleh Bupati Solok

- b. Kegiatan Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Bukit Sundi dan X Koto Singkarak.



Pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan P2L di KWT rumah gadang sejahtera nagari Selayo Kecamatan Kubung

- c. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi markisah melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas markisah.



Pemanfaatan tiang beton bertulang untuk budidaya markisah

- d. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi kopi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas berupa bibit kopi arabika sebanyak 5.000 batang dan pupuk kompos serta bibit kulit manis sebanyak 3.750 batang dan pupuk kompos untuk kelompok tani di Kec. Tigo Lurah.



Kegiatan pengembangan kulit manis



Kegiatan pengembangan Kopi Arabika

- e. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani.



Kegiatan pembibitan hortikultura di Aripan dan Penyerahan bibit ke kelompok tani.

- f. Kegiatan Pengembangan bawang merah seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa benih bawang merah bersertifikat.



Kegiatan pengembangan bawang merah

- g. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 5 Ha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi cabe merah.
- h. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 9020 kg. Pada Tahun 2023 telah di salurkan bantuan benih padi sebanyak 12.315 Kg atau sebanyak 2.463 kantong benih isi 5 Kg atau setara dengan kebutuhan benih seluas 492,6 Ha yang dari pengadaan benih di Tahun 2023 sebanyak 9.020 Kg dan Oupkup Gabah Kering Panen(GKP) dari kelompok tani penangkar tahun 2022 yang telah diproses menjadi benih padi berlabel sebanyak 3.295 Kg.



Penyerahan bantuan benih padi berlabel ke kelompok tani

i. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok. Pemurnian varietas bertujuan untuk mempertahankan keberadaan varietas padi di Kabupaten Solok yang telah dilepas Kementerian Pertanian Ri diantaranya :

- Caredek Merah di lepas tahun 2012
- Siarang di lepas tahun 2015
- Harum Solok di lepas tahun 2017

Kondisi ditahun 2023, masing varietas tidak dapat dikembangkan karena terputusnya galur benih sehingga untuk menghasilkan benih sumber dari masing masing varietas tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya benih inti (nucleus seed). Dengan adanya pemurnian padi caredek merah dan harum solok diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan benih sebar yang dapat digunakan oleh petani sehingga dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok.



Kegiatan pemurnian varitas caredek merah dan padi harum solok

- j. Pengembangan ubi jalar seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ubi jalar.
- k. Kegiatan penyediaan semen beku, dan N2 cair untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran pada ternak sapi.



Kegiatan fasilitasi N2 cair untuk pelayanan IB pada ternak

- l. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 33 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Irigasi Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putuih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

- m. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 3 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan pembangunan dan parit di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Iasi

- n. Membangun jalan usaha pertanian sebanyak 67 unit dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



Kegiatan Pengerasan jalan usaha tani di nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak

- o. Penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) pada hewan berkuku genap (sapi, kerbau, kambing) dan kasus Avian Influenza (AI) di Kabupaten Solok untuk mengurangi resiko kerugian akibat kematian ternak.



Kegiatan vaksinasi PMK

- p. Pengendalian OPT dengan memfasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berupa hama, penyakit, dan gulma, merupakan faktor pengganggu dalam budidaya tanaman, oleh karena itu perlu dikendalikan agar pertumbuhan dan

perkembangan tanaman baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal. fasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani bertujuan untuk mengatasi serangan hama tikus pada padi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi.



Bantuan Sarana Pengendali OPT Padi Mendukung Kegiatan Gerdal OPT Tikus di Nagari Kinari

- q. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 5 unit, bantuan pupuk hayati cair (MPW) 30.120 botol, pestisida nabati 102.000 sachet dan pupuk hayati cair 1.600 botol yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian.



Pembangunan UPPO di Kec. Gunung Talang

- r. Kegiatan untuk peningkatan produksi buah dan florikultura dengan fasilitasi screen house tanaman hias daun seluas 200 m2 dan sarana pengembangan kawasan durian seluas 30 Ha.



Kegiatan kampung durian di Kec. Bukit Sundi

Kegiatan pembangunan screenhouse
di nagari Batang barus Kec. Gunung
Talang

- s. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan membangun prasarana pasca panen hortikultura dan pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan dengan membangun solar dryer dome 1 unit serta pembangunan gedung pengolahan kopi 1 unit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani



Kegiatan pemasaran hasil hortikultura di kelompok tani Muaro Danau Diatas



Bangunan solar dryer dome di kelompok tani sukamaju nagari Sirukam kec. Payung Sekaki



Bangunan gedung pengolahan kopi di kelompok tani pasak bumi nagari Penyakalan kec. Kubung

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- Pekerjaan pembuatan kolam terpal diameter 2 meter (APBD) yang berlokasi di Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih Kab.Solok. Pengerjaan kolam terpal dilakukan oleh Pihak Penyedia. Kolam yang dibuat berjumlah 10 (sepuluh) buah untuk Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai.



Pembuatan Kolam Terpal di Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai

- Pendampingan dilakukan Bidang Perikanan Budidaya terhadap Tim BPBAT Provinsi Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani. Pendampingan bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol Hatchery Mini Ikan Lokal. Hatchery adalah bangunan yang digunakan untuk pembenihan ikan, dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Ikan lokal yang digunakan adalah ikan bilih.



Pendampingan Tim BPBAT Prov. Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani

- Penyerahan bantuan benih ikan merupakan wujud dari Kegiatan Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Bantuan benih ikan yang diserahkan berupa Benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan mas. Benih diserahkan ke kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Benih ikan lele 6 kelompok, benih ikan lele 3 kelompok dan benih ikan mas 3 kelompok.



Penyerahan Bantuan Benih ke Kelompok

- Pembelian pakan ikan untuk UPT Balai Benih Ikan berada pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Pakan. Jenis pakan yang di pakai yaitu spesifikasi 781, 781-1, 781-2, PF0, PF100 dan PF500.



Serah terima pakan BBI

- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok. Pelatihan diikuti oleh 20 Peserta yang berasal dari Kelompok Perikanan di Kabupaten Solok. Kegiatan Pelatihan CBIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembudidaya ikan dalam berbudidaya ikan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ideal.



Pelatihan CBIB Tahun 2023

- Pembinaan kelompok nelayan/pokmaswas dilakukan berupa Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang bertempat di Instalasi Konservasi Jenis Ikan Perairan Umum Danau Singkarak



Pembinaan Kelompok Nelayan/Pokmaswas

- Pemberian bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa benih Ikan Gariang sebanyak 40.000 ekor yang diserahkan ke Pokmaswas Sumber Rezeki, Pokmaswas Jorong Sungai Lasi dan Pokmaswas Ulu Sungai Indarung.



Kegiatan Restocking Ikan

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24 Poklahsar tetapi 3 Poklahsar sudah tidak aktif lagi sejak Tahun 2022 yaitu Poklahsar Bukit Merindu, Poklahsar Hijau Muda dan Poklahsar Mina

Mandiri sehingga tersisa 21 Poklahsar yang melakukan pengolahan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan



Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

- a. Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 : Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan harapan para pengawas (BP) Koperasi mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan kertas kerja di Koperasi masing-masing, apakah masuk kriteria sehat, kurang sehat atau dalam pengawasan.



- b. Penilaian terhadap Laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/ USP) : Penilaian terhadap laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/USP Koperasi) dalam menilai dan mengevaluasi kesehatan usaha simpan pinjam

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/INDIKATOR	PERKOTONGAN	Rasio (%)	Nilai Riset	Skor	Bobot	Skor
34	KELOMPOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN	1. Misi Perusahaan Anggutan 2. Misi Perusahaan Anggutan 3. Misi Perusahaan Anggutan 4. Misi Perusahaan Anggutan 5. Misi Perusahaan Anggutan 6. Misi Perusahaan Anggutan 7. Misi Perusahaan Anggutan 8. Misi Perusahaan Anggutan 9. Misi Perusahaan Anggutan 10. Misi Perusahaan Anggutan	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	30,30%	2	1	3,00	
KATEGORI TINGKAT KESEHATAN 1. 100,00 - 1,00 2. 90,00 - 75,00 3. 60,00 - 45,00 4. 0 - 30,00								

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/INDIKATOR	PERKOTONGAN	Rasio (%)	Nilai Riset	Skor	Bobot	Skor
35	KELOMPOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN	1. Misi Perusahaan Anggutan 2. Misi Perusahaan Anggutan 3. Misi Perusahaan Anggutan 4. Misi Perusahaan Anggutan 5. Misi Perusahaan Anggutan 6. Misi Perusahaan Anggutan 7. Misi Perusahaan Anggutan 8. Misi Perusahaan Anggutan 9. Misi Perusahaan Anggutan 10. Misi Perusahaan Anggutan	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	30,30%	2	1	3,00	
KATEGORI TINGKAT KESEHATAN 1. 100,00 - 1,00 2. 90,00 - 75,00 3. 60,00 - 45,00 4. 0 - 30,00								

- c. Pelatihan Penerapan SOP bagi Pengurus Koperasi di Kabupaten Solok yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam pembuatan atau menyusun Draft Anggaran Rumah Tangga yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 17 Maret 2023 kepada 33 orang pengurus Koperasi.



- d. Pelatihan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bagi Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam penerapan Permenkop UKM RI No 09 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi kepada Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi di masing-masing Koperasi yang dilaksanakan tanggal 10 s/d 12 Mei 2023



- e. Bimtek Pendirian dan Legalitasi Koperasi di Kabupaten Solok terhadap 25 orang peserta yang terdiri dari unsur pengurus pra koperasi (Koperasi yang belum mempunyai legalitas/Badan Hukum) dan Unsur dari Kelompok-kelompok usaha di tengah masyarakat yang berkeinginan membentuk sebuah Koperasi.



- f. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM



- g. Pelatihan Wirausaha Baru bagi 33 orang pelaku usaha (penjahit) di Kabupaten Solok tentang cara memproduksi tas sekolah yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Agustus 2023



h. Pelatihan Olahan Makanan (Olahan Singkong) bagi UMKM



i. Penyerahan Bantuan Peralatan ATBM bagi IKM Tenun



j. Pelaksanaan Operasi Pasar



- k. Bazar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Solok ke-110



4. Urusan Pariwisata

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pelaksanaan Pendampingan bagi Pengelola Desa Wisata pada ADWI 2023
 - Sosialisasi Penguatan Desa Wisata dalam Peningkatan Peran Serta
 - Pelatihan Pengelolaan Homestay di Desa Wisata
 - Pelatihan Dasar Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu
 - Pelatihan Dasar Membuat batik bagi pelaku Ekraf di Desa Wisata di Kecamatan Gunung Talang
- b. Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan Destinasi Wisata Unggulan
 - Pembangunan Rehab Pos Jaga dan Restribusi
 - Rehab Villa Alahan Panjang Resort
 - Pembangunan Miniatur Ka'bah
 - Pengadaan Panggung Seni / Amphiteater
- c. Melakukan Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan menyusun kalender event sebanyak 38 (tiga puluh delapan) event.

- Terfasilitasinya event nagari sebanyak 5 (lima) buah event yaitu
 - Event Alek Nagari Sirukam pada tanggal 5 Februari 2023
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang pada tanggal 26 s.d 29 April 2023.
 - Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 2023.
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Dalam Maupun Luar Negeri.

5. Urusan Ivestasi

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadin Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanagan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang teritegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.



Pelayanan perizinan dan non perizinan

2.7 PENGELUARAN PERKAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Solok adalah Rp. 10.527.000 dapat dilihat pada Tabel 3.7.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.7.1

Pengeluaran Perkapita Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	Pengeluaran Perkapita	10.527.000

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Pengeluaran Perkapita Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.7.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.7.2
Pengeluaran Perkapita Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengeluaran Perkapita	10.527.000	15.631.812	148,49

Sumber: Solok Dalam Angka, 2024

Berdasarkan Tabel. 3.6.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 10.527.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.631.812 dengan capaian kinerja sebesar 148,89%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.7.3
Perkembangan Pengeluaran Perkapita

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengeluaran Perkapita	10.177.000	10.215.000	10.539.000	15.631.812	NA	99,21	102,35	148,49	11.242.000	139,05

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 3.7.3 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Perkapita tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 46,14%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Pengeluaran Perkapita telah tercapai

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.7.4
Efisiensi Indikator Pengeluaran Perkapita

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			148,49	Program Penyediaan	5.065.700.712	4.696.598.782	92,71

Pengeluaran Perkapita	10.527.000	15.631.812		dan Pengembangan Sarana Pertanian			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.186.599.409	11.992.816.171	98,41
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954	221.506.436	83,24
				Program Penyuluhan Pertanian	1.563.597.200	1.427.250.175	91,28
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734	800.788.532	72,74
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	874.705.185	802.168.660	91,71
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	248.510.852	237.317.188	95,50
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.327.340	180.526.352	84,62
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	331.504.172	318.101.046	95,96
				Program Pengawasan	17.771.570	17.385.000	97,82

				Keamanan Pangan			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.499.636.606	4.363.701.091	96,98
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29.091.112	28.310.110	97,32
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	60.518.970	60.495.594	99,96
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	447.447.000	442.334.050	98,86
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	21.500.000	20.549.760	95,58
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	736.255.308	629.896.293	85,55
				Program Pengembangan UMKM	1.014.017.726	1.006.413.708	99,25
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.920.533.881	1.861.925.488	96,95
				Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan	51.957.755	50.325.960	96,86

				Barang Penting			
				Program Pengembangan Ekspor	71.668.076	66.129.679	92,27
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	57.227.554	47.021.531	82,17
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107.224.900	106.962.300	99,76
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.209.119.294	1.816.765.589	82,24
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.055.410	4.800.150	59,59
Rata-rata capaian			148,49	Total Anggaran	33.102.957.720	31.200.089.645	94,25
Tingkat Efisiensi 5,75							

Pada Indikator Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 5,64% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.102.957.720 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.200.089.645.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani sebanyak 298 unit untuk mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian berupa power thresher sebanyak 11 unit, handtraktor 5 unit, pompa air 2 unit, handsprayer 5 unit, traktor roda empat dan kendaraan roda tiga 1 unit, dan lain-lain.



Penyerahan bantuan alsintan untuk kelompok tani oleh Bupati Solok

- b. Kegiatan Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Bukit Sundi dan X Koto Singkarak.



Pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan P2L di KWT rumah gadang sejahtera nagari Selayo Kecamatan Kubung

- c. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi markisah melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas markisah.



Pemanfaatan tiang beton bertulang untuk budidaya markisah

- d. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi kopi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas berupa bibit kopi arabika sebanyak 5.000 batang dan pupuk kompos serta bibit kulit manis sebanyak 3.750 batang dan pupuk kompos untuk kelompok tani di Kec. Tigo Lurah.



Kegiatan pengembangan kulit manis



Kegiatan pengembangan Kopi Arabika

- e. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani.



Kegiatan pembibitan hortikultura di Aripan dan Penyerahan bibit ke kelompok tani.

- f. Kegiatan Pengembangan bawang merah seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa benih bawang merah bersertifikat.



Kegiatan pengembangan bawang merah

- g. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 5 Ha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi cabe merah.

- h. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 9020 kg. Pada Tahun 2023 telah di salurkan bantuan benih padi sebanyak 12.315 Kg atau sebanyak 2.463 kantong benih isi 5 Kg atau setara dengan kebutuhan benih seluas 492,6 Ha yang dari pengadaan benih di Tahun 2023 sebanyak 9.020 Kg dan Oupkup Gabah Kering Panen(GKP) dari kelompok tani penangkar tahun 2022 yang telah diproses menjadi benih padi berlabel sebanyak 3.295 Kg.



Penyerahan bantuan benih padi berlabel ke kelompok tani

- i. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok. Pemurnian varietas bertujuan untuk mempertahankan keberadaan varietas padi di Kabupaten Solok yang telah dilepas Kementerian Pertanian Ri diantaranya :

- Caredek Merah di lepas tahun 2012
- Siarang di lepas tahun 2015
- Harum Solok di lepas tahun 2017

Kondisi ditahun 2023, masing varietas tidak dapat dikembangkan karena terputusnya galur benih sehingga untuk menghasilkan benih sumber dari masing masing varietas tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya benih inti (nucleus seed). Dengan adanya pemurnian padi caredek merah dan harum solok diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan benih sebar yang dapat digunakan oleh petani sehingga dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok.



Kegiatan pemurnian varitas caredek merah dan padi harum solok

- j. Pengembangan ubi jalar seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ubi jalar.
- k. Kegiatan penyediaan semen beku, dan N2 cair untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran pada ternak sapi.



Kegiatan fasilitasi N2 cair untuk pelayanan IB pada ternak

- l. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 33 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Irigasi Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putuih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

- m. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 3 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanian dan produktifitas.



Kegiatan pembangunan dan parit di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai lasi

- n. Membangun jalan usaha pertanian sebanyak 67 unit dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



Kegiatan Pengerasan jalan usaha tani di nagari Aripah Kec. X Koto Singkarak

- o. Penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) pada hewan berkuku genap (sapi, kerbau, kambing) dan kasus Avian Influenza (AI) di Kabupaten Solok untuk mengurangi resiko kerugian akibat kematian ternak.



Kegiatan vaksinasi PMK

- p. Pengendalian OPT dengan memfasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berupa hama, penyakit, dan gulma, merupakan faktor pengganggu dalam budidaya tanaman, oleh karena itu perlu dikendalikan agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal. fasilitas sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani bertujuan untuk mengatasi serangan hama tikus pada padi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi.



Bantuan Sarana Pengendali OPT Padi Mendukung Kegiatan Gerdal OPT Tikus di Nagari Kinari

- q. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 5 unit, bantuan pupuk hayati cair (MPW) 30.120 botol, pestisida nabati 102.000 sachet dan pupuk hayati cair 1.600 botol yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian.



Pembangunan UPPO di Kec. Gunung Talang

- r. Kegiatan untuk peningkatan produksi buah dan florikultura dengan fasilitasi screen house tanaman hias daun seluas 200 m2 dan sarana pengembangan kawasan durian seluas 30 Ha.



Kegiatan pembangunan screenhouse di nagari Batang baru Kec. Gunung Talang



Kegiatan kampung durian di Kec. Bukit Sundi

- s. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan membangun prasarana pasca panen hortikultura dan pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan dengan membangun solar dryer dome 1 unit serta pembangunan gedung pengolahan kopi 1 unit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani



Kegiatan pemasaran hasil hortikultura di kelompok tani Muaro Danau Diatas



Bangunan solar dryer dome di kelompok tani sukamaju nagari Sirukam kec. Payung Sekaki



Bangunan gedung pengolahan kopi di kelompok tani pasak bumi nagari Panyakalan kec. Kubung

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- Pekerjaan pembuatan kolam terpal diameter 2 meter (APBD) yang berlokasi di Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih Kab.Solok. Pengerjaan kolam terpal dilakukan oleh Pihak Penyedia. Kolam yang dibuat berjumlah 10 (sepuluh) buah untuk Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai.



Pembuatan Kolam Terpal di Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai

- Pendampingan dilakukan Bidang Perikanan Budidaya terhadap Tim BPBAT Provinsi Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani. Pendampingan bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol Hatchery Mini Ikan Lokal. Hatchery adalah bangunan yang digunakan untuk pembenihan ikan, dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Ikan lokal yang digunakan adalah ikan bilih.



Pendampingan Tim BPBAT Prov. Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani

- Penyerahan bantuan benih ikan merupakan wujud dari Kegiatan Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Bantuan benih ikan yang diserahkan berupa Benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan mas. Benih diserahkan ke kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Benih ikan lele 6 kelompok, benih ikan lele 3 kelompok dan benih ikan mas 3 kelompok.



Penyerahan Bantuan Benih ke Kelompok

- Pembelian pakan ikan untuk UPT Balai Benih Ikan berada pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Pakan. Jenis pakan yang di pakai yaitu spesifikasi 781, 781-1, 781-2, PF0, PF100 dan PF500.



Serah terima pakan BBI

- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok. Pelatihan diikuti oleh 20 Peserta yang berasal dari Kelompok Perikanan di Kabupaten Solok. Kegiatan Pelatihan CBIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembudidaya ikan dalam berbudidaya ikan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ideal.



Pelatihan CBIB Tahun 2023

- Pembinaan kelompok nelayan/pokmaswas dilakukan berupa Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang bertempat di Instalasi Konservasi Jenis Ikan Perairan Umum Danau Singkarak



Pembinaan Kelompok Nelayan/Pokmaswas

- Pemberian bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa benih Ikan Gariang sebanyak 40.000 ekor yang diserahkan ke Pokmaswas Sumber Rezeki, Pokmaswas Jorong Sungai Lasi dan Pokmaswas Ulu Sungai Indarung.



Kegiatan Restocking Ikan

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24 Poklahsar tetapi 3 Poklahsar sudah tidak aktif lagi sejak Tahun 2022 yaitu Poklahsar Bukit Merindu, Poklahsar Hijau Muda dan Poklahsar Mina Mandiri sehingga tersisa 21 Poklahsar yang melakukan pengolahan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan



Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

3. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 : Sosialisasi dan penerapan Permenkop UKM RI No 9 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan harapan para pengawas (BP) Koperasi mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan menggunakan kertas kerja di Koperasi masing-masing, apakah masuk kriteria sehat, kurang sehat atau dalam pengawasan.



- b. Penilaian terhadap Laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/ USP) : Penilaian terhadap laporan RAT 20 Unit Koperasi (KSP/USP Koperasi) dalam menilai dan mengevaluasi kesehatan usaha simpan pinjam

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/INDIKATOR	PERKOTONGAN	Nilai (%)	Nilai SEBESAR	BOHONG %	BOHONG															
34	KELOMPOK PENGELOLAAN PERSYARUKAN	1. Mekanisme Pengawasan & Mutasi Anggota-anggota Mekanisme Total Asset No. 1. Total aset = 200.000.000 + 100% = 30.000 No. 2. Total aset = 200.000.000		30,00%	2	1	3,00															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik					
Nilai (%)	Nilai	Kategori																				
100	1	baik																				
75 - 99,9	2	Cukup Baik																				
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																				
25 - 49,9	4	Tidak Baik																				
		2. Kesehatan Jangka Panjang Mekanisme Total Asset No. 1. Kesehatan Jangka Panjang = 20.000.000.000 + 100% = 100% No. 2. Kesehatan = 20.000.000.000		100%	1	1	4,00															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik					
Nilai (%)	Nilai	Kategori																				
100	1	baik																				
75 - 99,9	2	Cukup Baik																				
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																				
25 - 49,9	4	Tidak Baik																				
TINGKAT KESEHATAN				SEHAT	JUMLAH		60,00 2400 212,00															
				70,00 1,00 3,11																		

KATEGORI TINGKAT KESEHATAN	BOHONG
SEHAT	1. 100,00 - 1,00
CUKUP SEHAT	1. 100,00 - 75,00
DALAM PENGAWASAN	1. 50,00 - 65,00
DALAM PENGAWASAN KHUSUS	1. 0 - 50,00

NO	ASPEK YANG DIUKUR	SIKAP/INDIKATOR	PERKOTONGAN	Nilai (%)	Nilai SEBESAR	BOHONG %	BOHONG														
35	KELOMPOK PENGELOLAAN PERSYARUKAN	1. Mekanisme Pengawasan & Mutasi Anggota-anggota Mekanisme Total Asset No. 1. Total aset = 200.000.000 + 100% = 30.000 No. 2. Total aset = 200.000.000		30,00%	1	1,00	4,00														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik				
Nilai (%)	Nilai	Kategori																			
100	1	baik																			
75 - 99,9	2	Cukup Baik																			
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																			
25 - 49,9	4	Tidak Baik																			
		2. Kesehatan Jangka Panjang Mekanisme Total Asset No. 1. Kesehatan Jangka Panjang = 20.000.000.000 + 100% = 100% No. 2. Kesehatan = 20.000.000.000		100%	1	1,00	4,00														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik				
Nilai (%)	Nilai	Kategori																			
100	1	baik																			
75 - 99,9	2	Cukup Baik																			
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																			
25 - 49,9	4	Tidak Baik																			
		3. Kesehatan Jangka Panjang Mekanisme Total Asset No. 1. Kesehatan Jangka Panjang = 20.000.000.000 + 100% = 100% No. 2. Kesehatan = 20.000.000.000		100%	1	1,00	4,00														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik				
Nilai (%)	Nilai	Kategori																			
100	1	baik																			
75 - 99,9	2	Cukup Baik																			
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																			
25 - 49,9	4	Tidak Baik																			
		4. Kesehatan Jangka Panjang Mekanisme Total Asset No. 1. Kesehatan Jangka Panjang = 20.000.000.000 + 100% = 100% No. 2. Kesehatan = 20.000.000.000		100%	1	1,00	4,00														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik				
Nilai (%)	Nilai	Kategori																			
100	1	baik																			
75 - 99,9	2	Cukup Baik																			
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																			
25 - 49,9	4	Tidak Baik																			
		5. Kesehatan Jangka Panjang Mekanisme Total Asset No. 1. Kesehatan Jangka Panjang = 20.000.000.000 + 100% = 100% No. 2. Kesehatan = 20.000.000.000		100%	1	1,00	4,00														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai (%)</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1</td> <td>baik</td> </tr> <tr> <td>75 - 99,9</td> <td>2</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>50 - 74,9</td> <td>3</td> <td>Cukup Buruk</td> </tr> <tr> <td>25 - 49,9</td> <td>4</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai (%)	Nilai	Kategori	100	1	baik	75 - 99,9	2	Cukup Baik	50 - 74,9	3	Cukup Buruk	25 - 49,9	4	Tidak Baik				
Nilai (%)	Nilai	Kategori																			
100	1	baik																			
75 - 99,9	2	Cukup Baik																			
50 - 74,9	3	Cukup Buruk																			
25 - 49,9	4	Tidak Baik																			

- c. Pelatihan Penerapan SOP bagi Pengurus Koperasi di Kabupaten Solok yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam pembuatan atau menyusun Draft Anggaran Rumah Tangga yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 17 Maret 2023 kepada 33 orang pengurus Koperasi.



- d. Pelatihan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bagi Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam penerapan Permenkop UKM RI No 09 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi kepada Badan Pengawas (BP) Koperasi dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi di masing-masing Koperasi yang dilaksanakan tanggal 10 s/d 12 Mei 2023



- e. Bimtek Pendirian dan Legalisasi Koperasi di Kabupaten Solok terhadap 25 orang peserta yang terdiri dari unsur pengurus pra koperasi (Koperasi yang belum mempunyai legalitas/Badan Hukum) dan Unsur dari Kelompok-kelompok usaha di tengah masyarakat yang berkeinginan membentuk sebuah Koperasi.



- f. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku UMKM



- g. Pelatihan Wirausaha Baru bagi 33 orang pelaku usaha (penjahit) di Kabupaten Solok tentang cara memproduksi tas sekolah yang dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Agustus 2023



h. Pelatihan Olahan Makanan (Olahan Singkong) bagi UMKM



i. Penyerahan Bantuan Peralatan ATBM bagi IKM Tenun



j. Pelaksanaan Operasi Pasar



- k. Bazar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Solok ke-110



4. Urusan Pariwisata

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pelaksanaan Pendampingan bagi Pengelola Desa Wisata pada ADWI 2023
 - Sosialisasi Penguatan Desa Wisata dalam Peningkatan Peran Serta
 - Pelatihan Pengelolaan Homestay di Desa Wisata
 - Pelatihan Dasar Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu
 - Pelatihan Dasar Membuat batik bagi pelaku Ekraf di Desa Wisata di Kecamatan Gunung Talang
- b. Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan Destinasi Wisata Unggulan
 - Pembangunan Rehab Pos Jaga dan Restribusi
 - Rehab Villa Alahan Panjang Resort
 - Pembangunan Miniatur Ka'bah
 - Pengadaan Panggung Seni / Amphiteater
- c. Melakukan Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan menyusun kalender event sebanyak 38 (tiga puluh delapan) event.

- Terfasilitasinya event nagari sebanyak 5 (lima) buah event yaitu
 - Event Alek Nagari Sirukam pada tanggal 5 Februari 2023
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 - Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang pada tanggal 26 s.d 29 April 2023.
 - Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 2023.
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Dalam Maupun Luar Negeri.

5. Urusan Ivestasi

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadin Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanagan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang teritegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.



Pelayanan perizinan dan non perizinan

2.8 PDRB SEKTOR PERTANIAN

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB sektor pertanian mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual kepada pihak lain.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target PDRB Sektor pertanian Kabupaten Solok adalah Rp. 3.794.366 dapat dilihat pada Tabel 3.8.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.8.1
PDRB Sektor pertanian Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB Sektor pertanian	3.794.366

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB Sektor pertanian Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.8.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.8.2
PDRB Sektor pertanian Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Sektor pertanian	3.794.366	3.934.390	103,69

Sumber: Kabuapten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.8.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target PDRB Sektor Pertanian sebesar Rp. 3.794.366 dan terealisasi sebesar Rp. 3.934.390 dengan capaian kinerja sebesar 103,69%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.8.3
Perkembangan PDRB Sektor pertanian

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	PDRB Sektor pertanian	3.585.300	3.676.300	3.829.230	3.934.390	95,15	101,6	102,82	103,69	4.004.391	98,25

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 3.8.3 dapat dilihat bahwa capaian PDRB Sektor Pertanian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,87%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, PDRB Sektor Pertanian belum tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.8.4
Efisiensi Indikator PDRB Sektor pertanian

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	3.794.366	3.934.390	103,69	Program Penyedia	5.065.700.712	4.696.598.782	92,71

PDRB Sektor pertanian				an dan Pengembangan Sarana Pertanian			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.186.599.409	11.992.816.171	98,41
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954	221.506.436	83,24
				Program Penyuluhan Pertanian	1.563.597.200	1.427.250.175	91,28
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734	800.788.532	72,74
Rata-rata capaian			103,69	Total Anggaran	20.182.885.009	19.138.960.096	94,83
Tingkat Efisiensi 5,17							

Pada Indikator PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 5,17% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.182.885.009 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.138.960.096,-.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani sebanyak 298 unit untuk mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian berupa power thresher sebanyak 11 unit, handtraktor 5 unit, pompa air 2 unit, handsprayer 5 unit, traktor roda empat dan kendaraan roda tiga 1 unit, dan lain-lain.



Penyerahan bantuan alsintan untuk kelompok tani oleh Bupati Solok

- b. Kegiatan Penumbuhan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 5 kelompok tani di Kecamatan Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Bukit Sundi dan X Koto Singkarak.



Pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan P2L di KWT rumah gadang sejahtera nagari Selayo Kecamatan Kubung

- c. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi markisah melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas markisah.



Pemanfaatan tiang beton bertulang untuk budidaya markisah

- d. Pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produksi kopi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas berupa bibit kopi arabika sebanyak 5.000 batang dan pupuk kompos serta bibit kulit manis sebanyak 3.750 batang dan pupuk kompos untuk kelompok tani di Kec. Tigo Lurah.



Kegiatan pengembangan kulit manis



Kegiatan pengembangan Kopi Arabika

- e. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani.



Kegiatan pembibitan hortikultura di Aripandan dan Penyerahan bibit ke kelompok tani.

- f. Kegiatan Pengembangan bawang merah seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa benih bawang merah bersertifikat.



Kegiatan pengembangan bawang merah

- g. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 5 Ha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi cabe merah.
- h. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan oupkup benih padi berlabel dari kelompok tani penangkar sebanyak 9020 kg. Pada Tahun 2023 telah di salurkan bantuan benih padi sebanyak 12.315 Kg atau sebanyak 2.463 kantong benih isi 5 Kg atau setara dengan kebutuhan benih seluas 492,6 Ha yang dari pengadaan benih di Tahun 2023 sebanyak 9.020 Kg dan Oupkup Gabah Kering Panen(GKP) dari kelompok tani penangkar tahun 2022 yang telah diproses menjadi benih padi berlabel sebanyak 3.295 Kg.



Penyerahan bantuan benih padi berlabel ke kelompok tani

- i. Pemurnian varitas padi lokal yang sudah dilepas yaitu varitas caredek merah dan padi harum solok. Pemurnian varietas bertujuan untuk mempertahankan keberadaan varietas padi di Kabupaten Solok yang telah dilepas Kementerian Pertanian Ri diantaranya :
 - Caredek Merah di lepas tahun 2012
 - Siarang di lepas tahun 2015
 - Harum Solok di lepas tahun 2017

Kondisi ditahun 2023, masing varietas tidak dapat dikembangkan karena terputusnya galur benih sehingga untuk menghasilkan benih sumber dari masing masing varietas tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya benih inti (nucleus seed). Dengan adanya pemurnian padi caredek merah dan harum solok diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan benih sebar yang

dapat digunakan oleh petani sehingga dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Solok.



Kegiatan pemurnian varitas caredek merah dan padi harum solok

- j. Pengembangan ubi jalar seluas 2 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ubi jalar.
- k. Kegiatan penyediaan semen beku, dan N₂ cair untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran pada ternak sapi.



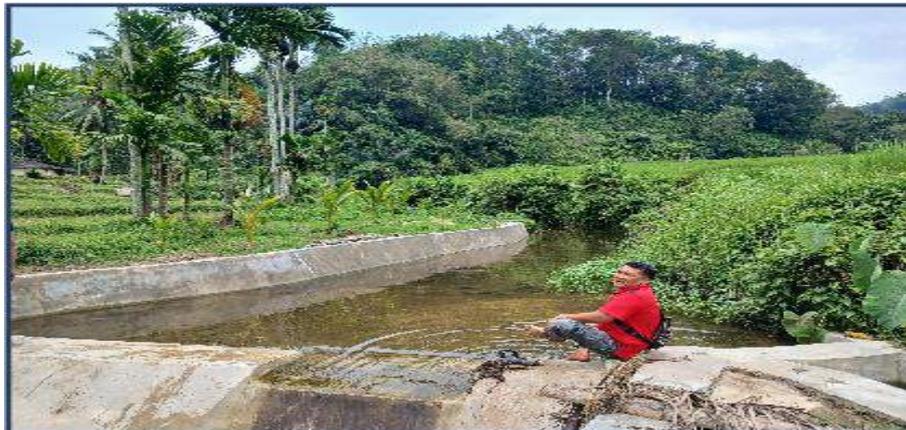
Kegiatan fasilitasi N₂ cair untuk pelayanan IB pada ternak

- l. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 33 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Irigasi Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putuih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi

- m. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun dam parit 3 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.



Kegiatan pembangunan dan parit di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai lasi

- n. Membangun jalan usaha pertanian sebanyak 67 unit dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



Kegiatan Pengerasan jalan usaha tani di nagari Aripah Kec. X Koto Singkarak

- o. Penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) pada hewan berkuku genap (sapi, kerbau, kambing) dan kasus Avian Influenza (AI) di Kabupaten Solok untuk mengurangi resiko kerugian akibat kematian ternak.



Kegiatan vaksinasi PMK

- p. Pengendalian OPT dengan memfasilitasi sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang berupa hama, penyakit, dan gulma, merupakan faktor pengganggu dalam budidaya tanaman, oleh karena itu perlu dikendalikan agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal. fasilitas sarana pengendalian OPT tikus dan pembinaan pada kelompok tani bertujuan untuk mengatasi serangan hama tikus pada padi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi padi.



Bantuan Sarana Pengendali OPT Padi Mendukung Kegiatan Gerdal OPT Tikus di Nagari Kinari

- q. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 5 unit, bantuan pupuk hayati cair (MPW) 30.120 botol, pestisida nabati 102.000 sachet dan pupuk hayati cair 1.600 botol yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian.



Pembangunan UPPO di Kec. Gunung Talang

- r. Kegiatan untuk peningkatan produksi buah dan florikultura dengan fasilitasi screen house tanaman hias daun seluas 200 m2 dan sarana pengembangan kawasan durian seluas 30 Ha.



Kegiatan pembangunan screenhouse di nagari Batang baru Kec. Gunung Talang



Kegiatan kampung durian di Kec. Bukit Sundi

- s. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan membangun prasarana pasca panen hortikultura dan pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan dengan membangun solar dryer dome 1 unit serta pembangunan gedung pengolahan kopi 1 unit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani



Kegiatan pemasaran hasil hortikultura di kelompok tani Muaro Danau Diatas



Bangunan solar dryer dome di kelompok tani sukamaju nagari Sirukam kec. Payung Sekaki



Bangunan gedung pengolahan kopi di kelompok tani pasak bumi nagari Panyakalan kec. Kubung

2. Urusan Perikanan dan Pangan

- Pekerjaan pembuatan kolam terpal diameter 2 meter (APBD) yang berlokasi di Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih Kab.Solok. Pengerjaan kolam terpal dilakukan oleh Pihak Penyedia. Kolam yang dibuat berjumlah 10 (sepuluh) buah untuk Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai.



Pembuatan Kolam Terpal di Pokdakan Anugerah Nagari Muaro Pingai

- Pendampingan dilakukan Bidang Perikanan Budidaya terhadap Tim BPBAT Provinsi Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani. Pendampingan bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol Hatchery Mini Ikan Lokal. Hatchery adalah bangunan yang digunakan untuk pembenihan ikan, dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Ikan lokal yang digunakan adalah ikan bilih.



Pendampingan Tim BPBAT Prov. Jambi ke Pokdakan Bina Putra Mandiri Nagari Koto Sani

- Penyerahan bantuan benih ikan merupakan wujud dari Kegiatan Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Bantuan benih ikan yang diserahkan berupa Benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan mas. Benih diserahkan ke kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Benih ikan lele 6 kelompok, benih ikan lele 3 kelompok dan benih ikan mas 3 kelompok.



Penyerahan Bantuan Benih ke Kelompok

- Pembelian pakan ikan untuk UPT Balai Benih Ikan berada pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Pakan. Jenis pakan yang di pakai yaitu spesifikasi 781, 781-1, 781-2, PF0, PF100 dan PF500.



Serah terima pakan BBI

- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok. Pelatihan diikuti oleh 20 Peserta yang berasal dari Kelompok Perikanan di Kabupaten Solok. Kegiatan Pelatihan CBIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku pembudidaya ikan dalam berbudidaya ikan yang baik sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ideal.



Pelatihan CBIB Tahun 2023

- Pembinaan kelompok nelayan/pokmaswas dilakukan berupa Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang bertempat di Instalasi Konservasi Jenis Ikan Perairan Umum Danau Singkarak



Pembinaan Kelompok Nelayan/Pokmaswas

- Pemberian bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa benih Ikan Gariang sebanyak 40.000 ekor yang diserahkan ke Pokmaswas Sumber Rezeki, Pokmaswas Jorong Sungai Lasi dan Pokmaswas Ulu Sungai Indarung.



Kegiatan Restocking Ikan

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24 Poklahsar tetapi 3 Poklahsar sudah tidak aktif lagi sejak Tahun 2022 yaitu Poklahsar Bukit Merindu, Poklahsar Hijau Muda dan Poklahsar Mina Mandiri sehingga tersisa 21 Poklahsar yang melakukan pengolahan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan



Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

2.9 PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PADA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pengertian indikator untuk persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil adalah Nilai omset Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Solok di Tahun 2023 di bandingkan dengan nilai omset UMKM Tahun 2022.

Formulasi indikator untuk perhitungan persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil adalah selisih omset UMKM di tahun 2023 dengan 2022 dibagi omset 2022. Perolehan omset Pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.041.640.097.000,- dan pada perolehan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.074.688.711.000,-

Tabel. 3.9.1
Pendapatan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah UMKM	Modal (000)	Omset (000)
1	2022	12.617	Rp. 338.957.626,-	Rp. 1.041.640.097,-
2	2023	12.682	Rp. 406.747.961,-	Rp. 1.074.688.711,-

Sumber: Bidang data UKM DKUKMPP

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Solok adalah 3,1% dapat dilihat pada Tabel 3.9.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.9.2
Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
-----	-------------------	------------

1	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,1
---	--	-----

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.9.3 sebagai berikut:

Tabel. 3.9.3
Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,1	3,17	102,26

Sumber: Dinas KUKMPP Kabupaten Solok

Berdasarkan Tabel. 3.9.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil sebesar 3,1% dan terealisasi sebesar 3,17 % dengan capaian kinerja sebesar 102,26 %.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.9.4
Perkembangan Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	0,22	0,21	0,03	3,2	12,94	12,35	1,25	102,26	5,2	60,96

Sumber: Dinas KUKMPP Kabupaten Solok

Berdasarkan Tabel. 3.9.3 dapat dilihat bahwa Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 101,01%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil belum tercapai.

Berdasarkan Tabel. 3.9.4 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dan untuk capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 60,96%.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.9.5
Efisiensi Indikator Persentase peningkatan pendapatan
pada Usaha Mikro dan Kecil

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	3,20	102,26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	736.255.308	629.896.293	85,55
				Program Pengembangan UMKM	1.014.017.726	1.006.413.708	99,25
Rata-rata capaian			102,26	Total Anggaran	1.750.273.034	1.636.310.001	93,49
Tingkat Efisiensi 6,51							

Pada Indikator Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 6,51% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.750.273.034 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.636.310.001.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan



Penyerahan bantuan fasilitasi peralatan kepada UMKM dalam Upaya meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Solok Tahun 2023 oleh Bapak Bupati Solok



Pelatihan Bagi UMKM dalam Upaya peningkatan kapasitas manajemen keuangan UMKM pada Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Solok Tahun 2023

2.10 PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target PDRB sektor perdagangan Kabupaten Solok adalah Rp. 1.240.025 dapat dilihat pada Tabel 3.10.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.10.1
PDRB sektor perdagangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	PDRB sektor perdagangan	1.240.025

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator PDRB sektor perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.10.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.10.2
PDRB sektor perdagangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB sektor perdagangan	1.240.025	1.287.910	103,86

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.10.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target PDRB sektor perdagangan sebesar Rp. 1.240.025 dan terealisasi sebesar Rp. 1.287.910 dengan capaian kinerja sebesar 103,86%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.10.3
Perkembangan PDRB sektor perdagangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	PDRB sektor perdagangan	1.111.300	1.158.400	1.223.140	1.287.910	N/A	100,51	102,24	103,86	1.371.224	93,92

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.10.3 dapat dilihat bahwa capaian PDRB sektor perdagangan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,62%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, PDRB sektor perdagangan belum tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.10.4
Efisiensi Indikator PDRB sektor perdagangan

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PDRB sektor perdagangan	1.240.025	1.287.910	103,86	Program Peningkatan	1.920.533.881	1.861.925.488	96,95

				Sarana Distribusi Perdagangan			
				Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.957.755	50.325.960	96,86
				Program Pengembangan Ekspor	71.668.076	66.129.679	92,27
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	57.227.554	47.021.531	82,17
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107.224.900	106.962.300	99,76
Rata-rata capaian			103,86	Total Anggaran	2.208.612.166	2.132.364.958	96,55
Tingkat Efisiensi 3,45							

Pada Indikator PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 3,45% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.208.612.166 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.132.364.958.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Operasi Pasar



Pelaksanaan Operasi Pasar di Sungai Nanam

2. Pelaksanaan Operasi Gas 3 Kg



Pelaksanaan Operasi Gas 3 Kg di Agen PT. Lokomotiv

2.11 KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB tahun ini adalah 0,85% Dimana indikator pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah PDRB sektor akomodasi, makan dan minum.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Solok adalah 0,85% dapat dilihat pada Tabel 3.11.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.11.1
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
-----	-------------------	------------

1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,85
---	--	------

- B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.11.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.11.2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,85	0,85	100

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.11.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,85% dan terealisasi sebesar 0,85% (Rp. 93.910.000.000) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.11.3
Perkembangan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,74	0,78	0,82	085	92	101,29	102,5	100	1.00	85

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.11.3 dapat dilihat bahwa capaian Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 2,5%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.11.4
Efisiensi Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,85	0,85	100	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	318,974,148	314,211,836	99%
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5,127,972,125	5,040,749,987	98%
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	5,446,946,273	5,354,961,823	98,5%
Tingkat Efisiensi 1,5%							

Pada Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 1,5% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5,446,946,273 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,354,961,823

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - a. Pelaksanaan Pendampingan bagi Pengelola Desa Wisata pada ADWI 2023
Pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi pengelola desa wisata dilaksanakan selama 1 bulan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok melalui bidang Industri dan Kelembagaan dan Tim Konselor pariwisata Sumatera Barat (Tim Sanak Madani Indonesia).
 - b. Sosialisasi Penguatan Desa Wisata dalam Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Solok.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dari masyarakat terutama Pemerintah Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pariwisata guna peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Solok. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan mengundang nara sumber dari pelaku pariwisata di Sumatera Barat (Tim Konselor Pariwisata Sumatera Barat) dan peserta merupakan utusan dari Pemerintah Nagari, Direktur Bumhag/Bumdes serta pengelola Desa Wisata.
 - c. Pelatihan Pengelolaan Homestay di Desa Wisata
Homestay merupakan salah satu yang wajib ada dalam pengelolaan Desa Wisata sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengelola desa wisata akan pentingnya keberadaan homestay merupakan hal yang wajib sehingga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola homestay di desa wisata agar dapat

meningkatkan pelayanan yang baik bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa wisata

d. **Pelatihan Dasar Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu**

Pelatihan ini bertujuan untuk peningkatan SDM bagi pengelola Desa Wisata dan pelaku Ekonomi Kreatif yang ada di Desa Wisata, dan menggali potensi yang ada di desa wisata untuk dijadikan sebagai cenderamata/kenang-kenangan dan membuka peluang pasar produk ekraf guna peningkatan perekonomian masyarakat terutama bagi pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan mendatangkan narasumber dari Tim Konselor Pariwisata Sumatera Barat dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai volunteer produk ecolife ke pasar Internasional.

e. **Pelatihan Dasar Membuat Batik bagi pelaku Ekraf di Desa Wisata di Kecamatan Gunung Talang**

Pelatihan membuat batik bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di desa wisata dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas dari Masyarakat terutama Masyarakat yang ada di kecamatan Gunung Talang yang nantinya dapat menjadi souvenir atau kenang-kenangan bagi wisatawan yang datang ke Desa Wisata dan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat di desa wisata. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan mendatangkan narasumber dari owner Batik Salingka Tabek dan dilakukan praktek membuat batik.

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Parekraf



Pendampingan dan pembinaan dalam rangka pendaftaran ADWI 2023



Pembuatan Souvenir Berbahan Dasar Bambu



Mengikutsertakan pelaku parekraf dalam rangka bazar produk pariwisata dan ekraf



Pelatihan Pemandu Pemula Wisata Minat Khusus Arung Jeram

2. **Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan Destinasi Wisata Unggulan**

a. Pembangunan Rehab Pos Jaga dan Restribusi

Untuk mendukung pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan alahan panjang Resort (lokasi prioritas dan unggulan sebagai penyumbang PAD), maka sangat dibutuhkanya pembangunan Pos jaga dan Retribusi yang sudah tidak layak lagi (sudah bocor)



b. Rehab Villa Alahan Panjang Resort

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten melakukan pembenahan pada sarana dan prasarana yang ada pada Destinasi Wisata yang ada di Alahan Panjang Resort dari 32 kamar yang tersedia di Villa alahan panjang Resort hanya 15 kamar yang kondisinya layak untuk di promosikan dan sisanya sangat butuh perbaikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2023 hanya memiliki anggaran untuk rehabilitasi 2 unit Villa saja yakni 1 villa bougenfile dan 1 villa kayu.



c. Pembangunan Miniatur Ka'bah

Salah satu alasannya Pembangunan ini adalah karena keterbatasan untuk melaksanakan menasik haji ataupun belajar untuk menasik haji, bangunan menyerupai kabah yang dibangun diarea Masjid Raya Islamic Centre Nagari Koto Baru yang nantinya direncanakan akan dilengkapi dengan pembangunan muzdalifah, miniature arafah, mina, untuk melempar jamrah para siswa atau anah sekolah dini dalam belajar menasik haji



d. Pengadaan Panggung Seni/ Amphiteater

pembangunan panggung seni pada salah satu objek wisata bertujuan mewujudkan panggung seni sebagai

sarana promosi pariwisata, seni dan atraksi.



- e. Sosialisasi dan Pembinaan Implementasi CHSE untuk Keselamatan(Safety) pada Destinasi Wisata Non Air Bagi Pelaku Usaha/Pokdarwis.
- f. Sosialisasi pada Pelaku Usaha Pariwisata dalam menumbuhkan Usaha Pariwisata yang menerapkan unsur Sapta Pesona.



Sosialisasi Sapta Pesona



SosialisasiCHSE

3. Kegiatan Pemasaran Pariwisata

- a. Fasilitas Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - Menyusun kalender event sebanyak 38 (tiga puluh delapan) event.



b. Terasilitasinya event nagari sebanyak 5 (lima) buah event yaitu

1) Event Alek Nagari Sirukam pada tanggal 5 Februari 2023.

Event Alek Nagari Sirukam merupakan perhelatan nagari Sirukam dalam rangka syukuran dan peresmian kegiatan pembangunan infrastruktur di Nagari Sirukam. Fasilitas yang diberikan berupa pembuatan spanduk sebanyak 2 buah (ukuran 4m x 1m) sebagai media promosi.

2) Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.

Festival 3 Embung merupakan event yang dilaksanakan dalam rangka mempromosikan kawasan embung sebagai salah satu destinasi wisata dan warisan budaya tak benda Kabupaten Solok di nagari. Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas sound system, umbul umbul dan 1 (satu) buah spanduk (ukuran 4m x 1m). Jumlah kunjungan diperkirakan sebanyak 1000 orang.

- 3) Festival 3 Embung Nagari Gaung pada tanggal 16 Maret 2023.
 1. Event Balimau Patang Nagari Limau Lunggo pada tanggal 23 Maret 2023
 2. Balimau Patang merupakan event tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.
 - 4) Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang pada tanggal 26 s.d 29 April 2023.
 - 5) Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 2023.
 1. Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 dilaksanakan dalam rangka upaya mempromosikan destinasi wisata di Nagari Tanjung Alai serta upaya meningkatkan perekonomian masyarakat nagari Tanjung Alai.
 2. Jumlah kunjungan diperkirakan sebanyak 2500 orang.
- c. Terfasilitasinya event yang dilaksanakan oleh komunitas, seperti:
- 1) Event Kejuaran Kempo oleh Komunitas BKI Kabupaten Solok Pada bulan Maret 2023 di Lubuk Selasih, dengan jumlah kunjungan diperkirakan sebanyak 500 orang dan fasilitasi yang diberikan berupa penyediaan 1(satu) buah photo booth (ukuran 3m x 2m).
 - 2) Pentas Seni oleh Perguruan Silek Pangka Bajalan Nagari Sirukam pada tanggal 12 Agustus 2023, fasilitasi yang diberikan berupa penyediaan 2(dua) buah baliho (ukuran 3m x 2m) dan sertifikat sebanyak 5(lima) lembar.
 - 3) Event Taekwondo Championship 2023 oleh Komunitas Taekwondo Kabupaten Solok pada bulan tanggal 22 September 2023 di GOR Batu Tupang dengan jumlah kunjungan pada event tersebut sebanyak 2000 orang, dengan fasilitasi yang diberikan berupa penyediaan 2 (dua) buah spanduk (ukuran 5m x 1m) dan 1 (satu) buah Photo booth (ukuran 3 m x 2,5m) serta umbul umbul.
- d. Terlaksananya event daerah sebanyak 4 (empat) event yaitu:
- 1) Fun Camp dan Launching Calender of Event Kabupaten Solok 2023 pada tanggal 11 – 12 Maret 2023 di Pesangrahan Singkarak.
 - o Fun Camp dan Launching Calender of Event Kabupaten Solok dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Solok ke 110 dan Peluncuran Kalender Event Kabupaten Solok Tahun 2023.
 - o Fun Camp (Kamping Bersama) diikuti oleh nagari nagari dan OPD se Kabupaten Solok
 - o Jumlah kunjungan pada event tersebut diprediksi sebanyak 1500 orang.
 - 2) Pacu Biduak Tradisi pada tanggal 24 April 2023 di Pesangrahan Danau Singkarak.

Pacu Biduak Tradisi dilaksanakan dalam rangka memeriahkan libur lebaran 1445 H. Event Pacu Biduak Tradisi diikuti oleh nelayan nelayan

nagari di Salingka Danau Singkarak, seperti Nagari Singkarak, Nagari Tikalak, Nagari Kacang, Nagari Paninggahan, Nagari Muaro Pingai, Nagari Sumani dan Nagari Koto Sani dengan jumlah peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan diperoleh pemenang sebanyak 3 (tiga) orang pemenang.

- 3) Pemilihan Bujang jo Gadih Duta Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2023 pada bulan September – Oktober 2023. Rangkaian Pemilihan Bujang jo Gadih Duta Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2023.
- 4) Event Sumarak Salingka Danau

Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Oktober 2023 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Lomba Mencari Pensi dan Festival Lauak Danau yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 di Objek Wisata Indah Ketapiang, Nagari Tikalak. Yang diikuti oleh Siswa/siswi SLTA dan SLTP di Salingka Danau Singkarak. Dan terpilih sebanyak 3 orang pemenang: Juara 1, SMPN 2 Kacang, Juara 2, Geng Wawa dan Juara 3, MAN 2 Solok.
- Pameran UMKM, Ekraf dan Pokdarwis, Pameran Lukisan Lapiak Pandan (yang diikuti oleh siswa/siswi SLTP se Kabupaten Solok dengan pemenang sebanyak 3(tiga) orang: Juara 1, SMPN 6 Gunung Talang, Juara 2, SMPN 5 X Koto Singkarak, Juara 3, SMPN 3 Gunung Talang dan Juara Harapan 1, SMPN 2 Gunung Talang. Pada tanggal 27 Oktober 2023 di Pesangrahan Singkarak
- Silaturahmi dan Camp Seni, serta Penampilan Paket Seni Tradisi dari Kabupaten dan Luar Kabupaten Solok tanggal 27 Oktober 2023 di Pesangrahan Singkarak, yang diikuti oleh sanggar seni dan kelompok penggiat seni se Kabupaten Solok, dengan jumlah peserta sebanyak 400 orang

4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Dalam Maupun Luar Negeri

1) Promosi melalui Media Online dan Offline, yang terdiri dari

a) Media Cetak

b) Media Electronic

- Media Berita Online

Media berita online adalah berita yang tersaji di media internet yang meliputi pariwisata, iklan dan berita. Berita ini diposting oleh 6 media online yaitu:

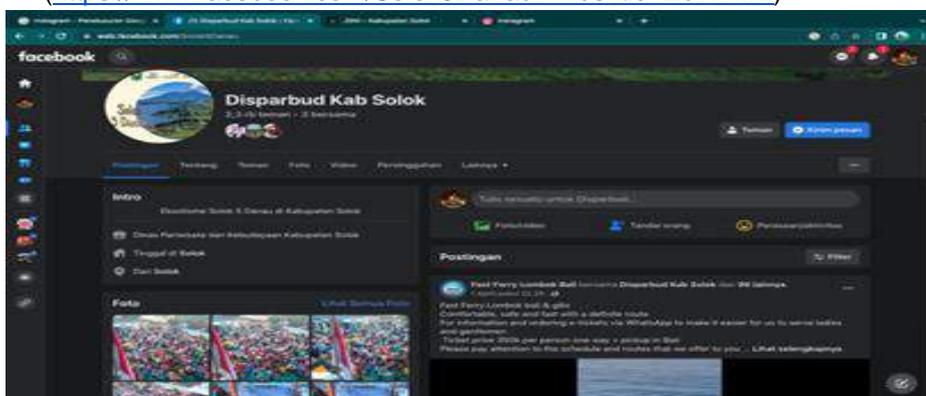
- Media member of haluan hantaran.co
- Media denbagus.co
- Media pilarbangsanews.com
- Media arosukapost multimedia
- Media suaraindependent.id
- Media PRnewsapresisi.com

- Media Sosial

Salah satu upaya pengembangan potensi kepariwisataan, pemasaran pariwisata dan budaya di Kabupaten Solok adalah melalui publikasi/promosi melalui media sosial. Untuk kelancaran

pelaksanaan media sosial ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Nomor: 556/64/Disparbud-2023 tentang Pembentukan Tim Kreatif Pelaksana Pemasaran Pariwisata Berbasis Teknologi Informasi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023. Dalam SK tertuang bahwa masing-masing bidang mempunyai operator dalam memasukkan postingan ke dalam media sosial dan dikoordinir oleh masing-masing bidang. Postingan yang dimasukan adalah semua yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kegiatan Dinas. Terkait dengan penggunaan media sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok telah mempunyai beberapa akun media sosial yang bisa dilihat/search.

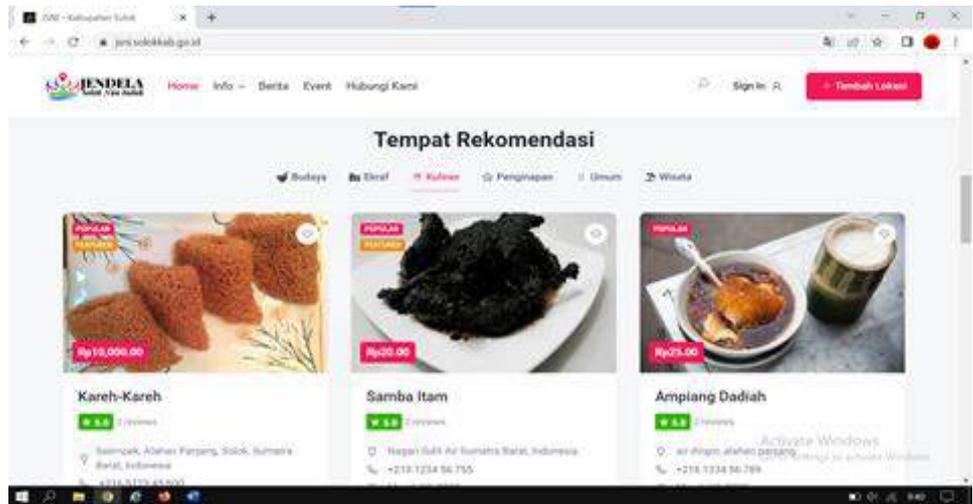
- Facebook (Disparbud Kab Solok)
<https://www.facebook.com/Solok5Danau?mibextid=ZbWKwL>



- Instagram (disparbud_kabsolok)
https://instagram.com/disparbud_kabsolok?igshid=ZDdkNTZiNTM=



- Aplikasi Jendela Solok Nan Indah (JSNI)
 Dalam pengembangan Smart Branding selain media sosial diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengembangkan sebuah media sosial lainnya yaitu media informasi pariwisata yang bernama Jendela Solok Nan Indah (JSNI) sudah ada sejak tahun 2019 yang dapat diakses melalui <https://jsni.solokkab.go.id>. Jendela Solok Nan Indah (JSNI) merupakan salah satu sarana pendukung informasi dalam pengembangan kepariwisataan Daerah Kabupaten Solok yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan stakeholder terkait.



5. Kegiatan Kebudayaan

Salah satu upaya Meningkatkan peran kesenian daerah untuk mendukung pariwisata daerah yaitu melalui atraksi penampilan kesenian, seperti adanya Lomba Hymne Bundo Kandung sebagai ajang untuk pengembangan kapasitas bundo kaduang dalam nagari dan sebagai suatu bentuk partisipasi kesenian pada promosi wisata.



Selain upaya tersebut diatas Dinas Pariwisata juga selalu melakukan pembinaan terhadap Lembaga, grup, dan kelompok budaya, kesenian daerah sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan masing- masing lembaga, grup atau kelompok

Tanjung alai



paninggahan



Sirukam



Sumani



2.12 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Formulasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Pengangguran Terbuka terdiri dari:

Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan

Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha

Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

Mereka yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai pekerjaan

$$\text{Pengukuran terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok adalah 4,42% dapat dilihat pada Tabel 3.12.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.12.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.12.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.12.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42	4,99	87,1

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 2024

Berdasarkan Tabel. 3.12.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,32% dan terealisasi sebesar 4,99% dengan capaian kinerja sebesar 87,1%

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.12.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (%)	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,65	4,67	5,89	4,99	80,15	98,26	69,98	87,1	4,05	76,79

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 3.12.3 dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 17,12%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Tingkat Pengangguran Terbuka belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.12.4
Efisiensi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,32	4,99	87,1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	9.682.930	9.295.000	95,99
				Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	178.837.506	163.370.678	91,35
				Program Penempatan Tenaga Kerja	38.682.936	33.199.254	85,82

				Program Hubungan Industrial	43,126,666	38,368,254	88.96
Rata-rata capaian			87,1	Total Anggaran	270.330.038	244,233,186	90.34

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
5. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
6. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota





Pelayanan Keliling AK1 dan Pelatihan

2.13 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan suatu nilai yang mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Indeks Reformasi Birokrasi mengkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sementara untuk evaluasi reformasi Birokrasi oleh APIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok adalah B (65,00) dapat dilihat pada Tabel 3.13.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.13.1
Indeks Reformasi Birokrasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.13.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.13.2
Indeks Reformasi Birokrasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	BB (72,81)	112,02

Sumber: LHE Reformasi Birokrari KemenPANRB tahun 2023

Berdasarkan tabel 13.1.2 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 adalah 72,81 atau dengan kategori BB. Sehingga apabila dibandingkan dengan target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 65,00 atau kategori B diperoleh capaian kinerja 112,01%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.13.3
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	CC (59,14)	B (60,42)	BB (72,81)	NA	98,90	100,36	112,01	A (80,00)	91,01

Sumber: LHE Reformasi Birokrari KemenPANRB (Data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.13.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 11,65%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.13.4
Efisiensi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	B (72,81)	112,02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	152.315.000	141.877.683	93,18
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.648.068	667.125.824	89,47

				Kabupaten/Kota			
Rata-rata capaian			112,02	Total Anggaran	897.963.068	809.003.507	90,1
Tingkat Efisiensi 9,9							

Pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 9,9% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 897.963.068 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 809.003.507.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dilakukan dengan metode asistensi Perangkat Daerah penanggungjawab Reformasi Birokrasi dengan Tim Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok dengan mempedomani PermenpanRB 3 Tahun 2023.
3. Memberikan Pendampingan dan Asistensi dan penjaminan mutu pada Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik melalui kegiatan Evaluasi Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2023 (Evaluasi Ex-Ante).
4. Melakukan monitoring atas Tindaklanjut rekomendasi hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KemenPANRB tahun sebelumnya.
5. Melakukan pemantauan atas realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2023 untuk setiap indikator (Evaluasi On Going).

2.14 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran untuk menilai untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok adalah BB (70,00) dapat dilihat pada Tabel 3.14.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.14.1
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target
-----	-------------------	--------

1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)
---	-----------------------------	------------

- B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.14.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.14.2
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	B (67,65)	96,64

Sumber: LHE AKIP Tahun 2023 oleh KEMENPANRB

Berdasarkan Tabel. 3.14.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai BB (70,00) dan terealisasi nilai B (67,65) dengan capaian kinerja sebesar 96,64%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.14.3
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (66,57)	B (66,60)	B (66,95)	B (67,65)	NA	96,52	97,03	96,64	A (80,00)	84,56%

Sumber: LHE AKIP Tahun 2023 oleh KEMENPANRB

Berdasarkan Tabel. 3.14.3 dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,93%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Nilai Akuntabilitas Kinerja belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.14.4
Efisiensi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU	Kinerja				Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	B (67,65)	96,94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	30.896.842.398	29.174.777.731	94,43

			Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja	56.400.000	53.262.000	94,44	
Rata-rata capaian			96,94	Total Anggaran	30.896.842.398	29.174.777.731	94,42

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,40	23,53
b. Pengukuran Kinerja	30	17,48	17,72
c. Pelaporan Kinerja	15	10,37	10,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,70	16,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,95	67,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: LHE AKIP Tahun 2023 oleh KEMENPANRB

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dilakukan dengan cara asistensi oleh Tim penyusunan dan Tim pembahas LKJIP Kabupaten dengan Perangkat Daerah.



Rapat Tim SAKIP dalam Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2024

2. Dalam rangka percepatan tidak lanjut terhadap rekomendasi LHE internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat, pada tahun 2023, APIP melakukan monitoring

tindaklanjut LHE SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah. Hasil dari monitoring tersebut, dari 285 jumlah temuan tertindaklanjuti sebanyak 277 atau sebesar 97%.



3. Dalam rangka meningkatkan Kapabilitas tim Evaluator, APIP Inspektorat Daerah pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 orang APIP mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor. Dengan semakin banyaknya jumlah APIP yang telah mengikuti Diklat Evaluasi nantinya diharapkan akan mejadikan evaluator internal yang kompeten.



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
SERTIFIKAT
 Nomor: SERT-0603/DL/3/2024

Diberikan Kepada:
Yuliana, S.E.

NIP : 19930723 201903 2 002
 Pangkat, Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
 Jabatan : Auditor Pertama
 Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Telah Mengikuti Pelatihan
Evaluasi atas Implementasi SAKIP
 50 Jam Pelatihan
 Kota Bogor, 19 Februari 2024 - 23 Februari 2024
 Kepala Pusat,



Telah ditandatangani secara elektronik
 Dr. R. Erni Soenarsh, Ak., M.Ec., CA, CIA, CGAE, CIAE
 NIP 19660830 198703 2 001

 Ditukung oleh Timah Diselenggarakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSR.

ISO 37001:2016
 Sistem Manajemen Anti Penipuan

ISO 9001:2015
 Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
 Government Internal Audit
 Corporate Underwriting

4. Dalam pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE), seluruh Personil TIM Evaluasi Akuntabilitas Inspektorat diberikan pembekalan melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang pengisian kertas kerja Evaluasi SAKIP OPD sesuai Permenpan Nomor 88 Tahun 2021.



5. Dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi akuntabilitas dilaksanakan supervisi berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan penanggungjawab tim untuk menjamin kualitas hasil evaluasi.

2.15 NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Nilai LPPD dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui hasil evaluasi LPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sampai saat ini nilai LPPD Kabupaten Solok belum disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sampai saat laporan ini disusun sehingga Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum dapat dijelaskan capaian kerjanya

2.16 OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Opini BPK Kabupaten Solok adalah WTP dapat dilihat pada Tabel 3.16.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.16.1
Opini BPK Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Opini BPK	WTP

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Opini BPK Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.16.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.16.2
Opini BPK Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	WTP	WTP	TERCAPAI

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan Tabel. 3.16.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 tercapai, dimana pada tahun 2023 target Opini BPK dengan Opini WTP dan terealisasi WTP dengan capaian kinerja tercapai.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.16.3
Perkembangan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian

1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	WTP	Tercapai
----	-----------	-----	-----	-----	-----	----------	----------	----------	----------	-----	----------

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan Tabel. 3.16.3 dapat dilihat bahwa capaian Opini BPK tahun 2023 mempertahankan capaian tahun 2022. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Opini BPK telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.16.4
Efisiensi Indikator Opini BPK

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Opini BPK	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.208.168.462	1.060.287.559	87.76
Rata-rata capaian				Total Anggaran	1.208.168.462	1.060.287.559	87.76
Tingkat Efisiensi 12.24							

Pada Indikator Opini BPK di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 87.76% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.208.168.462,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.060.287.559,00.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Opini BPK di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang dihadiri oleh PPK dan operator keuangan seluruh OPD.



2. Kegiatan dalam rangka pengembangan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan di Hotel Rocky Padang.



2.17 INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Pengertian Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang mengkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Kriteria Pengukuran IP ASN diukur melalui 4 dimensi:

a. Dimensi Kualifikasi

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran, dengan rincian bobot per indikator sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kualifikasi	Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS	25%	
	S-3		25
	S-2		20
	S-1/D-V		15
	D-III		10
	SLTA/D-II/D-I Sederajat		5
	Dibawah SLTA		1

Berdasarkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar.

b. Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen). Indikator yang digunakan yaitu Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- 1) Diklat kepemimpinan
- 2) Diklat Fungsional
- 3) Diklat Teknis
- 4) Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus dan sejenisnya

c. Dimensi Kinerja

Digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN. Dimensi kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.

d. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Solok adalah 65 dapat dilihat pada Tabel 3.17.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.17.1
Indeks Profesionalitas ASN Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Profesionalitas ASN	65

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.17.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.17.2
Indeks Profesionalitas ASN Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN	65	61,60	94

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru)

Berdasarkan Tabel. 3.17.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 65 dan terealisasi sebesar 61,60 dengan capaian kinerja sebesar 94% dengan kategori nilai rendah. Sedangkan untuk nilai IP ASN per dimensi penilaian adalah sebagai berikut:

JUMLAH ASN SAAT PENILAIAN	DIMENSI KUALIFIKASI	DIMENSI KOMPETENSI	DIMENSI KINERJA	DIMENSI DISIPLIN	TOTAL NILAI
4452	21,30	10,32	24,98	5,00	61,60
	DARI TOTAL BOBOT DIMENSI	DARI TOTAL BOBOT			
	25	40	30	5	100
CAPAIAN PER DIMENSI	85,20%	25,80%	83,27%	100,00%	61,60%

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.17.3
Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN	44,39	45,86	45,80	61,60	96,08	77,73	73,87	94	74	83,24

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru

Berdasarkan Tabel. 3.17.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 20,13%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Profesionalitas ASN belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.17.4
Efisiensi Indikator Indeks Profesionalitas ASN

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Profesionalitas ASN	65	61,60	94	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.530.000	12.530.000	100,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	43.966.000	40.094.000	91,19
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan tinggi, Jabatan Fungsiona, kepemimpinan dan Prajabatan	1.399.999.600	1.326.396.488	94,74
Rata-rata capaian			94	Total Anggaran	1.456.495.600	1.379.020.488	94,68

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

Program:

a) Dimensi Kualifikasi

Dalam peningkatan Kualifikasi ASN Pemerintah Daerah memberi izin untuk meningkatkan Kualifikasi dengan pemberian izin Tugas belajar ke jenjang yang lebih Tinggi.

b) Dimensi Kompetensi

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Tempat
1	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi PPTK dan KPA	71 orang	Kabupaten Solok
2	Bimtek Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara	41 orang	Kabupaten Solok
3	Pelatihan Dasar STTD	3 orang	PPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri RI
4	Pendidikan dan Pelatihan PKA	6 orang	PPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri RI
5	Pendidikan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	20 orang	Pusdiklat Nasional
6	Bimbingan Teknis	56 orang	Kabupaten Solok
7	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi PPK	41 orang	Kabupaten Solok
8	Sosialisasi PermenPAN bagi Pejabat Fungsional paska penyetaraan di Lingkungan Pemkab. Solok	258 orang	Kabupaten Solok

Kegiatan:

1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi PPTK dan KPA



Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi KPA, PPTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi KPA, PPTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam proses pengadaan Barang/Jasa bagi pengelolaan Keuangan di masing-masing OPD dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Narasumber kegiatan ini berasal dari LKPP RI, Kejaksaan dan Kepolisian dan Narasumber di Bidanganya.

2. Bimtek Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara



Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang bertujuan untuk dapat mengelola Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat bagi Bendahara Perangkat Daerah di masing-masing OPD dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

3. Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi PPK



Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan bagi Kasubag Keuangan / Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

4. Sosialisasi PermenPAN bagi Pejabat Fungsional paska penyetaraan di Lingkungan Pemkab. Solok



Pelaksanaan Sosialisasi Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Perka BKN No. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional diikuti sebanyak 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) orang peserta yang terdiri dari pejabat Fungsional penyetaraan dan Kasubag Umum & Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dibagi menjadi 2 tahap.

Pelaksanaan Sosialisasi ini akan dilaksanakan tanggal 13 dan 14 November 2023 bertempat di Gedung Solok Nan Indah Komplek Kantor Bupati Solok. Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Perka BKN No. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional berasal dari Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekan Baru.

5. Pendidikan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa



Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah Level-1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023

ini diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta yang terdiri dari KPA, PPTK dan Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Dari 20 peserta yang ikut Ujian Kompetensi PBJ dinyatakan lulus sebanyak 4 (empat) orang.

Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah Level-1 adalah salah satu syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan diangkat setelah memiliki Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2015. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Fungsional berstatus ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

6. Pendidikan dan Pelatihan PKA



Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator (PKA) dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator (PKA) dari Pemerintah Kabupaten Solok dengan pola kontribusi diikuti sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.



7. Pelatihan Dasar Lulusan STTD

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2023 ini diikuti oleh 3 (tiga) orang CPNS Formasi Tahun 2022 dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan pola Kontribusi. Pelaksanaan Pelatihan Dasar ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Republik Indonesia Regional Bukittinggi dengan dengan **Metode Blended Learning**.

2.18 LEVEL MATURITAS SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Nilai Maturitas SPIP didapatkan berdasarkan Quality Assurance yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok adalah Level 3 dapat dilihat pada Tabel 3.18.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.18.1
Level Maturitas SPIP Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Level Maturitas SPIP	3

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.18.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.18.2
Level Maturitas SPIP Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Level Maturitas SPIP	3	3	100

Sumber: BPKP

Berdasarkan Tabel. 3.18.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Level Maturitas SPIP pada Level 3 dan terealisasi pada Level 3 dengan capaian kinerja 100%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.18.3
Perkembangan Level Maturitas SPIP

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)
----	-------------------	-----------	-------------	---------------------------------

		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100	100	100	100	4	75

Sumber: BPKP

Berdasarkan Tabel. 3.18.3 dapat dilihat bahwa capaian Level Maturitas SPIP tahun 2023 tetap dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Level Maturitas SPIP belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.18.4
Efisiensi Indikator Level Maturitas SPIP

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Level Maturitas SPIP	3	3	100	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	152.315.000	141.877.683	93,18%
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	152.315.000	141.877.683	93,18%
Tingkat Efisiensi 6,82%							

Pada Indikator Level Maturitas SPIP di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 6,82% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 152.315.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.877.683.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Melakukan Penilaian Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah dan OPD secara berkelanjutan. Penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pengkomunikasian risiko dan RTP, implementasi RTP, serta pemantauan dan evaluasi risiko dan RTP.



Workshop penyusunan dokumen RTP di BPKP Perwakilan Sumatera Barat

2. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi Area of Improvement (AOI), antara lain melakukan evaluasi atas efektifitas implementasi dan kebijakan pada seluruh sub unsur, serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi.



Penyampaian hasil evaluasi SPIP oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat

3. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Audiensi penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah

2.19 NILAI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Formulasi Indeks SPBE sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n \text{ND}_j \times \text{BD}_j$$

dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke- j ;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke- j .

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok adalah 2,8 dapat dilihat pada Tabel 3.19.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.19.1
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.19.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.19.2
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,49	124,64

Sumber: Keputusan Kementerian PAN dan RB No. 13 Tahun 2024.

Kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,8 dan terealisasi sebesar 3,49 dengan capaian kinerja sebesar 124,64%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.19.3
Perkembangan Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	2,82	3,12	3,49	100	122,6	124,8	124,64	3,4	102,65

Sumber Keputusan Kementerian PAN dan RB No. 13 Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.19.3 dapat dilihat bahwa capaian Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,16%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.19.4
Efisiensi Indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,49	124,64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	197.458.310	175.602.603	89
Rata-rata capaian			124,64	Total Anggaran	197.458.310	175.602.603	89

Pada Indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 11% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 197.458.310 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.602.603.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Solok Tahun 2023



Rapat Pelaksanaan Rapat Evaluasi SPBE Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
 Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
 Website : setda.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Solok
 Nomor : 555 / 613 / Diskominfo-2023
 Tanggal : 16 Juni 2023

Arosuka, 13 Maret 2023
 Kepada Yth.
 Sdr.
 (Daftar terlampir)

Nomor : 555/501/Diskominfo-2023
 Lampiran : -
 Perihal : **UNDANGAN**

di- **Tempat**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/598/M.KT.03/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 15 Maret 2023
 Waktu : 08.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Kabupaten Solok
 Acara : **Rapat Tim Koordinasi SPBE Kab. Solok (Bag. Hukum)**

Demikianlah disampaikan untuk dapat dihadiri, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
 M. HUSNAN S.Sos.M.S.
 NIP. 19710409 199203 1 003

No.	DPE	Indikator
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	- Indikator 13 : Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE - Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	- Indikator 42 : Tingkat Kematangan Pengadaan Pelayanan Publik - Indikator 43 : Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka - Indikator 45 : Layanan Publik PPIID
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	- Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai - Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
5.	Kepala Dinas Perpuantakaan dan Kearsifan	- Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsifan Dinamis
6.	Inspektur Daerah	- Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
7.	Kepala Dinas Perhubungan	- Indikator 46 : Layanan Publik SimPKD
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Indikator 47 : Layanan Publik Sisdlo lain
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	- Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE - Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10.	Kepala Bagian Hukum dan HAM	- Indikator 44 : Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH)
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	- Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
12.	Kepala Bidang Anggaran BKD	- Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	- Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
14.	Kepala Bidang Aset BKD	- Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Evaluasi SPBE Tahun 2023.

2. Pelaksanaan Rapat Bidang terkait perencanaan pengumpulan dan penyiapan dokumen bukti dukung (evidence) Indikator Evaluasi SPBE 2023.



3. Kegiatan Rapat Koordinasi perencanaan pengumpulan dan penyusunan Dokumen Bukti Dukung Indikator SPBE 2023.
4. Kegiatan Rapat Koordinasi bersama PD terkait yang terlibat dalam penyediaan dokumen bukti dukung Indikator SPBE 2023.
5. Pelaksanaan Koordinasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE 2023.
6. Pelaksanaan Studi komprehensif dan koordinasi penyusunan dan penyiapan bukti dukung dan pengembangan program SPBE dengan Pemerintah Daerah lain yang lebih baik penilaiannya.
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan konsultasi penyiapan dokumen SPBE 2023.

2.20 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Formulasi penghitungan IKM sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Solok adalah 3,51 dapat dilihat pada Tabel 3.20.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.20.1
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,51

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.20.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.20.2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,51	3,45	98,29

Sumber: Pemerintah Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.20.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,51 dan terealisasi sebesar 3,45 dengan capaian kinerja sebesar 98,29%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.20.3
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,4	3,07	3,39	3,45	94,44	90,17	98,26	98,29	3,65	94,52

Sumber: Pemerintah Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.20.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,03%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.20.4
Efisiensi Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,51	3.45	98,29	Program pendaftaran penduduk	689.771.770	660.902.980	95,81
				Program pencatatan sipil	120.533.140	115.216.150	95,59
				Program pengelolaan informasi	96.058.230	87,680,655	91,28

				administrasi kependudukan			
				Program pengelolaan profil kependudukan	46.429.000	42.478.500	91,50
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	745.648.068	667.125.824	89,47
Rata-rata capaian			98,29	Total Anggaran	1.698.440.208	1.573.404.109	92,64

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM melalui kegiatan bina mental, spiritual dan evaluasi kinerja harian yang diikuti oleh seluruh staf dan unsur pimpinan Disdukcapil.



Peningkatan SDM

2. Penyediaan informasi melalui spanduk, Banner media sosial



Papan Informasi

3. Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi administrasi kependudukan yang dihadiri langsung oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd.



Sosialisasi dan Rapat Koordinasi

4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik
RUANG TUNGGU PROSES PENERBITAN DOKUMEN



RUANG TUNGGU DISABILITAS



LOKET KHUSUS PRIORITAS



LOKET PENGADUAN



RUANG TUNGGU PENGAMBILAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



RUANG BERMAIN ANAK



RUANG LAKTASI



2.21 INDEKS INOVASI DAERAH

Pengertian Inovasi Daerah adalah Himpunan Inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bentuk pembaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintah daerah pada setiap tingkatannya.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{-----}} \times 100$$

Skor Total Maksimal

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
Skala IID adalah 0 s.d. 100.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok adalah 64 dapat dilihat pada Tabel 3.21.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.21.1
Indeks Inovasi Daerah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Inovasi Daerah	64

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.21.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.21.2
Indeks Inovasi Daerah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	64	46,56	72,75

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:400.10.11-6287

Berdasarkan Tabel. 3.21.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Inovasi Daerah sebesar 64 dan terealisasi sebesar 46,56 dengan capaian kinerja sebesar 73 %.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.21.3
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Inovasi Daerah	1.512	36,27	54	46,56	NA	60,45	51,02	72,75	70	66,51

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:400.10.11-6287

Berdasarkan Tabel. 3.21.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 21,73%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Inovasi Daerah belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.21.4
Efisiensi Indikator Indeks Inovasi Daerah

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Inovasi Daerah	64	46,56	73	Program Penelitian dan Pengembangan	536.002.394,-	469.132.053,-	93,71
Rata-rata capaian			73	Total Anggaran	536.002.394,-	469.132.053,-	93,71

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pembahasan pelaporan Inovasi Daerah untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan Penghargaan IGA Tahun 2023



Pelaksanaan pembahasan pelaporan Inovasi Daerah untuk menghimpun kegiatan Inovasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah agar dapat memenuhi indikator yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang telah dilaksanakan oleh OPD.

2. Sosialisasi dan pemanduan terhadap pengertian data inovasi Perangkat Daerah pada Web. <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>



Pendampingan terhadap pengentrian data Inovasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh masing – masing Perangkat Daerah.

3. Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Solok



Sosialisasi Inovasi daerah dalam rangka persiapan untuk tahun 2024 agar Perangkat Daerah melaksanakan inovasi sesuai dengan indikator dan melengkapi data yang dapat memenuhi kategori sebuah inovasi untuk dapat diukur dan dinilai dan juga memberikan pemahaman kepadaperangkatdaerah tentang Inovasi dan persyaratan-persyaratan yang ahrus dipenuhi oleh perangat daerah.

2.22 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat ditentukan menggunakan ukuran kuantitatif yang disebut dengan HDI (Human Development Indeks). HDI digunakan

sebagai tolak ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur HDI adalah sebagai berikut :

IPM dibentuk oleh 4 (empat) dimensi dasar:

1. **Pengeluaran Perkapita**
2. **Harapan Lama Sekolah**
3. **Rata-rata Lama Sekolah**
4. **Usia Harapan Hidup.**

Pengeluaran terhadap NilaiIPM dilaksanakan sepenuhnya oleh BPS

1. **Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2023 sebesar Rp. 15.631.812,- lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pengeluaran sebesar Rp. 16.941.876,-

Realisasi Pengeluaran Perkapita tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **Rp. 15.631.812** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **148,49%** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai Rp. 11.242.000 maka capaian kinerja telah mencapai **139,05%**

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2023 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut:

1. **Faktor Pendukung**

- a. Meningkatnya kebutuhan Masyarakat (Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga, Pakaian dan lain-lain)
- b. peningkatan terhadap harga barang

2. **Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan**

- b. Peningkatan kapasitas tenaga kerja sehingga akan dibarengi dengan peningkatan pendapatan Masyarakat
- c. Menjaga kestabilan harga barang pokok

2. **Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah kemungkinan anak tersebut akan mungkin bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Adapun tujuan dari harapan lama sekolah yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:

$$EYS_a^t = FKX \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;

capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada tahun 2023 target Harapan Lama Sekolah dengan usia 13,9 Tahun dan terealisasi sebesar 13,55 tahun dengan capaian kinerja sebesar 97,48 %.

Realisasi Harapan Lama Sekolah tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan usia 15 Tahun maka capaian kinerja sebesar 90,33%.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka RLS juga berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (Standar UNDP). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih 18 tahun, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

Cara menghitung Angka RLS suatu daerah dapat merujuk pada formula berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada tahun 2023 target Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan usia 7,95 Tahun dan terealisasi sebesar 7,90 dengan capaian kinerja sebesar 99,37%.

Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) pada usia 8,10 Tahun maka capaian kinerja sebesar 97,53%.

3. Usia Harapan Hidup.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Apabila ditemukan UHH yang rendah disuatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Beberapa penelitian menyatakan bahwa UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. BPS melaporkan UHH penduduk Indonesia saat lahir mencapai 72.13 tahun pada tahun 2023, angka tersebut meningkat 0.28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 71.85 tahun.

Berdasarkan serangkaian Age Spesific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya UHH suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu . Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diukur dengan formulasi Expectation of life (Eo). Dimana data yang digunakan adalah:

1. Jumlah kematian penduduk antara usia x dan x+1
 2. Penduduk yang bertahan hidup pada usia tepat x tahun
- Constructing Life Table dapat dilihat pada Tabel. 3.dibawah ini:

Constructing Life table

x	l_x	d_x	q_x	L_x	T_x	e^o_x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	100.000	2.256	0.02256	98.109	7.324.402	73.24402
1	97.744	155	0.00158			
65+		21				

- x = umur penduduk
- q_x = peluang penduduk meninggal antara umur x dan x+1
- l_x = penduduk yang bertahan hidup pada umur tepat x
- d_x = jumlah kematian penduduk antara umur x dan x+1
- L_x = Tahun kehidupan (years lived) antara umur x dan x+1
- T_x = Tahun total kehidupan (total years lived) setelah umur tepat x
- x^o_x = Harapan hidup (expectation of life) jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat x

Cara menghitung q_0 =

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} q_0 = \frac{2256}{100000} \Rightarrow 0.02256$$

Cara Menghitung l_x , l_d dan q_x berikutnya

$$L_{x+1} = l_x * (1 - q_x) \quad \Longrightarrow \quad l_1 = 100000 * (1 - 0.02256) = 97.744$$

Cara Menghitung L_x dan T_x

$$L_x = \frac{l_x + l_{x+1}}{2} L_0 = \frac{100000 + 97744}{2} = 98.109$$

$$T_x = \sum_{i=x}^w L_i = 7.324.402$$

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok adalah 70,54 dapat dilihat pada Tabel 3.22.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.22.1
Indeks Pembangunan Manusia Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,54

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.22.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.22.2
Indeks Pembangunan Manusia Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	71.92	101.96

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.22.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70.54 dan terealisasi sebesar 71.92 dengan capaian kinerja sebesar 101.96%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.22.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,08	69,24	70.02	71.92	101.98	101.54	102.00	101.96	72,00	99.89

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.22.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022

sebesar 0,04%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD Indeks Pembangunan Manusia belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.22.4
Efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Manusia

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pembangunan Manusia	70,54	71,92	101,96	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	127.709.455.018	121.144.874.493	94.86
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	72.829.352.961	60.255.008.686	82.73
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.182.963.103	1.051.064.422	88.85
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	467.110.750	390.592.500	83.62
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	397.330.000	390.002.000	98.16
				Program Pengelolaan Pendidikan	129.216.262.467	116.920.466.985	90,48
Rata-rata capaian			101,96	Total Anggaran	331.802.474.299	300.152.009.086	90,46
Tingkat Efisiensi 9,54%							

Pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 9,54% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 331.802.474.299 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.152.009.086.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Urusan Kesehatan

- a. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dengan advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat kecamatan dan pada 14 kecamatan di kabupaten solok dilakukan kegiatan pengembangan dan penggandaan media gerakan masyarakat hidup sehat, penggerakan masyarakat di semua tatanan tentang edukasi, perilaku sehat, deteksi dini penyakit, lingkungan sehat, pangan sehat dan perbaikan gizi.



Kegiatan Launching Posyandu Prima Poskesri dalam Rangka Gebyar Kesehatan Masyarakat

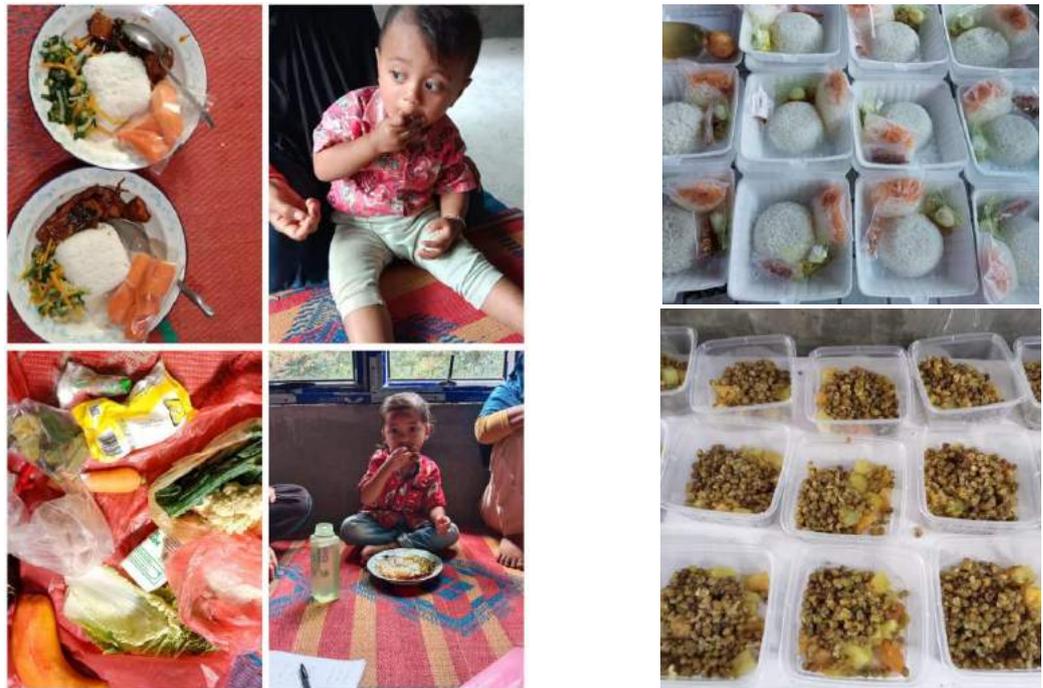
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal care) menjadi 6 (enam) kali, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan 6 (enam) tangan, pendampingan tim ahli (Sp.A dan SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal serta peningkatan program P4K (Program perencanaan dan pencegahan komplikasi)



Pemeriksaan Ibu Hamil ANC

- c. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK, sebanyak 767 ibu hamil dan pada balita gizi kurang, sebanyak 1.285 balita,

yang diawali dengan pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan PMT serta pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk dalam rangka percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan.



Pemberian PMT pada Balita Gizi Kurang



Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK

- d. Perbaikan sanitasi dengan melaksanakan advokasi dan koordinasi bersama 64 nagari untuk melakukan kegiatan percepatan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan salah satunya dengan pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat menggunakan jamban sehat serta penguatan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) meliputi stop BABS, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pengolahan air minum dan makanan dengan benar, pengolahan sampah rumah tangga, pengolahan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari.
- e. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan pelaksanaan kunjungan keluarga, melakukan updating data PIS-PK by name by address, melakukan intervensi lanjutan terhadap keluarga berisiko dan melakukan monitoring dan evaluasi terintegrasi seluruh program.

- f. Peningkatan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) melalui posyandu terintegrasi meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, skrining kesehatan usia produktif dan lansia serta pelayanan imunisasi dan KB
- g. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit meliputi deteksi dini factor resiko, penemuan kasus aktif, pemantauan pengobatan penyakit menular serta penyelidikan dan respon kasus atau KLB (Kejadian Luar Biasa). Pada tahun 2023 terdapat 3 KLB (DBD, Campak, Keracunan Makanan) yang di tangani kurang dari 24 jam.
- h. Melakukan penyediaan tenaga dengan perjanjian tenaga dan program Nusantara sehat bagi tenaga yang tidak mencukupi dilapangan seperti dokter, tenaga promkes, sanitasi, nutrisionis dan lain-lain.
- i. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui reakreditasi puskesmas sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas terstandar. Pada tahun 2023 19 (Sembilan belas) puskesmas sudah reakreditasi dengan status 10 (sepuluh) puskesmas paripurna dan 9 (sembilan) puskesmas utama.



Kegiatan Re-Akreditasi Puskesmas

- j. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader kesehatan dengan pelatihan tenaga kesehatan/petugas puskesmas sesuai layanan kluster siklus hidup serta workshop kader kesehatan. Pada tahun 2023 dilakukan 6 kali kegiatan Peningkatan kapasitas kader, pada sebanyak 240 orang. Dan pelatihan tenaga Petugas Kesehatan dilakukan 4 Kali pada 19 Puskesmas.



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan

- k. Kerjasama antara RS Arosuka dengan RSUD Solok Selatan mengenai tenaga Dokter Spesialis Rehab Medik, dengan RSUD M. Natsir terhadap Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis, dengan RSUP M. Djamil Padang mengenai Layanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)
- l. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawah Lunto dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan kegiatan berupa antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dalam melayani pasien Jamkesmas

2. Urusan Pendidikan

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

a. Melaksanakan Proses Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

Pada tahun 2023 bidang pembinaan Sekolah Dasar telah melaksanakan rangkaian proses Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD). ANBK tersebut bukanlah sebuah ujian tetapi penilaian yang dilakukan secara holistik terhadap warga sekolah khususnya siswa dan guru. Siswa yang menjadi objek asesmen tersebut adalah siswa yang duduk di kelas V. Sedangkan semua guru pada satuan pendidikan dijadikan sebagai objek asesmen. Data peserta ANBK tersebut bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) setiap satuan pendidikan.

ANBK yang dilakukan oleh siswa dan guru di satuan pendidikan adalah untuk melihat capaian terhadap beberapa indikator yaitu kemampuan literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Berikut beberapa dokumentasi terkait pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan:



b. Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

Prestasi akademik dan non akademik diraih melalui Pendidikan yang bermutu memerlukan pengembangan kecerdasan secara komprehensif dan bermakna. Aspek – aspeknya meliputi (1) Olah hati (cerdas spiritual) untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak

mulia, budi pekerti atau moral, membentuk kepribadian yang unggul, membangun kepemimpinan dan kewirausahaan, (2) Olah pikir (cerdas intelektual) untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Olah rasa (cerdas emosional dan social) untuk meningkatkan sensitivitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya, dan (4) Olahraga (cerdas kinestetis) untuk meningkatkan Kesehatan, kebugaran, daya tahan, kesigapan fisik dan keterampilan kinestetis.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia menyatakan bahwa “Balai Pengembangan Talenta Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta peserta didik.” Tugas tersebut diimplementasikan dalam salah satu fungsi Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) melalui pelaksanaan ajang talenta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional bagi Peserta Didik Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut FLS2N SD.

Pada tahun 2023 cabang lomba yang dipertandingkan adalah menyanyi solo, bercerita, seni tari, pantonim, dan kriya. Tahapan lomba dilakukan secara berjenjang yang diawali pada tingkat gugus, kecamatan dan kabupaten. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tingkat kabupaten Solok tahun 2023:



c. Diklat Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya. PMM menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Memberikan fasilitas Pelatihan Mandiri kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri, untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam implementasi kurikulum merdeka.

Beberapa dokumentasi kegiatan Diklat PMM jenjang Guru SD tahun 2023:



d. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD)

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pada bidang Sekolah Dasar (SD) telah dilakukan pada tahun 2023 berupa pembangunan dan rehab ruang kelas, pembangunan dan rehab Ruang TU/Kepsek/Guru, pembangunan dan rehab Laboratorium, Pembangunan dan rehab

Utilitas Sekolah, pengadaan alat praktek, perlengkapan belajar, dan pengadaan meubel sekolah. Berikut beberapa dokumentasi terkait kegiatan Fisik di bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD) tahun 2023:



Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar



Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Dasar



Penyerahan Perlengkapan Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar



Penyerahan Perlengkapan Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Bimbingan Teknis Proktor ANBK SMP

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh bidang pembinaan SMP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman proktor (tenaga teknis) ANBK di satuan pendidikan terhadap tupoksi yang dijalani selama ANBK dilaksanakan. Beberapa dokumentasi kegiatan yaitu:



b. Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah SMP

Kegiatan bimbingan teknis wakil kepala sekolah tahun 2023 diikuti oleh seluruh wakil kepala bidang kurikulum di seluruh SMP negeri dan Swasta kabupaten Solok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wakil kepala sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam membantu kepala sekolah mengelola satuan pendidikan. Beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



c. Bimbingan Teknis Kepala Sekolah SMP

Kegiatan bimbingan teknis wakil kepala sekolah tahun 2023 diikuti oleh 73 orang kepala sekolah di seluruh SMP negeri dan Swasta kabupaten Solok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola satuan pendidikan. Beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pada bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dilakukan pada tahun 2023 berupa pembangunan dan rehab ruang kelas, pembangunan dan rehab Ruang TU/Kepsek/Guru, pembangunan dan rehab Laboratorium, Pembangunan dan rehab Utilitas Sekolah, pengadaan alat praktek, perlengkapan belajar, dan pengadaan meubel sekolah. Berikut beberapa dokumentasi terkait kegiatan Fisik di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2023:

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) yang dilaksanakan di Tahun 2023:



Pembangunan Laboratorium Sekolah



Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Sosialisasi PAUD HI

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Program Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif agar semakin meningkatkan layanan menuju PAUD berkualitas melalui berbagai strategi. Dalam hal ini tentunya termasuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan dengan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang di bentuk oleh pemerintah daerah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai salah satu anggota gugus tugas nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif berupaya untuk mendorong daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dalam pelaksanaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Selain itu, Direktorat PAUD bersama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota juga mendorong satuan PAUD agar dapat melaksanakan penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang terkoordinasi dengan seluruh unit di daerah yang termasuk dalam gugus tugas, sehingga satuan PAUD tersebut dapat memastikan pemenuhan layanan esensial pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Beberapa dokumentasi kegiatan Sosialisasi PAUD-HI kabupaten Solok tahun 2023:



b. Sosialisasi Transisi PAUD-SD

Transisi PAUD-SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Kesiapan bersekolah harus berangkat dari tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, di tingkatan kelas manapun. Sehingga, transisi PAUD-SD merupakan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2023. Berikut beberapa dokumentasi terkait kegiatan sosialisasi Transisi PAUD-SD:



c. Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD

Pada tahun 2023 bidang pembinaan PAUD telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023:



Pembangunan Sarana, Prasarana PAUD

5) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan juga menjadi salah satu kegiatan yang menjadi bagian kunci pencapaian dan meningkatkan angka

Harapan lama sekolah (HLS) di kabupaten Solok. Pada tahun 2023 sub kegiatan yang menjadi fokus bidang ini sebanyak 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023.



2.23 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah kemungkinan anak tersebut akan mungkin bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Adapun tujuan dari harapan lama sekolah yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:

$$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

- EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
- E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
- P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
- i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
- FK : Faktor koreksi.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah 13,9 Tahun dapat dilihat pada Tabel 3.23.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.23.1
Harapan Lama Sekolah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Harapan Lama Sekolah	13,9

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.23.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.23.2
Harapan Lama Sekolah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	13,9	13,55	97,48

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.23.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada tahun 2023 target Harapan Lama Sekolah dengan usia 13,9 Tahun dan terealisasi sebesar 13,55 tahun dengan capaian kinerja sebesar 97,48 %.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.23.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Harapan Lama Sekolah	13,04	13,05	13,30	13,55	100,07	96,66	97,08	97,48	15	90,33

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.23.3 dapat dilihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,04%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Harapan Lama Sekolah belum tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.23.4
Efisiensi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Tahun)	Realisasi (Rp)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Harapan Lama Sekolah	13,9	13,55	97,48	Program Pengelolaan Pendidikan	129.216.262.467	116.920.466.985	90,48
Rata-rata capaian			97,48	Total Anggaran	129.216.262.467	116.920.466.985	90,48

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Harapan Lama Sekolah nomi di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan mengacu pada kemudahan dan kesempatan bagi individu untuk mengakses dan memperoleh pendidikan. Ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh pendidikan, termasuk ketersediaan institusi pendidikan, akses fisik ke tempat belajar, biaya pendidikan, akses terhadap sumber daya pendidikan, dan faktor-faktor sosial, budaya, atau ekonomi lainnya

Dalam konteks global, aksesibilitas pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan kunci untuk memajukan diri secara sosial, ekonomi, dan pribadi. Ketika aksesibilitas pendidikan ditingkatkan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial dapat terwujud.

Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan sering melibatkan kebijakan publik, investasi dalam infrastruktur pendidikan, program beasiswa atau bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti diskriminasi, ketidaksetaraan gender, atau masalah aksesibilitas fisik bagi individu dengan disabilitas. Dengan meningkatnya aksesibilitas pendidikan, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, inklusif, dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2023 yakni:

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur, Sarana, Prasana dan Utilitas Pendidikan



Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar



Pembangunan Laboratorium SMP



Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

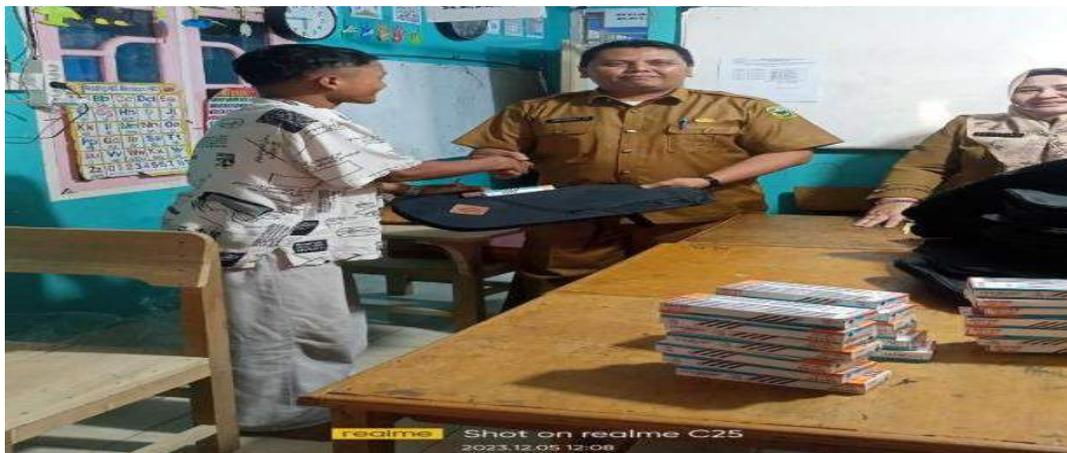


Pengadaan APE Luar PAUD

b. Bantuan Biaya Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka membiayai pendidikan mereka. Bantuan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, BAZNAS, organisasi nirlaba, yayasan, institusi pendidikan, atau bahkan individu lainnya.

Bantuan biaya pendidikan adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka membiayai pendidikan mereka. Bantuan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, organisasi nirlaba, yayasan, institusi pendidikan, atau bahkan individu lainnya.



Penyerahan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Warga Belajar PKBM



Penyerahan Perlengkapan Belajar bagi Siswa jenjang SMP



Penyerahan Bantuan Perlengkapan Belajar bagi Siswa PAUD

2. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merujuk pada standar atau tingkat keunggulan yang terkandung dalam proses pendidikan, hasil yang dicapai oleh siswa, dan lingkungan pembelajaran. Ini meliputi berbagai aspek, seperti:

- a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran maka dilakukan kegiatan rutin bagi tenaga pendidik (guru) agar mampu mengadopsi berbagai metode pengajaran yang inovatif dan efektif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)



Diklat Tenaga Pendidik dalam Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Jenjang Sekolah Dasar



Bimbingan Teknis Kepala Sekolah Jenjang SMP

b. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masa depan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



Bimtek Pengembangan Kurikulum bagi Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Solok



DIKLAT Wakil Kepala Sekolah SMP Kabupaten Solok



Sosialisasi Transisi PAUD-SD dan PAUD HI

3. Pencegahan Siswa DROPOUT

Program pencegahan siswa dropout adalah inisiatif yang dirancang untuk mencegah siswa dari keluar atau menghentikan pendidikan mereka sebelum menyelesaikannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat retensi siswa di sekolah dan memastikan bahwa mereka menyelesaikan pendidikan mereka dengan sukses. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah siswa dropout dari sekolah adalah

- a. Kegiatan Bimbingan Konseling

Program bimbingan dan konseling adalah inisiatif yang dirancang untuk memberikan dukungan emosional, sosial, akademis, dan karir kepada individu, terutama siswa di lingkungan pendidikan. Program ini memiliki beberapa tujuan, termasuk membantu individu mengatasi masalah pribadi atau akademis, mengembangkan keterampilan hidup, dan merencanakan jalur karir yang sesuai.

b. Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu

Beasiswa kurang mampu adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka membiayai pendidikan mereka. Bantuan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, BAZNAS, organisasi nirlaba, yayasan, institusi pendidikan, atau bahkan individu lainnya.

4. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya. Ini melibatkan pengakuan akan kebutuhan dan keunikan setiap individu, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan partisipasi semua siswa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Penyediaan Fasilitas/ Sarana Prasarana Penyandang Disabilitas
- b. Pelatihan Guru

5. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi merujuk pada penggunaan berbagai jenis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, aksesibilitas, dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, komunikasi, dan banyak lagi. Dalam konteks pendidikan, pemanfaatan teknologi mengacu pada penggunaan alat, perangkat lunak, platform, dan sumber daya digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan pemanfaatan teknologi di sekolah jenjang SD dan SMP:



Pemanfaatan Teknologi dalam Asesmen Nasional Siswa jenjang SD



Pemanfaatan Teknologi pada BIMTEK PMM berbasis Android

6. Kemitraan Sekolah dan Masyarakat

Kemitraan antara sekolah dan masyarakat adalah kolaborasi antara institusi pendidikan dengan berbagai pihak di luar lingkungan sekolah, termasuk orang tua, organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung perkembangan siswa secara holistik, dan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Kemitraan Orang Tua-Sekolah
- b. Kemitraan Sekolah dengan Organisasi Nirlaba
- c. Kemitraan Sekolah dengan Organisasi Pemerintah
- d. Kemitraan Sekolah dengan Pelaku Usaha/ Industri

2.24 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka RLS juga berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (Standar UNDP). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih 18 tahun, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

Cara menghitung Angka RLS suatu daerah dapat merujuk pada formula berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-/ yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah 7,95 Tahun dapat dilihat pada Tabel 3.24.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.24.1
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,95

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.24.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.24.2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,95	7,90	99,37

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.24.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada tahun 2023 target Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan usia 7,95 Tahun dan terealisasi sebesar 7,90 dengan capaian kinerja sebesar 99,37%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.24.3
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	7,87	7,89	7,90	100,25	100,12	99,87	99,37	8,10	97,53

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.24.3 dapat dilihat bahwa capaian Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,5%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.24.4

Efisiensi Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	7,90	99,37	Program Pengelolaan Pendidikan	129.216.262.467	116.920.466.985	90,48
Rata-rata capaian			99,37	Total Anggaran	129.216.262.467	116.920.466.985	90,48

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu::

1. Peningkatan Akses dan Partisipasi Sekolah

Peningkatan akses dan partisipasi sekolah merupakan usaha untuk memastikan bahwa lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau serta aktif terlibat dalam proses pendidikan. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, karena pendidikan yang berkualitas diakui sebagai kunci untuk mengatasi banyak tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan akses dan partisipasi agi masyarakat kurang mampu yang rentan dan berpotensi putus sekolah atau tidak sekolah yaitu **pertama**, pemberian beasiswa dan bantuan keuangan. Kegiatan ini sudah dilakukan pada setiap jenjang sekolah yakni PAUD, SD, dan SMP. **Kedua**, peningkatan akses fisik. Kegiatan akses fisik juga telah dilakukan pada jenjang SD dan SMP seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan dan rehabilitasi ruang UKS, laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, dan pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah seperti toilet, pagar sekolah, DAM, lapangan upacara, dan lapangan olahraga.



Penyerahan Perlengkapan Belajar Siswa Jenjang SMP



Penyerahan Perlengkapan Belajar Siswa Jenjang SD



Pembangunan Sarana (APE) bagi lembaga PAUD



Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD



Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jenjang SMP

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek dalam sistem pendidikan guna mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik dan memenuhi standar pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan:

Pertama, Pengembangan Kurikulum Pendidikan yang relevan. Merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat adalah langkah kunci. Kurikulum harus mencakup keterampilan yang diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial-emosional. Pada saat ini kurikulum yang sedang digunakan pada sistem pendidikan nasional yaitu Kurikulum Merdeka.

Selanjutnya, Peningkatan Kualitas Pengajaran. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka adalah hal yang penting. Ini bisa melibatkan program pelatihan, workshop, atau mentoring antar guru yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan metode pengajaran yang efektif dan mendorong inovasi dalam pengajaran.

Ketiga, Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dapat membuka pintu untuk pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Penggunaan perangkat lunak edukatif, aplikasi pembelajaran, atau platform pembelajaran daring dapat membantu memperluas akses terhadap materi pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa.

Dan terakhir, Evaluasi yang berkelanjutan. Menerapkan sistem pengukuran dan evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Dengan mengumpulkan data yang relevan, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.





Berbagai Rangkaian Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan

3. Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan

Dalam pengelolaan pendidikan formal, banyak permasalahan yang sering ditemui dilapangan. Dari sekian banyak masalah tersebut tentu perlu solusi yang bijaksana dari penyelenggara pendidikan di daerah. Salah satunya yaitu masih adanya anak yang putus sekolah bahkan yang tidak mau sekolah khususnya pada lembaga formal. Dalam hal ini solusinya tentu adanya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pemberdayaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi kuncinya.





Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar di Lembaga PKBM

4. Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi

Peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan sains adalah tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga kompetensi ini merupakan dasar yang penting dalam pembentukan individu yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berubah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kompetensi ini: **Pertama**, Pengembangan Kurikulum yang Terintegrasi: Merancang kurikulum yang terintegrasi untuk literasi, numerasi, dan sains dapat membantu siswa melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan pemahaman mereka secara holistik. Ini dapat mencakup pengembangan proyek-proyek atau kegiatan lintas mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk menerapkan keterampilan literasi, numerasi, dan sains dalam konteks yang beragam. **Kedua**, Pendekatan Pembelajaran Aktif: Menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah dapat membantu siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran literasi, numerasi, dan sains. Misalnya, menggunakan eksperimen ilmiah, studi kasus, atau diskusi kelompok untuk mempromosikan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. **Ketiga**,

Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran: Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses siswa terhadap sumber daya pendidikan, memungkinkan pembelajaran yang berbeda-beda, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Aplikasi, perangkat lunak, dan platform pembelajaran digital dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan literasi, numerasi, dan sains melalui interaktif, visual, dan pengalaman belajar yang berbasis teknologi.

Pencapaian kompetensi Literasi dan Numerasi ter dari hasil Asesmen Nasional setiap tahun dalam bentuk Rafor Pendidikan.



2.25 ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (umur 15 Th- 49 Th) per 1000 wanita.

Untuk mendapatkan TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Spesific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyak kelahiran setiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu seperti daftar dibawah ini.

Tabel. 3.25.1

ASFR (AGE SPESIFIC FERTILITY RATE) TAHUN 2023

No	Kelompok Umur Wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1	15 – 19	16.478	126	7,64
2	20 – 24	18.702	1416	75,71
3	25 – 29	15.094	2048	135,68
4	30 – 34	13.122	1565	119,26
5	35 – 39	14.424	816	56,57
6	40 – 44	14.475	216	14,92
7	45 – 49	12.704	8	0,62
	Total			410,4

Sumber data DPPKB&P3A, Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Solok adalah 2,55 dapat dilihat pada Tabel 3.25.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.25.2
Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rasio)
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,55

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.25.3 sebagai berikut:

Tabel. 3.25.3
Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Rasio)	Realisasi (Rasio)	Capaian (%)
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,55	2,05	119,52

Sumber DPPKB&P3A, Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.25.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai dimana pada Tahun 2023 target Angka Kelahiran Total (TFR) pada rasio 2,55 dan terealisasi pada rasio 2,05 dengan capaian kinerja sebesar 119,52%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.25.4
Perkembangan Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rasio)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Rasio)	Capaian (%)
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,8	2,31	2,12	2,05	95,81	87,83	119,39	119,52	2,30	110,78

Sumber DPPKB&P3A, Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.25.3 dapat dilihat bahwa capaian Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,13%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Angka Kelahiran Total (TFR) telah tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.25.5
Efisiensi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

IKU	Kinerja		Keuangan
-----	---------	--	----------

	Target (Rasio)	Realisasi (Rasio)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,55	2,05	119,52	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.829.073.748	2.375.346.080	83,96
				Program Pengendalian Penduduk	515.787.500	496.507.662	96,26
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS)	1.712.073.100	1.580.392.675	92,30
Rata-rata capaian			119,52	Total Anggaran	5.056.934.348	4.452.246.417	88,04
Tingkat Efisiensi: 11,96 %							

Pada Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 11,96 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.056.934.348 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.452.246.417.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Evaluasi dan Pembinaan laporan bulanan ASFR pada PKB/PLKB



Kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi Laporan ASFR pada PKB/PLKB pada Tanggal 6 Januari 2023 Hal ini berguna sebagai dasar penetapan TFR. Laporan ASFR/ jumlah Persalinan harus sama dengan jumlah persalinan di puskesmas setempat bertempat di Balai Penyuluh Kecamatan dengan sasaran kegiatan PKB/PLKB pada Kecamatan masing-masing.

Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan PKB/PLKB dalam menghimpun data .

2. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



Pelaksanaan Pelayanan KB

Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah pertambahan penduduk, membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sejahtera. dilaksanakan di Faskes di masing masing kecamatan diadakan setiap bulan dengan sasaran PUS (Pasangan usia Subur). Program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan mengatur jarak kelahiran mengurangi resiko kematian bayi.

3. Penyuluhan Tentang bahaya Pernikahan dini pada remaja



Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini pada remaja

Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini pada remaja merupakan isu penting karena berhubungan dengan kesakitan serta kematian ibu dan anak, terdapat hubungan yang kuat antara persalinan dan kelangsungan hidup ibu dan anak pada umumnya. Untuk itu penting diberikan penyuluhan tentang Reproduksi dan bahaya melahirkan diusia pada remaja.

Kegiatan ini Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini bertujuan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan usia

perkawinan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini, Mengatasi angka perceraian, meningkatkan kesehatan Reproduksi wanita. sasaran remaja dan ibu dilaksanakan pada kelompok masyarakat formal dan non formal. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulannya pada masing masing Kecamatan Balai Penyuluh yang berada Kabupaten Solok.

2.26 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan terhadap IPM laki –laki. IPG suatu ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia dalam mengungkapkan ketidakadilan pencapaian antara perempuan dan laki-laki, dengan komponen pengukurnya sama dengan pengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak/ekonomi.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Berkisar antara 0-100 persen, semakin tinggi angka IPG atau mendekati 100 dapat dikatakan semakin mendekati kesetaraan atau semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki laki dan perempuan dan apabila IPG diatas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan diatas laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender dapat diukur dengan formulasi komponen pembentuknya yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel. 3.26.1
Indikator Pengukur Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

No.	Indikator	Perhitungan Berdasarkan Jenis Kelamin	
		P	L
1.	Angka Harapan Hidup	71,11	67,15
2.	Rata Rata Lama Sekolah	7,87	7,90
3.	Harapan Lama Sekolah	13,92	12,61
4.	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	10,193	14,718

Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian

Berdasarkan data diatas didapatkan:

Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan

Dimana Angka Harapan Hidup Perempuan tahun 2023 sebesar 71.11 sedangkan laki-laki sebesar 67,15. Data menunjukkan Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi daripada AHH laki- laki.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki Laki dan Perempuan

Dimana angka Harapan Lama Sekolah perempuan tahun 2023 sebesar 13.92 sedangkan laki-laki sebesar 12.61 Data menunjukkan Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi daripada HLS laki-laki.

Angka Rata rata Lama Sekolah Laki dan Perempuan

Dimana Rata-rata Lama Sekolah perempuan tahun 2023 sebesar 7.87 sedangkan laki-laki sebesar 7.92. Data menunjukkan Rata-rata lama Sekolah Perempuan lebih rendah daripada Rata-rata Lama Sekolah laki-laki.

Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Dimana Pengeluaran Perkapita perempuan tahun 2023 sebesar 10,193 sedangkan laki-laki 14,718. Data menunjukkan Pengeluaran Perkapita Perempuan lebih rendah daripada Pengeluaran Perkapita laki-laki.

Untuk menentukan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kab. Solok terlebih dahulu dilakukan perhitungan mengukur Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Rasio IPM laki-laki. Perhitungan untuk IPM di tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

Tabel. 3.26.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Solok Tahun 2023

No	Wilayah	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-Laki
1	IPM Kab. Solok	70,02	72.72

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan (70,02) masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM laki-laki (72,02). Artinya masih terjadi ketimpangan pembangunan gender di Kabupaten Solok meskipun tidak terlalu signifikan.

Setelah dilakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka dapat dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Solok tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok adalah 96,48 dapat dilihat pada Tabel 3.26.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.26.3
Indeks Pembangunan Gender Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)
1	Indeks Pembangunan Gender	96,48

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.26.4 sebagai berikut:

Tabel. 3.26.4
Indeks Pembangunan Gender Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Gender	96,48	96,29	99,80

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.26.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,48 dan terealisasi sebesar 96,29 dengan capaian kinerja sebesar 99,80%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.26.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	96,18	96,19	96,19	96,29	100,45	99,80	99,80	99,80	96,76	99,51

Sumber: Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023

Berdasarkan Tabel. 3.26.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 sama dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Pembangunan Gender belum tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.26.6
Efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Gender

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pembangunan Gender	96,48	96,29	99,80	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	95.624.990	85.239.457	89,14
				Program Perlindungan Perempuan	619.178.690	426.892.427	69,94
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	37.067.002	36.437.002	93,30
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	123.972.616	114.391.304	92,27

				Program Perlindungan Khusus Anak	286.691.850	190.504.850	66,4 5
Rata-rata capaian			99,8 0	Total Anggaran	1.162.535.148	853.465.040	73,41

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Solok

Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG di Kabupaten Solok ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Bapelitbang Kab. Solok dengan sasaran kegiatan adalah Kelompok Pokja PUG (SKPD se Kab. Solok), Pemerintahan Kecamatan dan Organisasi Perempuan Kab. Solok.

Pengarusutamaan gender (PUG) hadir sebagai suatu strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan, laki-laki, serta kelompok inklusif sosial lainnya. Hal ini dilakukan demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dalam kebijakan dan program pembangunan.

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah Meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, menyamakan persepsi dan komitmen pemangku kebijakan dalam mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Kab. Solok.



Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten solok

2. Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Solok

Pelatihan PPRG di Kabupaten Solok ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 dan 15 Maret 2023 bertempat di Saung Batubatupang Koto Baru dengan sasaran kegiatan anggota Focal Point PUG Kabupaten Solok yang terdiri dari Kasubag Perencanaan SKPD se Kab. Solok yang diikuti oleh 26 SKPD.

Pengintegrasian PUG ke dalam siklus perencanaan di daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk baik perempuan maupun laki-laki.

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender, Memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan semua SKPD, Memberikan pengarahannya tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan supaya responsif gender, Memberikan panduan teknis cara menyusun RKA – SKPD dan GBS dengan menggunakan indikator kinerja yang responsif gender.



Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

3. Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

Pelatihan Industri Rumahan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Kantor Wali Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dengan sasaran kegiatan adalah perempuan produktif/ Ibu Rumah tangga dengan ekonomi lemah yang diikuti oleh sebanyak 30 orang perempuan di Nagari Guguak Sarai.

Pengembangan Industri rumahan ini berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Selain itu untuk menambah keterampilan dan kemampuan kaum perempuan di bidang usaha, agar mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan perempuan sebagai penggeraknya. Program pelatihan peningkatan keterampilan terhadap kelompok

ketahanan keluarga ini baru dilaksanakan pada tahun ini dimana pada sasarannya perempuan yang memiliki ekonomi lemah agar dapat menjadi pelaku usaha di kemudian hari.

Tujuan umum kegiatan ini dilaksanakan adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas.



Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan

4. Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Organisasi Perempuan Kabupaten Solok di Ruang Solok Nan Indah Arosuka

Pembinaan dan pelatihan terhadap organisasi perempuan Kabupaten Solok dilaksanakan di ruang pertemuan Solok Nan Indah Arosuka dengan sasaran kegiatan adalah Organisasi Dharmawanita Persatuan Kab. Solok.

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memberdayakan organisasi perempuan kabupaten solok sebagai mitra/perpanjangan tangan pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai aspek baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup perempuan itu sendiri dan keluarga.



Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Organisasi Perempuan Kabupaten Solok

5. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Kecamatan di Kabupaten Solok

Sosialisasi KLA tingkat Kecamatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di ruang pertemuan kantor camat lembang jaya dengan sasaran

kegiatan adalah Forkopimcam, wali nagari sekecamatan, kepala SLTA, SMP, SD se Kecamatan, KUA Kecamatan.

Pengembangan KLA di tingkat Kecamatan ini adalah untuk membangun membangun inisiatif Pemerintah Kecamatan dan Nagari bersama dengan masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan dan kelembagaan pembangunan yang peduli , sensitive dan memihak pada kepentingan terbaik anak dan menjamin terpenuhinya hak anak di kecamatan dan nagari dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kepedulian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada dalam memenuhi hak anak, untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak mellaui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan nagari dan Untuk memperkuat peran dan kemampuan pemerintah Kecamatan dan Nagari dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.



Sosialisasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Kecamatan

2.27 USIA HARAPAN HIDUP

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH merupakan salah satu dimensi dasar dalam membentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) selain pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Apabila ditemukan UHH yang rendah disuatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Beberapa penelitian menyatakan bahwa UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. BPS melaporkan UHH penduduk Indonesia saat lahir mencapai 72.13 tahun pada tahun 2023, angka tersebut meningkat 0.28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 71.85 tahun.

Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya UHH suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diukur dengan formulasi Expectation of life (E_0). Dimana data yang digunakan adalah:

3. Jumlah kematian penduduk antara usia x dan $x+1$

4. Penduduk yang bertahan hidup pada usia tepat x tahun

Constructing Life Table dapat dilihat pada Tabel. 3.dibawah ini:

Tabel. 3.27.1
Constructing Life table

x	l_x	d_x	q_x	L_x	T_x	e^o_x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	100.000	2.256	0.02256	98.109	7.324.402	73.24402
1	97.744	155	0.00158			
65+		21				

x = umur penduduk

q_x = peluang penduduk meninggal antara umur x dan $x+1$

l_x = penduduk yang bertahan hidup pada umur tepat x

d_x = jumlah kematian penduduk antara umur x dan $x+1$

L_x = Tahun kehidupan (years lived) antara umur x dan $x+1$

T_x = Tahun total kehidupan (total years lived) setelah umur tepat x

e^o_x = Harapan hidup (expectation of life) jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat x

Cara menghitung q_0 =

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} q_0 = \frac{2256}{100000} \implies = 0.02256$$

Cara Menghitung l_x , l_d dan q_x berikutnya

$$L_{x+1} = l_x * (1 - q_x) \implies l_1 = 100000 * (1 - 0.02256) = 97.744$$

Cara Menghitung L_x dan T_x

$$L_x = \frac{l_x + l_{x+1}}{2} L_0 = \frac{100000 + 97744}{2} = 98.109$$

$$T_x = \sum_{i=x}^w L_i = 7.324.402$$

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Usia Harapan Hidup Kabupaten Solok adalah 69,22 Tahun dapat dilihat pada Tabel 3.27.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.27.2
Usia Harapan Hidup Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)
1	Usia Harapan Hidup	69.22

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Usia Harapan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.27.3 sebagai berikut:

Tabel. 3.27.3
Usia Harapan Hidup Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Usia Harapan Hidup	69.22	72,31	104,46

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel. 3.27.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Usia Harapan Hidup sebesar 69,22 Tahun dan terealisasi sebesar 72,31 dengan capaian kinerja sebesar 104,46%.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.27.4
Perkembangan Usia Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Usia Harapan Hidup	68.58	68.79	69.19	72,31	100.11	100	100,26	104,46	69,87	103,49

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.27.3 dapat dilihat bahwa capaian Usia Harapan Hidup tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,2%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Usia Harapan Hidup telah tercapai.

Berdasarkan Tabel. 3.27.4 dapat dilihat bahwa Realisasi Usia Harapan Hidup tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) adalah 69,87 tahun maka capaian kinerja sebesar 103,49%.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.27.5
Efisiensi Indikator Usia Harapan Hidup

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Usia Harapan Hidup	69,22	72,31	104,46	Program penunjang urusan pemerintah	127.709.455.018	121.144.874.493,48	94.86

				han daerah kabupaten/kota			
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	72.829.352.961	60.255.008.686	82.73
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.182.963.103	1.051.064.422	88.85
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	467.110.750	390.592.500	83.62
Rata-rata capaian			104,46	Total Anggaran	202.586.211.832	183.231.542.101,48	90.45
Tingkat Efisiensi: 9,55%							

Pada indikator Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 9.55% dengan pagu sebesar Rp. 202.586.211.832,- dan terealisasi sebesar Rp.183.231.542.101,48.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi

Jumlah kematian bayi mengalami penurunan dari 64 orang atau sebesar 10.10/1.000 KH ditahun 2022 menjadi 51 orang atau sebesar 8.34/1.000 KH pada tahun 2023. Sedangkan jumlah kematian ibu mengalami peningkatan dari 5 orang atau sebesar 78.95/100.000 KH di tahun 2022 menjadi 7 orang atau sebesar

114,54/100.000 KH, namun 5 kematian dari 7 kematian ibu tersebut disebabkan oleh penyebab tidak langsung (1 TBC, 1 DM dan 3 Jantung) dan hanya 2 kematian yang disebabkan oleh penyebab langsung, hal ini mengkan bahwa penanganan komplikasi kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas sudah optimal.

Pilar-pilar dalam upaya penurunan AKI dan AKB ini tidak akan terwujud tanpa adanya kenvergensi, konsolidasi dan koordinasi kesehatan Ibu dan Bayi baik di tingkat pusat, propinsi, kab/kota sampai nagari dan jorong melalui lintas sektor dan program

Adanya jaminan persalinan untuk ibu hamil, bersalin dan bayi menjadi faktor salah satu menurunnya AKI dan AKB. Penurunan AKI dan AKB dapat dicapai dengan menciptakan calon ibu yang sehat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti mempersiapkan ibu layak hamil, terdeteksi komplikasi kehamilan sedini mungkin di pelayanan kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk bayi yang dilahirkan yang sudah dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Solok

Pelayanan rujukan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi yang mengalami komplikasi diperkuat dengan membangun jejaring RS, dimana RS vertikal dan propinsi melakukan pendampingan tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Selain itu untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mendorong dengan pemenuhan sarana dan parasaran ibu dan bayi di fasilitas kesehatan serta memperkuat sistem rujukan yang telah dilakukan di RS TNI/POLRI/Swasta

2. Menurunnya Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 15.14 pada tahun 2022 menjadi 12.10 pada tahun 2023, angka ini berdasarkan EPPGBM yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan. Penurunan angka prevalensi stunting ini menunjukkan adanya peningkatan status gizi pada Balita. Masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penanggulangan stunting di tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Aksi bergizi dengan sasaran Remaja Putri dengan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pemeriksaan Hb secara berkala dan edukasi Kesehatan seperti edukasi gizi seimbang
- b. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A dan obat cacing pada bayi dan balita.
- c. Pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala melalui kegiatan posyandu yang terintegrasi
- d. Program ASI Eksklusif dengan mendorong IMD (Inisiasi Menyusui Dini) melalui pemberian ASI jolong/kolustrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan juga mendorong ibu untuk melakukan penerusan pemberian ASI hingga usia anak berusia 23 Bulan dengan didampingi oleh pemberian MP-ASI
- e. Tatalaksana pada kasus gizi buruk dimana semua kasus gizi buruk yang ditemukan ditangani sesuai standar. Pada tahun 2023 kasus gizi buruk yang ditemukan sebanyak 7 orang dimana kasus tersebut disertai dengan adanya penyakit penyerta seperti TBC, pneumonia, kelainan bawaan, dll
- f. Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan pos gizi di setiap nagari. Pada tahun 2023 pos gizi berjumlah 30 dari 74 nagari. Pos gizi ini merupakan tempat atau rumah yang digunakan untuk mengadakan kegiatan pemulihan dan pendidikan gizi
- g. Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok yang di ikuti oleh Lintas Sektor antara lain, Dinas KB, yang terkait tentang perkembangan tumbuh kembang anak di PAUD, DPMN dengan

- pemberdayaan masyarakat, Dinas PUPR dengan pembangunan sarana sanitasi untuk penekanan penyakit berbasis lingkungan dan lain-lain
- h. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Berbasis masyarakat) serta Pertemuan 5 Pilar STBM bagi petugas sanitarian yang ada di Puskesmas.
 - i. Menyediakan Jaminan Kesehatan, Jaminan Persalinan, Bantuan dan Jaminan Sosial bagi keluarga miskin melalui program Beras masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Prgram Keluarga Harapan (PKH)
3. Menurunnya angka kesakitan
- Angka kesakitan/morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Capaian angka kesakitan Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah 16.66 mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 11.39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 13.79, hal ini mengkan bahwa angka kesakitan Kabupaten Solok mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan ini lebih ke upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit seperti
- a. Sureveilens dan respon terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - b. Melakukan deteksi dini dan penemuan kasus baik penyakit menuar (TB Paru, HIV/AIDS, Hepatitis, DBD, dll) dan penyakit tidak menular (Hipetensi, Diabetes Militus, Jiwa, Kanker, dll) pada kelompok beresiko
 - c. Pencegahan penyakit dan pengendalian faktor resiko dengan memberikan pelayanan imunisasi rutin, sosialisasi pelaksanaan imunisasi kepada orang tua dan Bulan Imunisasi Anak sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid
4. Peningkatan capaian SPM
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan skreening kesehatan dan kerjasama dengan fasyankes lainnya (Dokter Praktek Mandiri, Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin, dll) untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan BBL sesuai standar

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Usia harapan Hidup terdapat program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dengan advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat kecamatan, pada 14 kecamatan di kabupaten solok dilakukan kegiatan pengembangan dan penggandaan media gerakan masyarakat hidup sehat, penggerakan masyarakat di semua tatanan tentang edukasi, perilaku sehat, deteksi dini penyakit, lingkungan sehat, pangan sehat dan perbaikan gizi.



Kegiatan Launching Posyandu Prima Poskesri dalam Rangka Gebyar Kesehatan Masyarakat



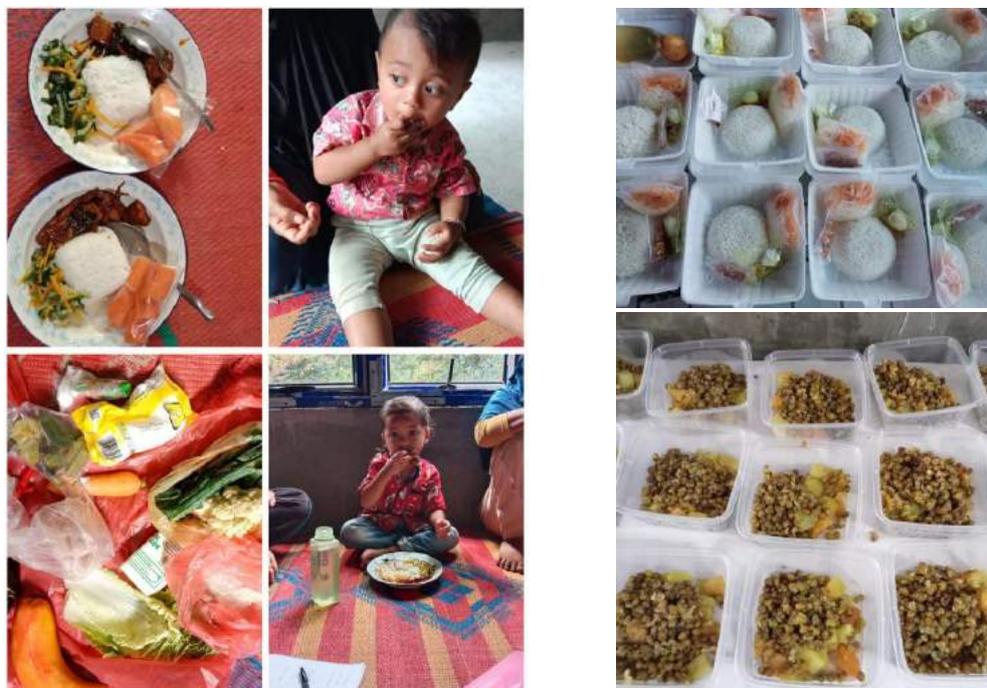
- b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal care) menjadi 6 (enam) kali, peningkatan

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan 6 (enam) tangan, pendampingan tim ahli (Sp.A dan SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal serta peningkatan program P4K (Program perencanaan dan pencegahan komplikasi)



Pemeriksaan Ibu Hamil ANC

- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK, sebanyak 767 ibu hamil dan pada balita gizi kurang, sebanyak 1.285 balita, yang diawali dengan pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan PMT serta pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk.



Pemberian PMT pada Balita Gizi Kurang



Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK

- d. Perbaiki sanitasi dengan melaksanakan advokasi dan koordinasi bersama 64 nagari untuk melakukan kegiatan percepatan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan salah satunya dengan pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat menggunakan jamban sehat serta penguatan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) meliputi stop BABS, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pengolahan air minum dan makanan dengan benar, pengolahan sampah rumah tangga, pengolahan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari.
- e. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan pelaksanaan kunjungan keluarga, melakukan updating data PIS-PK by name by address, melakukan intervensi lanjutan terhadap keluarga berisiko dan melakukan monitoring dan evaluasi terintegrasi seluruh program.
 - 2) Peningkatan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) melalui posyandu terintegrasi meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, skrining kesehatan usia produktif dan lansia serta pelayanan imunisasi dan KB
- f. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit meliputi deteksi dini faktor resiko, penemuan kasus aktif, pemantauan pengobatan penyakit menular serta penyelidikan dan respon kasus atau KLB (Kejadian Luar Biasa). Pada tahun 2023 terdapat 3 KLB (DBD, Campak, Keracunan Makanan) yang di tangani kurang dari 24 jam.
- g. Melakukan penyediaan tenaga dengan perjanjian tenaga dan program Nusantara sehat bagi tenaga yang tidak mencukupi dilapangan seperti dokter, tenaga promkes, sanitasi, nutrisionis dan lain-lain.

- h. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui reakreditasi puskesmas sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas terstandar. Pada tahun 2023 19 (Sembilan belas) puskesmas sudah reakreditasi dengan status 10 (sepuluh) puskesmas paripurna dan 9 (sembilan) puskesmas utama.
- i. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader kesehatan dengan pelatihan tenaga kesehatan/petugas puskesmas sesuai layanan kluster siklus hidup serta



Kegiatan Re-Akreditasi Puskesmas

workshop kader kesehatan. Pada tahun 2023 dilakukan 6 kali kegiatan Peningkatan kapasitas kader, pada sebanyak 240 orang. Dan pelatihan tenaga Petugas Kesehatan dilakukan 4 Kali pada 19 Puskesmas.



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan

- j. Menjalinkan kerjasama dengan wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan kabupaten solok. Kerjasama yang dilakukan adalah:
 - a. Kerjasama antara RS Arosuka dengan RSUD Solok Selatan mengenai tenaga Dokter Spesialis Rehab Medik, dengan RSUD M. Natsir terhadap Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis, dengan RSUP M. Djamil

Padang mengenai Layanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)

- b. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawah Lunto dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan kegiatan berupa antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dalam melayani pasien Jamkesmas.

2.28 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin (Headcount Index/P0) jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan hasil survey SPKKD (Survey Paket Komoditi Kebutuhan Dasar). GK yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2020 adalah Rp547.240 (kapita/bulan).

Persentase penduduk miskin dapat diukur dengan formulasi:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Dimana:

α adalah 0,1,2

z adalah garis kemiskinan

y_i adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

q adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n adalah jumlah penduduk

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Solok adalah 7,06% dapat dilihat pada Tabel 3.28.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.28.1
Persentase Penduduk Miskin Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Penduduk Miskin	7,06

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.28.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.28.2
Persentase Penduduk Miskin Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Penduduk Miskin	7,06	7,13	99,01

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 3.28.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,06% dan terealisasi sebesar 7,13% dengan capaian kinerja sebesar 99,01%.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.28.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Penduduk Miskin	7,81	8,01	7,12	7,13	94,45	94,05	102,59	99,01	6,31	87

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2024 Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel. 3.1.3 dapat dilihat bahwa capaian Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,58%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Persentase Penduduk Miskin belum tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.28.4
Efisiensi Indikator Persentase Penduduk Miskin

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Persentase Penduduk Miskin	7,06	7,13	99,01	Program Pemberdayaan Sosial	181.166.542	172.912.638	95,44
				Program Rehabilitasi Sosial	1.760.418.308	1.669.451.836	94,83
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	236.865.816	226.167.654	95,48
				Program Penanganan Bencana	316.478.586	304.636.817	96,26
				Program Pemberdayaan Sosial	181.166.542	172.912.638	95,44
Rata-rata capaian			99,01	Total Anggaran	2.676.095.794	2.546.081.583	95,14

Analisis tingkat efisiensi tidak dapat dijabarkan karena target pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota



Verifikasi DTKS dan Penetapan DTKS, PKH dan BPNT di Nagari Tahun 2023.



Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP- CBP) Tahun 2023 di Nagari Katialo

Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial



Penyerahan Bantuan berupa Sembako dari Sentra Terpadu Intan Soeweno (STIS) Kemensos Tahun 2023



Penyerahan Bantuan Kursi Roda di Nagari Tahun 2023

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota



Penyerahan Bantuan Sandang dan Sembako kepada Korban Bencana Tanah Longsor



Pendirian Tenda untuk Korban Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023



Pendirian Dapur Umum Untuk Korban Bencana Tahun 2023



Apel Siga Bencana

2.29 INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial

Formulasi indikator Untuk Teknik Penghitungan Indeks Desa Membangun sesuai dengan SOP Indeks Desa Membangun yang disusun oleh Kemendes PDTT bahwa, Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 – 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD Analytical Hierarchy Process (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari jumlah rata-rata Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

IDM = Indeks Desa Membangun

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks ketahanan Lingkungan

- Penentuan Status IDM

Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$

4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$

5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023, target Indeks Desa Membangun Kabupaten Solok adalah 0,683 dapat dilihat pada Tabel 3.29.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.29.1
Indeks Desa Membangun Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (indeks)
1	Indeks Desa Membangun	0,683

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.29.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.29.2
Indeks Desa Membangun Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)
1	Indeks Desa Membangun	0,683	0,72	105,44

Sumber: SK Kemendes PDTT diolah Dinas DPMN Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.29.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai, dimana pada Tahun 2023 target Indeks Desa Membangun sebesar 0,683 dan terealisasi sebesar 0,72 dengan capaian kinerja sebesar 105,44.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel. 3.29.3
Perkembangan Indeks Desa Membangun

No	Indikator Kinerja	Realisasi (indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Target (indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Desa Membangun	0,6542	0,672	0,691	0,72	NA	100	101,92	105,44	0,712	101,124

Sumber SK Kemendes PDTT diolah Dinas DPMN Kab. Solok

Berdasarkan Tabel. 3.29.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Desa Membangun tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar

3,52%. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Desa Membangun telah tercapai.

- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tabel. 3.29.4
Efisiensi Indikator Indeks Desa Membangun

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (indek)	Realisasi (indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Desa Membangun	0,683	0,72	105,44	Program Administrasi Pemerintahan Desa	53.949.000	46.219.150	85,67
Rata-rata capaian			105,44	Total Anggaran	53.949.000	46.219.150	85,67
Tingkat Efisiensi 14,33							

Pada Indikator Indeks Desa Membangun di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 14,33% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.949.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.219.150

- E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Solok Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Kegiatan dalam peningkatan skor IDM.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan



Musrenbang Tk. Nagari

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Tingkat nagari merupakan forum yang dilaksanakan di nagari yang bertujuan untuk menampung aspirasi Pembangunan yang akan dilakukan dinagari, yang kegiatan tersebut tidak terlepas dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari. Dimana pada acara musrenbang tersebut dihadiri oleh SKPD terkait, Wali Nagari dan delegasi dari jorong di nagari tersebut.

b. Fasilitasi Penyusunan Profil Nagari



Rapat Koordinasi tindak lanjut rekomendasi IDM bersama TA

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi setiap indikator penilaian yang ada di Indeks Desa Membangun, sehingga dalam penyusunan dan penentuan skor setiap indikator yang dinilai akan sama disetiap nagari.

c. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan



Rapat koordinasi bersama Nagari dalam rangka percepatan peningkatan status IDM tahun 2023

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dengan stakeholder terkait (Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll) dalam rangka penyamaan persepsi bagaimana pemenuhan pembangunan yang ada di nagari dalam rangka pencapaian peningkatan status IDM.

2. Peningkatan Skor IKS (Indeks Ketahanan Sosial)

- a. Pembangunan SPAM, Dinas PUPR membangun SPAM sebanyak 10 Lokasi dengan 4 Kecamatan, Kecamatan Junjung Sirih, KEc Bukit Sundi, Lembang Jaya dan Gunung Talang.



- b. Pembangunan Perpipaan Air Minum pada tahun 2023 Dinas PUPR sudah memberikan Akses Perpipaan Air Minum dan juga meteran sebanyak 620 Rumah Tangga.



- c. Penyelenggaraan PSU Perumahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, baik, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman. Pada Tahun 2023 ada 6 Lokasi Perumahan yang dilaksanakan pembangunan PSU pada bagian Jalan.

Aset PSU Perumahan harus diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, agar pembangunan fisik PSU dapat dilaksanakan. Ada 58 Perumahan yang ada di Kabupaten Solok, sedangkan yang baru menyerahkan aset PSU ada 11 Perumahan. Belum optimalnya penyerahan aset PSU ini menyebabkan tidak bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok memberikan dana APBD untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).



Survei Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), 2023

d. Pengurangan Sampah dari Sumbernya melalui BANK Sampah



Bank Sampah di Sekolah Dasar

Dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Solok dalam rangka pembentukan Bank Sampah yang bertujuan untuk mengurangi sampah yang ada di masyarakat yang tujuan akhirnya lingkungan di nagari dapat dijaga.

3. Peningkatan Skor IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi)

- a. Membangun Jalan, Pada tahun 2023 Dinas PUPR membangun Jalan sepanjang 1.372 m (termasuk juga jalan Lingkungan) dimana jalan lingkungan bukan kewenangan Dinas PUPR dan tidak menunjang untuk data base pada Dinas PUPR, meningkatkan jalan sepanjang 34.855 m, jalan yang direhab sepanjang 17.260 m dan jalan yang dipelihara sepanjang 297.820 m



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan skor keterbukaan wilayah dan skor kualitas jalan pada indikator yang dinilai untuk peningkatan status Indeks Desa Membangun.

- b. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan



Bapak Bupati Solok saat acara penyerahan bantuan fasilitas peralatan kepada UMKM dalam Upaya meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Solok Tahun 2023

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan skor keragaman produksi yang ada dinagari, dengan adanya bantuan fasilitas peralatan kepada UMKM yang akan bertujuan meningkatkan produksi tersebut.

- c. Pembentukan Lembaga ekonomi



MAN Khusus Penetapan Pengurus BUMDesma

Kegiatan tersebut dilakukan untuk peningkatan skor lembaga ekonomi yang ada di nagari, semakin banyak lembaga ekonomi yang ada di nagari maka skor IDM khususnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) semakin tinggi yang berdampak terhadap peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM) secara keseluruhan.

4. Peningkatan Skor IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan)



Apel Siaga Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dalam peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk skor tanggap bencana, dengan adanya apel siaga ini dilakukan simulasi untuk mitigasi bencana yang ada.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011;
9. DIPA Kementerian Perdagangan Nomor: SP DIPA – 090.02.4.080458 / 2023 tanggal 30 November 2022.
10. DIPA Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA - 018.08.4.089137/2023 tanggal 30 November 2022.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah di desentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan termasuk urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/ lembaga (K/L).

Dana dekonsentrasi pada hakikatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan.

Sementara Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten dan kota sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka

yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dan kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/ Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/ juknis) masing-masing program/ kegiatan yang dialokasikan.

Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/ kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Solok, khususnya pembangunan/ revitalisasi pasar harian, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana tugas pembantuan (APBN/TP) kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.

Program pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Solok Tahun 2023, diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok serta sesuai dengan salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata.

Pada Tahun 2023 Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 1 (satu) Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Adapun dasar hukum program tugas pembantuan tersebut adalah SP DIPA Nomor : SP DIPA – 090.02.4.080458/ 2023 tanggal 30 November 2022.

3.1.1 Target Kinerja

Pada tahun 2023 Kabupaten Solok mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk

Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Agropolitan Sungai Nanam dengan Total Dana sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang dipergunakan untuk sebagai berikut :

Anggaran Fisik : Rp. 2.795.782.000,-

Anggaran Pengawasan : Rp. 100.000.000,-

Anggaran Operasional : Rp. 104.218.000,-

3.1.2 Realisasi

Realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Fisik : Rp. 2.537.400.414,- (sesuai kontrak)

Realisasi Anggaran Pengawasan : Rp. 99.684.660,- (sesuai kontrak)

Realisasi Anggaran Operasional : Rp. 98.407.004,-

Honorarium Pengelola Keuangan (4 org x 7 bulan) : Rp. 46.970.000,-

Belanja Bahan (Mami Rapat) : Rp. 1.890.000,-

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa (1 org x 1 paket) : Rp. 680.000,-

Honorarium Pejabat Pengadaan/ Panitia Pokja ULP (3 org x 1 paket) : Rp. 4.560.000,-

Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan (1 org x 7 bulan) : Rp. 2.100.000,-

Belanja Perjadin Kegiatan Monitoring & Evaluasi Kegiatan : Rp. 48.018.000,-

Realisasi Total Anggaran secara keseluruhan : Rp. 2.735.492.078 (91,2%)

Realisasi Pembangunan Fisik : 100%

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Solok Tahun 2023 melalui DKUKMPP

No	Nomor DIPA	Nama Kegiatan	Perencanaan	Volume	Lokasi	Pelaksanaan						Sisa Anggaran	Ket
			Pagu			Fisik			Keuangan				
						Target	Realisasi	%	Target (kontrak)	Realisasi	%		
1.	SP DIPA- 090.02. 4.080458 / 2023	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Rp.3.000.000.000	1 Unit	Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti							DIPA tanggal 30 November 2022	
		Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Agropolitan Sungai Nanam											
		a. Konstruksi Fisik	Rp.2.795.782.000			100	100	%	Rp.2.537.400.414	Rp.2.537.400.414	100%	Rp.258.381.586	
		b. Konsultan Pengawasan	Rp.100.000.000			100	100	%	Rp.99.684.660	Rp.99.684.660	100%	Rp.315.340	
		c. Kegiatan Administrasi/ Penunjang	Rp.104.218.000			100	100	%	Rp.104.218.000	Rp.98.407.004	94%	Rp.5.810.996	
	TOTAL	Rp3.000.000.000			100	100	%		Rp2.735.492.078	91,2%	Rp264.507.922	Pelaksanaan Kontrak Fisik mulai tanggal 1 September s/d 29 Desember 2023	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok, khususnya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana tugas pembantuan (APBN/TP) kepada Kabupaten Solok melalui Dinas Pertanian.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pembangunan pertanian maka ditetapkan program yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha yang difokuskan dengan mengakomodir ikon-ikon sebagai produk unggulan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian melaksanakan 1 Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang terdiri dari 1 (satu) anak satuan kerja dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Adapun dasar hukum program tugas pembantuan tersebut Satker 08 Ditjen PSP Dasar Hukum SP DIPA Nomor : SP DIPA - 018.08.4.089137/2023 tanggal 30 November 2022.

3.2.1 Target Kinerja

Pada tahun 2023 program kementerian pertanian melalui dana APBN / Tugas Pembantuan yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mendukung peningkatan produksi sektor pangan, hortikultura, pekebunan dan peternakan, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan (Satker 08)
 - a. Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
 - Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Volume 1 Rekomendasi
 - Anggaran sebesar Rp.400.000.000,-.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Volume 1 Tahun
 - Anggaran sebesar Rp.13.000.000,-.
 - c. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida
 - Volume 1 Tahun
 - Anggaran sebesar Rp.51.069.000,-.

d. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

- Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian
- Volume 1 Kegiatan
- Anggaran sebesar Rp.28.035.000,-.

2. Program Dukungan Manajemen

A. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

- Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)
- Volume 1 Tahun
- Anggaran sebesar Rp.58.610.000,-.

3.2.2 Realisasi

Realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan Tahun 2023 dari Satker 08 Ditjen PSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mendapat anggaran sebesar Rp.551.064.000,- dengan realisasi sebagai berikut :

Pagu Anggaran	:	Rp. 551.064.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 538.912.505- (97,79 %)
Realisasi Fisik	:	100%

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Solok Tahun 2023 melalui Dinas

NO.	NOMOR DIPA	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN	PAGU	VOLUME	LOKASI	Pertanian FISIK			KEUANGAN			SISA ANGGARAN	KET.
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
-1		-4			-5								-13
01		Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan	400.000.000		Kabupaten Solok				400.000.000	390.311.600	97,58	10.788.400	Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08)
		Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	400.000.000						400.000.000	390.311.600	97,58	9.688.400	
		Keluaran (Output)											
		Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	400.000.000	1 rekomendasi	Kabupaten Solok	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100,00	400.000.000	390.311.600	97,58	9.688.400	
		Kegiatan Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian	13.000.000						13.000.000	12.880.000	99,08	120.000	
		Keluaran (Output)											
		Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	13.000.000	1 Tahun	Kabupaten Solok	1 Tahun	1 Tahun	100,00	13.000.000	12.880.000	99,08	120.000	
		Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	51.069.000						51.069.000	50.089.000	98,08	980.000	
		Keluaran (Output)											
		1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida	51.069.000	1 Tahun	Kabupaten Solok	1 Tahun	1 Tahun	100,00	51.069.000	50.089.000	98,08	980.000	
		Kegiatan: fasilitasi Pembiayaan Pertanian	28.035.000						28.035.000	28.035.000	100,00	-	
		Keluaran (Output)											
		1. Terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian	28.035.000	1 kegiatan	Kabupaten Solok	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	28.035.000	28.035.000	100,00	-	
		Program Dukungan Manajemen	58.610.000						58.960.000	58.420.000	99,08	540.000	
		Kegiatan: Dukungan manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen Prasarana dan sarana											
		Keluaran (Output)											
		1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)	58.610.000	1 tahun	Kabupaten Solok	1 tahun	1 tahun	100,00	58.960.000	58.420.000	99,08	540.000	

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala pada Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok yaitu pembangunan pasar Agropolitan Sungai Nanam. Akan tetapi Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Realisasi pupuk subsidi rendah dikarenakan banyaknya kios pupuk yang mengundurkan diri sebagai pengecer pupuk bersubsidi.
2. Mesin edisi yang berada di kios belum dapat digunakan secara maksimal untuk penyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan mesin edisi mengalami kerusakan dan perlu perbaikan yang cukup lama.
3. Pada pendistribusian kartu tani $\pm 70\%$ dari jumlah petani yang berada di Kabupaten Solok

3.4 Saran dan Tindaklanjut

Terhadap permasalahan dan kendala yang telah dimuat di atas, berikut kami sampaikan saran dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil, untuk itu diupayakan untuk pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat berikutnya di Kabupaten Solok.
2. Fasilitasi bantuan pupuk organik untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia.
3. Mengusulkan Bumrag sebagai kios/ pengecer pupuk bersubsidi.
4. Berkoordinasi dengan Bank Mandiri untuk perbaikan mesin edisi yang berada di kios pengecer.
5. Meningkatkan pendistribusian kartu tani dan melakukan sosialisasi ke kelompok tani tentang kartu tani.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan pendidikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pelayanan Pendidikan Dasar.
3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Untuk mencapai target pelayanan dasar SPM dibidang pendidikan di Kabupaten Solok, maka ditetapkan target indikator beserta batas waktu pencapaian SPM. Proses pengumpulan data setiap indikator dilakukan melalui:

1. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan usia yang diperoleh dari Data EMIS Kemenag bagi sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Jumlah penduduk di usia tertentu diperoleh berdasarkan data hasil konsolidasi kependudukan dan atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu (Tahun)
I	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Masyarakat Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2023
II	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu (Tahun)
III	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap indikator pencapaian memiliki target 100% jumlah yang akan dilayani pada tahun 2023.

4.1.3 Realisasi

Hasil Capaian Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2023			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	14587	13377	1210	91.70 %
2	Pendidikan Dasar	68853	69644	-791	100.00 %
3	Pendidikan Kesetaraan	1549	1475	74	95,22 %

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (%)	K e t
		Jumlah Total yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum terlayani		
I	Pendidikan Anak Usia Dini				88.76	
1.	Angka partisipasi sekolah	100	56.70	43.03	56.70	
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	36.93	36.09	0.03	99.92	
3.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	69.28	68.18	1.01	98.41	
4.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	14	7	7	50.00	
5.	Kecukupan formasi guru ASN	77	77	0	100	
6.	Indeks distribusi guru	77	77	0	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Penerimaan (%)	Ket
		Jumlah Total yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum terlayani		
7.	Proporsi PTK bersertifikat	77	77	0	100	
8.	Proporsi PTK penggerak	5	5	0	100	
9.	Pengalaman pelatihan guru	100	100	0	100	
	Total	556	505	51		
II	Pendidikan Dasar				95,10	
	Sekolah Dasar					
1.	Angka partisipasi kasar	45854	46643	-789	100	
2.	Angka partisipasi sekolah	100	99.42	0.58	99.42	
3.	Angka partisipasi murni	45854	44335	1519	96.69	
4.	Kemampuan literasi	58.12	71.01	-12.89	100	
5.	Kemampuan numerasi	42.68	53.83	-11.15	100	
6.	Perbedaan Skor Literasi	10.32	10.32	0	100	
7.	Perbedaan Skor numerasi	24.90	24.90	0	100	
8.	Indeks iklim keamanan	73.76	70.22	03.54	95.20	
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	72.05	69.56	02.49	96.54	
10.	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	0	
11.	Indeks distribusi guru	0	0	0	0	
12.	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	0	
13.	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	0	
14.	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0	
	Sekolah Menengah Pertama					
1.	Angka partisipasi kasar	100	106.89	-6.89	100	
2.	Angka partisipasi sekolah	100	94.08	0,27	94.08	
3.	Angka partisipasi murni	0	0	0	0	
4.	Kemampuan literasi	67.95	69.13	-1.18	100	
5.	Kemampuan numerasi	67.30	46.27	21.03	68.75	
6.	Perbedaan Skor Literasi	0	0	0	0	
7.	Perbedaan Skor numerasi	0	0	0	0	
8.	Indeks iklim keamanan	71.68	68.34	3.34	95.34	
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	68.72	66.51	2.21	96.78	
10.	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	0	
11.	Indeks distribusi guru	0	0	0	0	
12.	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	0	
13.	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	0	
14.	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (%)	Ket
		Jumlah Total yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum terlayani		
III	Pendidikan Kesetaraan				100	
1.	Angka partisipasi kasar	2109	0	2109	0	
2.	Angka partisipasi sekolah	18.35	18.35	0	100	
3.	Angka partisipasi murni	85919	0	85919	0	
4.	Kemampuan literasi	35	0	35	0	
5.	Kemampuan numerasi	18	0	18	0	
6.	Perbedaan Skor Literasi	18	0	18	0	
7.	Perbedaan Skor numerasi	0	0	0	0	
8.	Indeks iklim keamanan	18	0	18	0	
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0	0	0	0	
10.	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	0	
11.	Indeks distribusi guru	0	0	0	0	
12.	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	0	
13.	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	0	
14.	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0	

Data tersebut diperoleh dari aplikasi e-spm bangda kemendagri yang menunjukkan bahwa Capaian Penerima dan Mutu Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kab. Solok sudah maksimal, akan tetapi masih ada mutu layanan dasar yang masih ditutup karena pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

Form 1.E.1 Capaian Target Spm Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm (%) 2023	Capaian Spm (%) 2022
		Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	14.587	13.377	91,70	90,23	88,76	88,76	90,23	88
2	Pendidikan Dasar	68.853	69.644	101,15	98,12	95,10	95,10	98,12	100
3	Pendidikan Kesetaraan	1.042	1.042	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77

Form 1.E.3 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Pendidikan			Penerima Manfaat			Partisipasi Peserta Didik			Hasil Pencapaian SPM
		Satuan Pendidikan	Pendidik	Perlengkapan Dasar	Umur 5 - 6	Umur 7 - 15	Umur 7 - 15	Umur 5 - 6	Umur 7 - 15	Umur 7 - 15	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	376						91,7			
2	Pendidikan Dasar	437							100		
3	Pendidikan Kesetaraan	20								100	

Form 1.E.1 dan Form 1.E.3 merupakan Lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menunjukkan bahwa Capaian Mutu Pendidikan dan Penerima Manfaat belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	985,771,459,439
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	466,027,118,526
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	240,305,433,600
4	APBD	240,305,433,600
	APBD Murni	500,000,000
	APBD DAU	20,105,000,000
	APBD DAK Fisik	33,908,078,600
	APBD DAK Non Fisik	185,792,355,000

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Disdikpora;
2. 1 (satu) orang Sekretaris Disdikpora;
3. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan PAUD;

4. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan SD;
5. 1 (satu) orang Kabid Pembinaan SMP;
6. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang PAUD;
7. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang SD;
8. 3 (satu) orang Kasi pada Bidang SMP;
9. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
10. 1 (satu) orang Operator Bidang PAUD;
11. 1 (satu) orang Operator Bidang SD;
12. 1 (satu) orang Operator Bidang SMP;
13. 1 (satu) orang Operator di subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan :

- a. Pengumpulan Data terkait Indikator Pendidikan terdapat beberapa hambatan karena data indikator harus diperoleh dari berbagai aplikasi seperti Disdukcapil, Dapodik, EMIS, dan Rafor Pendidikan.
- b. Terdapat kesulitan dalam memperoleh data jumlah anak usia sekolah diluar Kabupaten Solok.
- c. Akses terhadap porta ATS Kemendikbud sering error.
- d. Waktu rilis Data konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Data Dapodik/ Emis tidak bersamaan.
- e. Perhitungan Kebutuhan setiap indikator penerapan SPM juga sangat tergantung terhadap ketersediaan data, apabila Data yang diperoleh Valid maka Perhitungan Kebutuhan dapat dilakukan secara optimal.
- f. Anggaran SPM yang cukup terbatas.
- g. Seluruh kegiatan terkait SPM sebaiknya di akomodir oleh Bappeda dan BKD.

- h. Sebagian layanan dasar tidak tersedia data yang konkrit dari Rafor Pendidikan karen belum semua layanan pendidikan mendapatkan Asesmen Nasional khususnya kesetaraan.

Solusi :

- a. Melakukan koordinasi dan penelusuran data anak usia sekolah ke masing-masing nagari;
- b. Melakukan koordinasi dan penelusuran data terpilah penduduk usia sekolah ke Disdikdkcapil.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar pada urusan kesehatan antara lain:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Dasar
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia ≥ 60 tahun keatas	Setiap warga Negara Indonesia usia ≥ 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Dasar
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11.	Pelayanan kesehatan orang TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang Terduga Tuberkulosis	Setiap orang Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Tubu manusia (Virus HIV)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunaan apza, dan warga binaan lembaga pasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunaan apza, dan warga binaan lembaga pasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Satu Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	Satu Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Satu Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %	Satu Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Satu Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Satu Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Satu Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	Satu Tahun

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap indikator pencapaian memiliki target 100% jumlah yang akan dilayani pada tahun 2023.

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2023			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1549	1549	0	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1549	1549	0	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1549	1475	74	95,22 %
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	7246	7246	0	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13178	13178	0	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	47855	33227	14628	69.43%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7468	7468	0	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	17371	6130	11241	35.29%
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	406	406	0	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	197	197	0	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	1498	1099	399	73.36%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	2230	2230	0	100%

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencaipaan (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
I	Pelayanan kesehatan ibuhamil				
1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	154	154	0	100 %
2.	Tablet Tambah Darah	1549	1549	0	100 %
3.	Alat deteksi resiko ibu hamil, Test kehamilan	1549	1549	0	100 %
4.	Alat deteksi resiko ibu hamil, Pemeriksaan HB	1549	1549	0	100 %
5.	Alat deteksi resiko ibu hamil, Pemeriksaan Golongan Darah	1549	1549	0	100 %
6.	Alat deteksi resiko ibu hamil, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	1549	1549	0	100 %
7.	Kartu ibu/rekam medis ibu	1549	1549	0	100 %
8.	Buku KIA	1549	1549	0	100 %
9.	Dokter/Dokter spesialis kebidanan	32	32	0	100 %
10.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
11.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
12.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	1549	1549	0	100 %
II	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				
1.	Formulir Partograf	1549	1549	0	100 %
2.	Kartu ibu (rekam medis)	1549	1549	0	100 %
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1549	1549	0	100 %
4.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	32	32	0	100 %
5.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
III	Pelayanan kesehatan bayi barulahir				
1.	Vaksin Hepatitis B0	1549	1549	0	100 %
2.	Vitamin K1 injeksi	1549	1549	0	100 %
3.	Salep/tetes mata antibiotik	1549	1549	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
4.	Formulir bayi baru lahir	1549	1549	0	100 %
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	1549	1549	0	100 %
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1549	1549	0	100 %
7.	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	32	32	0	100 %
8.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
IV	Pelayanan Kesehatan Anak Balita				
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	7246	7246	0	100 %
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	7246	7246	0	100 %
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	7246	7246	0	100 %
4.	Vitamin A Biru	7246	7246	0	100 %
5.	Vitamin A Merah	7246	7246	0	100 %
6.	Vaksin imunisasi dasar: HBO	7246	7246	0	100 %
7.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	377	377	0	100 %
8.	Vaksin imunisasi dasar: Polio	755	755	0	100 %
9.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	1509	1509	0	100 %
10.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	1509	1509	0	100 %
11.	Vaksin imunisasi dasar: Campak	755	755	0	100 %
12.	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	755	755	0	100 %
13.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	1509	1509	0	100 %
14.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	755	755	0	100 %
15.	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	755	755	0	100 %
16.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	7246	7246	0	100 %
17.	Peralatan Anafilaktik	7246	7246	0	100 %
18.	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	0	100 %
19.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
20.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
21.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
22.	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	3090	3090	0	100 %
22.	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	0	0	0	0 %
V	Pelayanan kesehatan padausia pendidikan dasar				
1.	Buku raport kesehatanku	13178	13178	0	100 %
2.	Buku pemantauan kesehatan	13178	13178	0	100 %
3.	Kuesioner skrining kesehatan	13178	13178	0	100 %
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	13178	13178	0	100 %
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	13178	13178	0	100 %
6.	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	51	53	0	100 %
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
9.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	0	100 %
10.	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	20	20	0	100 %
11.	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	3090	3090	0	100 %
11.	Tenaga non kesehatan : Guru	0	0	0	0 %
VI	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38	38	0	100 %
2.	Alat ukur berat badan	19	19	0	100 %
3.	Alat : Alat ukur tinggi badan	19	19	0	100 %
4.	Alat : Alat ukur lingkar perut	19	19	0	100 %
5.	Alat : Tensimeter	19	19	0	100 %
6.	Alat : Glukometer	19	19	0	100 %
7.	Alat : Tes strip gula darah	47855	47855	0	100 %
8.	Alat : Lancet	47855	47855	0	100 %
9.	Alat : Kapas alkohol	47855	47855	0	100 %
10.	Alat : KIT IVA Tes	47855	47855	0	100 %
11.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi	19	19	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencaipaan (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				
12.	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	0	100 %
13.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
14.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
15.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	0	100 %
16.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100 %
17.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	3090	3090	0	100 %
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
1.	Strip Uji pemeriksaan kadar gula dan kolesterol	7468	7468	0	100 %
2.	Instrument GDS, AMT, ADL, dan P3G	7468	7468	0	100 %
3.	Buku Kesehatan Lansia	7468	7468	0	100 %
4.	Dokter	32	32	0	100 %
5.	Bidan	115	115	0	100 %
6.	Perawat	134	134	0	100 %
7.	Ahli gizi	32	32	0	100 %
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100 %
9.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3090	3090	0	100 %
VIII	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi				
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19	19	0	100 %
2.	Tensimeter	19	19	0	100 %
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	19	19	0	100 %
4.	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	0	100 %
5.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
6.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100 %
8.	Obat Hipertensi	17371	17371	0	100 %
IX	Pelayanan kesehatan penderitadiabetes melitus				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencapaian (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
1.	Alat : Glukometer	498	498	0	100 %
2.	Alat : Strip Tes Gula Darah	498	498	0	100 %
3.	Alat : Kapas Alkohol	498	498	0	100 %
4.	Alat : Lancet	498	498	0	100 %
5.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	498	498	0	100 %
6.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38	38	0	100 %
7.	Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	0	100 %
8.	Tenaga kesehatan : Bidan	115	115	0	100 %
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
10.	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	0	100 %
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100 %
12.	Obat Diabetes Melitus	498	498	0	100 %
X	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa				
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	19	19	0	100 %
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	19	19	0	100 %
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	19	19	0	100 %
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	19	19	0	100 %
5.	Tenaga kesehatan : Dokter	19	19	0	100 %
6.	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	19	19	0	100 %
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	19	19	0	100 %
XI	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB				
1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	19	19	0	100 %
2.	Reagen Zn TB	10	10	0	100 %
3.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	200	200	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Total Pencaipaan (Persen)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1800	18000	0	100 %
5.	Catridge tes cepat molekuler	1319	1319	0	100 %
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	19	19	0	100 %
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19	19	0	100 %
8.	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	34	34	0	100 %
9.	Tenaga kesehatan : Perawat	134	134	0	100 %
10.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	19	19	0	100 %
11.	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	1	1	0	100 %
12.	Tenaga kesehatan masyarakat	20	20	0	100 %
13.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	3090	3090	0	100 %
XII	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV				
1.	Media KIE	19	19	0	100 %
2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	2230	2230	0	100 %
3.	Handschoen, alkohon swab, plester, jarum steril, jarum spruit	2230	2230	0	100 %
4.	ATK	2230	2230	0	100 %
5.	Dokter	34	34	0	100 %
6.	Bidan	134	134	0	100 %
7.	Perawat	115	115	0	100 %
8.	ATLM	19	19	0	100 %
9.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	0	100 %
10.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3090	3090	0	100 %

Form 2.E.2 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%) 2023	Capaian SPM (%) 2022
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.195	6.195	1000%	100%	100%	100%	100%	98%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.195	6.180	99,76%	100%	100%	100%	100%	93%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.195	6.185	99,84%	100%	100%	100%	100%	93%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	28.982	28.982	100%	100%	100%	100%	100%	107%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	52.713	52.713	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	191.421	159.040	83,08%	100%	100%	100%	86%	99%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	29.870	29.870	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%) 2023	Capaian SPM (%) 2022
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.485	49.728	71,57%	100%	100%	100%	77%	60%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.992	1.992	100%	100%	100%	100%	100%	99%
10	Persentase Odgj Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	788	788	100%	100%	100%	100%	100%	97%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.990	5.277	88,10%	100%	100%	100%	90%	101%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	8.918	8.918	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. SOLOK	985,771,459,439
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	202,586,211,832
3	Alokasi anggaran penerapan SPM Pada Satker PD	5,992,571,512
4	APBD	5,992,571,512
	APBD DAU	358,958,974
	APBD DAK NON FISIK	5,633,612,538

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Kepala Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kabid Kesmas pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kabid P2P pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasi Kesra Gizi pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasi Promosi Kesehatan Gizi pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasi PTM Jiwa Napza pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasi Pelayanan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan.
2. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta sarana prasarana alat kesehatan di Lingkungan Kabupaten Solok mulai dalam proses pembenahan sehingga sesuai dengan standar.
3. Tingginya komitmen dari segenap jajaran kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (19 Puskesmas) sudah terakreditasi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai standar.
5. Sudah keluarnya Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Nomor 6 tahun 2018.

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran capaian capaian program (Pusdatin) terlalu tinggi untuk beberapa Indikator SPM.
2. Distribusi/penempatan tenaga kesehatan yang belum merata sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapat akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil.
3. Masih terdapatnya kondisi sarana (bangunan) dan parsarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai (belum sesuai standar).
4. Anggaran untuk mendukung capaian SPM sebagian besar didukung oleh DAK Non Fisik akan tetapi penggunaan DAK Non Fisik tersebut harus berdasarkan program prioritas yang diatur oleh Kemenkes RI (tidak berdasarkan kebutuhan daerah) sehingga masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir.
5. Karena keterbatasan anggaran pendukung SPM dari DAU maka pembiayaan SPM masih terfokus untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga anggaran untuk pemenuhan sarana, prasarana dan pemeliharaan alat kesehatan sebagai pendukung capaian SPM masih kurang.
6. Kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dalam mendukung capaian SPM masih kurang karena kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitas belum memadai.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat usia produktif untuk melakukan skrining kesehatan.
8. Belum optimalnya komitmen dan kerjasama dengan FKTP lainnya yang ada di kabupaten Solok (Klinik Swasta, Dokter Praktek Mandiri dan Bidan

Praktek Mandiri) dan pihak lain (Polres, KPPN, BPTP, Balibu, PT. Aqua dan Panti Andam Dewi) terkait pelayanan kesehatan terutama deteksi dini penyakit menular dan tidak menular berupa skrining kesehatan terutama pada kelompok umur beresiko.

9. Dalam pelaksanaan kegiatan SPM baik anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Maupun DAU secara fisik sudah berjalan optimal akan tetapi realisasi uang tidak maksimal karena beberapa hal : - standar satuan biaya daerah dibawah RK DAK (uang harian dan transport) - kebijakan pimpinan kegiatan yang awalnya akan dilaksanakan diluar kota menjadi di dalam kota (biaya lebih efisien) - terdapat kegiatan (pelatihan) tidak dapat dilaksanakan karena terdapat keterbatasan sumber daya BAPELKES - Terdapat menu (insentif nakes non ASN) yang baru boleh dibayarkan di pertengahan tahun karna menunggu Juknis, sehingga terdapat sisa anggaran yang cukup besar.

Strategi pemecahan solusi masalah :

1. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dengan advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat di tingkat kecamatan, pengembangan dan penggandaan media gerakan masyarakat hidup sehat, penggerakan masyarakat di semua tatanan tentang edukasi, perilaku sehat, deteksi dini penyakit, lingkungan sehat, pangan sehat dan perbaikan gizi.
2. Membuat ketetapan/komitmen dengan Kepala daerah terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan yang menyangkut skreening deteksi terhadap orang beresiko terutama penyakit menular (TB Paru dan HIV) dan penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Militus) serta pengadaan Bahan Medis Pakai Habis (BMHP) terkait kegiatan skrining tersebut.
3. Peningkatan SDMK melalui on job training atau refreasing penanggung jawab program dan pemenuhan SDMK melalui rekrutmen (PPPK) dan permintaan tenaga melalui Program Nusantara Sehat.
4. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok.
5. Penguatan sistem rujukan baik vertikal maupun horizontal dengan Sistem Rujukan Terpadu (Sisrute).

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukkan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	<p>Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:</p> <p>a. Keruh : air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.</p> <p>b. Berwarna : air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan dan kecokelatan atau warna lainnya.</p> <p>c. Berasa : air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.</p> <p>d. Berbusa : air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.</p> <p>e. Berbau : air minum yang berbau jika dicium. Airnya berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.</p> <p>Parameter tersebut di atas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Seseñas.</p>

b. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi)

1. Air Limbah Permukiman

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

2. Pengelolaan Sampah

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Adapun jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang bagi pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum

		Sehari- hari
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 serta Peraturan K/L terkait tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100%.

Tahapan pengumpulan data dilakukan oleh staf bidang Cipta Karya, data target berupa jumlah KK per Nagari se-Kabupaten Solok Tahun 2023. Data target diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023 (KK)	Batas Waktu (2023)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	100%	1 Tahun
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	1 Tahun

Target pelayanan untuk semua penduduk Kabupaten Solok tahun 2023 yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Nagari. Dimana jumlah penduduk dari 14 kecamatan didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Setiap penduduk Kabupaten Solok berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

4.3.3 Realisasi

Hasil Capaian Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun 2023			
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	140,184	140,184	0	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	126,228	126,228	0	100 %

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Mutu Barang			Total Pencapaian (Per sen)
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari					
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	35046	35046	0	100 %
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	35046	35046	0	100 %
3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	63793	63793	0	100 %
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	63793	63793	0	100 %
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	41276	41276	0	100 %
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	41276	41276	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Mutu Barang			Total Pencapaian (Per sen)
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	41276	41276	0	100 %
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	800	800	0	100 %
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	800	800	0	100 %

Form 3.E.3 Rekapitulasi Layanan Air Minum

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Di Kabupaten	Realisasi			
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%) 2023	Persentase Capaian (%) 2022
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	140,184	140,184	0	100%	99,95%

Form 3.E.4 Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Di Kabupaten	Realisasi			
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%) 2023	Persentase Capaian (%) 2022
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	126,228	126,228	0	100%	93,26%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok pada Dinas

Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 985,771,459,439,-

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala PU PR;
2. 1 (satu) orang Sekretaris PU PR;
3. 1 (satu) orang Kabid Cipta Karya;
4. 1 (satu) orang Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
5. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
6. Diana Syafriani, S. Tr. T;
7. Indra Supandi.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pemenuhan pencapaian target SPM Dinas PUPR Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Solok di antaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data SPM Air Minum dan Limbah terdapat kesulitan dalam mencari data jumlah rumah di kabupaten solok, karena satuan yang diminta adalah rumah.
2. Perhitungan kebutuhan indikator SPM Air Minum dan Limbah dipengaruhi oleh ketersediaan data jumlah rumah, termasuk rumah yang dijadikan target pemenuhan.
3. Perencanaan target rumah masyarakat Kabupaten Solok terkait pemenuhan SPM Air Minum dan Limbah sebaiknya di maksimalkan oleh Bapelitbang, BKD, Dinas Sosial dan DLH terhadap rencana sasaran pelayanan kebutuhan air bersih dan pengelolaan limbah rumah masyarakat.
4. Belum maksimalnya anggaran SPM Air Minum dan Limbah untuk penyediaan sarana fisik yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR, perlunya diakomodir penganggaran oleh Bapelitbang dan BKD.

5. Belum maksimalnya pelaksanaan SPM Air Minum dan Limbah karena anggaran yang terbatas.

Dari beberapa permasalahan yang dilalui, dapat disarankan solusi, yaitu tersedianya data jumlah rumah di kabupaten solok yang valid per tiap tahunnya pada OPD pengampu data terkait, agar SPM Air Minum Dan Limbah terpenuhi merata dan tepat sasaran pada masyarakat Kabupaten Solok

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pada saat masa pasca Bencana
- Surat penetapan bencana dari Bupati
- Dampak bencana di Daerah Administrasi Kabupaten

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023 (KK)	Batas Waktu (2023)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	1 Tahun
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan	100%	1 Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023 (KK)	Batas Waktu (2023)
	Pemerintah Daerah Kabupaten	rumah yang layak huni		

4.4.3 Realisasi

Hasil Capaian Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase (%)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	6	6	-	100%
II	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	1	1	-	100%

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				100 %
1.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %
2.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	4	4	0	100 %
3.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Barang			Capaian
			Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
	4.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100 %
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah					100 %
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100 %
	2.	Subsidi Uang Sewa	0	0	0	100 %
	3.	Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	100 %

Form 4.E.2 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Target Pelayanan Spm Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Realisasi			
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%) 2023	Persentase Capaian (%) 2022
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	6	6	0	100	100
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-	-	-	100	100

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	985,771,459,439
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat daerah	6,473,006,101
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	249,300,700
4	APBD	249,300,700

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Kepala DPRKPP;
- 1 (satu) orang Sekretaris DPRKPP;
- 1 (satu) orang Kabid Perumahan;
- 2 (satu) orang Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- 1 (satu) orang Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
- 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
- 4 orang operator di DPRKPP.

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pemenuhan pencapaian target SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Solok di antaranya sebagai berikut :

1. Tidak semua rumah yang terdampak bencana yang bisa dibantu, yang disebabkan oleh kategori minimum rumah yang terdampak bencana yang dapat dibantu.
2. Masih terdapat permasalahan tanah yang belum dimiliki oleh korban terdampak

bencana.

3. Masih terjadinya keterlambatan pengiriman barang oleh toko bangunan.

Dari beberapa permasalahan yang dilalui, dapat disarankan solusi, yaitu:

1. Merevisi regulasi kategori minimum rumah yang terdampak bencana yang dapat dibantu.
2. Mendata masyarakat yang masih terdapat permasalahan tanah.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
I	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
IV	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok yaitu mencakup Standar Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jenis Pelayanan Dasar yang meliputi :

- I. Kategori pencapaian Trantibum yang terdiri dari Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum.
- II. Kategori Pencapaian Kebencanaan yang terdiri dari :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- III. Kategori Pencapaian Damkar yang terdiri dari Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	2023
II	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	2023
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	2023
IV	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2023
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	2023

4.5.3 Realisasi

Hasil Capaian Dalam mutu pelayanan dasar daerah wajib menguraikan mengenai jenis layanan dasar yang harus dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan pemerintahan Kabupaten.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persentase(%)
I	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	184	184	-	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	Persen tase(%)
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	402,295	402,295	-	100
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	142	142	-	100
IV	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,688	1,688	-	100
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50	50	-	100

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Ca Pai an
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	1	1	0	100
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	9	9	0	100
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	2,720	2,720	0	100
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	0	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Ca Pai an
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	3	3	0	100
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	0	100
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	4	4	0	100
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	402,295	402,295	0	100
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	402,295	402,295	0	100
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	80	80	0	100
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	125	125	0	100
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	142	142	0	100
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	0	100
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1,688	1,688	0	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Ca Pai an
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	0	100
4.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	106	106	0	100
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
I	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/ redkar)	50	50	0	100
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman)	1	1	0	100
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	4	4	0	100
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	60	60	0	100
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	1	0	100
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	20	20	0	100

Form 5.E.1 Capaian Target Capaian Spm Sub Urusan Trantibum

No.	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda / Perkada Sesuai Mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM (%) 2022
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada Yang Sesuai Mutu Layanan Dasar	Ca Pai an (%)	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Ca Pai an 2023	
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	24	24	100%	1	1	100	100
2.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	1	100%				

Form 5.E.1 Capaian Target SPM (Rekapan)

No.	Tahun	Total Persentase (%) Capaian Spm Kebakaran (Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran)	Jumlah Operasi Non Kebakaran	Korban Jiwa				Jumlah Taksiran Aset	
				Jumlah Korban Jiwa Yang Berhasil Diselamatkan	Jumlah Korban Meninggal Dunia	Jumlah Korban Mengalami Luka Bakar	Jumlah Korban Mengalami Luka Fisik Lainnya	Jumlah Taksiran Aset Yang Berhasil Diselamatkan	Jumlah Taksiran Kerugian Aset
1	2023	100	95	185	1	-	-	77.600.000	19.443.500.000
2	2022	100	59	338	1	2	0	2.990.000.000	235.000

Form 5.E.1 Penentuan Bobot Tertimbang (Bt) Pada Spm Sub-Urusan Bencana

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Tahun Berjalan	Koefisien Sub Kegiatan	Koefisien Kegiatan	Koefisien Penimbangan	Bobot Tertimbang (Bt) Tahun Berjalan (%)	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	1	0,40	0,17	0,068	6,80%
		2	Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	1	0,60	0,17	0,102	10,20%
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1	0,10	0,50	0,05	5,00%
		4	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	1	0,10	0,50	0,05	5,00%
		5	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi	1	0,20	0,50	0,1	10,00%
		6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	0,20	0,50	0,1	10,00%
		7	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	0,20	0,50	0,1	10,00%
		8	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	0,20	0,50	0,1	10,00%
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi	9	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	0,30	0,33	0,099	9,90%
		10	Respon Cepat Darurat Bencana	1	0,30	0,33	0,099	9,90%
		11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	0,10	0,33	0,033	3,30%
		12	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	1	0,30	0,33	0,099	9,90%
Jumlah				3	1	1	100,00%	

Form 5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan SPM Sub-Urusan Bencana

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bobot Tertimbang (Bt)	Progres Kinerja Berjalan (%)	Kinerja Per Layanan Tahun 2023 (%)	Kinerja Spm Sub Urusan Bencana Tahun 2023 (%)	Kinerja Spm Tahun 2023 (%)	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	0,068	100%	100%	100%	100%
		2	Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	0,102	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0,05	100%	100%	100%	100%
		4	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	0,05	100%	100%	100%	100%
		5	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi	0,1	100%	100%	100%	100%
		6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,1	100%	100%	100%	100%
		7	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,1	100%	100%	100%	100%
		8	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,1	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi	9	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0,099	100%	100%	100%	100%
		10	Respon Cepat Darurat Bencana	0,099	100%	100%	100%	100%
		11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0,033	100%	100%	100%	100%
		12	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	0,099	100%	100%	100%	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Di dalam Alokasi anggaran menggambarkan alokasi anggaran bidang urusan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Solok	985,771,459,439
2	Alokasi anggaran satker PD	3,170,969,946
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	
	a. Trantibum	3,760,369,556
	b. Kebencanaan	1,738,077,656
	c. Damkar	2,927,459,334

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok.

Dukungan personil pada Dinas Satpol PP dan Damkar sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar;
- 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar;
- 1 (satu) orang Kabid Tribumtranmas;
- 1 (satu) orang Kabid Penegakkan Perda;
- 1 (satu) orang Kabid Perlindungan Masyarakat;
- 1 (satu) orang Kabid Pemadam Kebakaran;
- 1 (satu) orang Kasi Operasional dan Pengamanan BMD;
- 1 (satu) orang Kasi Pengendalian Ketertiban Umum;
- 1 (satu) orang Kasi Intelijen;
- 1 (satu) orang Kasi Penindakan dan Peraturan Daerah;
- 1 (satu) orang Kasi Kerjasama;
- 1 (satu) orang Kasi Penyisihan dan Pembinaan PPNS;
- 1 (satu) orang Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 1 (satu) orang Kasi Pembinaan dan Penyuluhan;
- 1 (satu) orang Kasi Bina Potensi Masyarakat;
- 1 (satu) orang Kasi Pencegahan dan Pengendalian;
- 1 (satu) orang Kasi Sarana dan Prasarana;
- 1 (satu) orang Kasi Keselamatan dan Kebakaran;
- 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 1 (satu) orang Kasubag Umum;

21. 1 (satu) orang Kasubag Keuangan.

Dukungan personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Pelaksana BPBD;
2. 1 (satu) orang Sekretaris BPBD;
3. 1 (satu) orang Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. 1 (satu) orang Kabid Kedaruratan dan Logistik;
5. 1 (satu) orang Kasi Pencegahan;
6. 1 (satu) orang Kasi Kesiapsiagaan;
7. 1 (satu) orang Kasi Kedaruratan;
8. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
9. 1 (satu) orang Operator pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
10. 1 (satu) orang Operator pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
11. 1 (satu) orang Operator pada Subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 32 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD Pemda Kab.Solok, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam permasalahan menggambarkan masalah yang pemerintah daerah hadapi dalam pelaksanaan penerapan SPM yang terdiri dari:

1. Ketersediaan Data Dukung Belum Optimal.
2. Perhitungan Kebutuhan Ketersediaan Anggaran belum terpenuhi secara maksimal.
3. Belum Optimalnya penganggaran pada masing-masing sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi.
6. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan.

Solusi:

1. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, untuk itu perlunya

perencanaan dan penganggaran yang matang khususnya untuk capaian SPM pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD.

2. Perlunya Koordinasi intensif dengan Barenlitbang dan instansi terkait untuk menunjang capaian SPM pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD.
3. Perlunya koordinasi dengan Kementerian terkait tentang bantuan sarana mobilitas untuk menunjang capaian SPM pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD.
4. Memaksimalkan SDM pada Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/ jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Solok pada urusan sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama tahun 2023 sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100 %	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100 %	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %	100 %

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Hasil Capaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	145	145	0	100
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	109	109	0	100
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	5495	5495	0	100
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	30	30	0	100
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2750	2750	0	100

b. Hasil Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				
	1. Layanan data dan pengaduan	9	9	0	100 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	7	7	0	100 %
	3. Penyediaan permakanan	94	94	0	100 %
	4. Penyediaan sandang	6	6	0	100 %
	5. Penyediaan alat bantu	38	38	0	100 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	0	100 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	44	44	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	145	145	0	100 %
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA / Bukti dokumen kependudukan	1	1	0	100 %
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	0	100 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100 %
13.	Layanan rujukan	4	4	0	100 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan	109	109	0	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	41	41	0	100 %
3.	Penyediaan permakanan	109	109	0	100 %
4.	Penyediaan sandang	6	6	0	100 %
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	109	109	0	100 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	0	100 %
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	109	109	0	100 %
8.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA / Bukti dokumen kependudukan	109	109	0	100 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	0	100 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	41	41	0	100 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	41	41	0	100 %
12.	Layanan rujukan	1	1	0	100 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan	5495	5495	0	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	445	445	0	100 %
3.	Penyediaan permakanan	2605	2605	0	100 %
4.	Penyediaan sandang	1525	1525	0	100 %
5.	Penyediaan alat bantu	80	80	0	100 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan	1	1	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
	P3K)				
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5495	5495	0	100 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	80	80	0	100 %
9.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA / Bukti dokumen kependudukan	2	2	0	100 %
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	1	1	0	100 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	445	445	0	100 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	445	445	0	100 %
13.	Layanan rujukan	1	1	0	100 %
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
1.	Layanan data dan pengaduan	30	30	0	100 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	30	30	0	100 %
3.	Penyediaan permakanan	30	30	0	100 %
4.	Penyediaan sandang	1	1	0	100 %
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	0	100 %
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	0	100 %
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	30	30	0	100 %
8.	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA / Bukti dokumen kependudukan	1	1	0	100 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	0	100 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	30	30	0	100 %
12.	Layanan rujukan	1	1	0	100 %
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana				
1.	Penyediaan permakanan	2750	2750	0	100 %
2.	Penyediaan sandang	4	4	0	100 %
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	47	47	0	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Barang			Capaian
		Target (kebutuhan)	Realisasi (terlayani)	Yang Belum Terlayani	
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	9	9	0	100 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	5	5	0	100 %

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasa			Capaian SPM (%) 2023	Capaian SPM (%) 2022
		Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	1.320	145	11%	100%	145	100	100%	100%
2	Anak Terlantar	923	109	12%	100%	109	100	100%	100%
3	Lansia Terlantar	5.614	5.495	98%	100%	5.495	100	100%	100%
4	Gepeng	30	30	100 %	100%	30	100	100%	100%
5	Bencana Alam dan Sosial	2.750	2.750	100 %	100%	2.750	100	100%	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok sebesar Rp.5.472.289.069,-.

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial, sebagai berikut:

2. 1 (satu) orang Kepala Dinas Sosial;
3. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Sosial;
4. 1 (satu) orang Kabid Rehabilitasi Sosial;
5. 1 (satu) orang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial;

6. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Pengangkatan Anak, dan Taman Anak Sejahtera;
7. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
8. 1 (satu) orang Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Wisma, dan Korban NAPZA dan Perdagangan Orang;
9. 1 (satu) orang Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
10. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

Berdasarkan personil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 orang yang terlibat aktif dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial, serta pegawai lainnya yang juga turut membantu pencapaian SPM tersebut.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Apa yang telah dicapai pada tahun ini, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan dalam tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021. Kami mengakui terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Permasalahan:

1. Pada penanganan data disabilitas khususnya disabilitas mental / ODGJ terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan sehingga memakan waktu dan biaya untuk mencari informasi.
2. Penerapan SPM pengumpulan dan perhitungan disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
3. Perlunya kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan.

Solusi:

1. Memaksimalkan SDM pada Dinas Sosial.
2. Urusan sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, untuk itu perlunya perencanaan dan penganggaran yang matang khususnya untuk capaian SPM pada Dinas Sosial.
3. Perlunya Koordinasi intensif dengan Barenlitbang dan instansi terkait untuk menunjang capaian SPM pada Dinas Sosial.
4. Perlunya koordinasi dengan Kementerian terkait tentang bantuan sarana mobilitas untuk menunjang capaian SPM pada Dinas Sosial.

4.7. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada setiap Perangkat Daerah Pengampu SPM pada Tahun 2023 di masing-masing bidang urusan sebagai berikut :

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	Program Spm Pendidikan Anak Usia Dini				9,204,415,326	8,863,434,462	96.30 %
	1		Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD		6,988,030,000	6,729,420,000	96.30 %
		1	Pendataan Anak Usia Dini Untuk Keperluan Identifikasi Kebutuhan Daya Tampung Layanan Untuk Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai Dengan 6 (Enam) Tahun	Peserta Didik	50.000.000	44,670,000	89.34 %
		2	Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Masyarakat Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Per Tahun	Kegiatan	100.000.000	91,800,000	91.80 %
		3	Pengadaan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Agar Mendapat Layanan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	Peserta Didik	6,338,030,000	6,147,900,000	97.00 %
		4	Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Paling Sedikit 1 (Satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Setiap Desa	Peserta Didik	200.000.000	176,430,000	88.22 %
		5	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Kekurangan Daya Tampung	Peserta Didik	100,000,000	85,320,000	85.32 %
		6	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal	Peserta Didik	200.000.000	183,300,000	91.65 %
	2		Kegiatan Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Layanan Satuan		1,769,913,450	1,746,213,920	98.66 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		1	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	Kegiatan	100.000.000	99,320,000	99.32 %	
		2	Fasilitasi Pertemuan Guru/Pendidik Dalam Wadah Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	Kegiatan	180.000.000	179,140,100	99.52 %	
		3	Sosialisasi Kepada Satuan Pendidikan Mengenai Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Dilakukan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun Ajaran	Kegiatan	100.000.000	94,123,400	94.12 %	
		4	Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sarana Dan Prasarana Satuan Pendidikan Secara Periodik Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun	Kegiatan	180.000.000	175,400,320	97.44 %	
		5	Pemeliharaan Dan Perbaikan Terhadap Kondisi Sarana Dan Prasarana Satuan Pendidikan Yang Rusak	Kegiatan	1,209,913,450	1,198,230,100	99.03 %	
	3	Pemenuhan Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)				371,471,876	326,050,542	87.77 %
		1	Pemetaan Dan Penataan Penempatan Untuk Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000	89,100,000	89.10 %	
		2	Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000	87,300,400	87.30 %	
		3	Pengajuan Formasi Guru ASN Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Guru	0	0	0 %	
		4	Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Paling Sedikit 1 (Satu) Orang Pada Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif	Kegiatan	63.000.000	54,320,000	86.22 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		5	Penempatan Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Kepala Sekolah	Kegiatan	0	0	0 %	
		6	Penempatan Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Pengawas Sekolah	Kegiatan	63,471,876	52,900,142	83.34 %	
		7	Pemetaan Kecukupan Jumlah Pengawas Sekolah Atau Penilik Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		45.000.000	42,430,000	94.29 %	
	4	Pemenuhan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)				75,000,000	61,750,000	82.33 %
		1	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Belum Memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi Yang Diperyaratkan	Kegiatan	0	0	0 %	
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	0	0	0 %	
		3	Fasilitasi Kepala Sekolah Atau Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak Untuk Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Guru Penggerak	Kegiatan	75.000.000	61,750,000	82.33 %	
2	Program Spm Pendidikan Dasar				121,951,415,010	110,853,447,305	98,14 %	
	5	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)				60,607,496,000	60,000,574,200	99.00 %
		1	Pendataan Warga Negara Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun Yang Tidak Bersekolah	Peserta Didik	150.000.000	142,204,500	94.80 %	
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	0	0	0 %	
		3	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Kekurangan Daya Tampung	Peserta Didik	34,907,246,000	34,530,246,250	98.92 %	
		4	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal	Peserta Didik	25,550,250,000	25,328,123,450	99.13 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
	6	Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)				370,297,010	258,473,000	69.80 %
		1	Pembentukan Komunitas Belajar Dan Memastikan Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah Terlibat Aktif Dalam Komunitas Tersebut	Unit Komunitas	0	0	99.13 %	
		2	Pelatihan/Seminar/ Lokakarya Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dan Guru	Kegiatan	370,297,010	258,473,000	69.80 %	
	7	Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)				51,973,658,000	50,594,400,105	97.35 %
		1	Pemberian Layanan Pendampingan Kepada Satuan Pendidikan Untuk Mencegah Perundungan Kekerasan Pada Anak Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	Kegiatan	0	0	0 %	
		2	Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sekolah Dasar Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 Tahun	Kegiatan	2,858,032,900	2,614,720,005	91.49 %	
		3	Perbaikan Terhadap Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan Yang Rusak Sedang Dan Rusak Berat	Kegiatan	49,115,625,100	47,979,680,100	97.69 %	
		4	Sosialisasi Kepada Satuan Pendidikan Mengenai Peningkatan Kualitas Layanan Termasuk Pentingnya Inklusivitas Dan Kebinekaan Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap Ekonomi, Gender, Fisik, Agama, Suku, Dan Budaya Kepada Satuan Pendidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun Ajaran	Kegiatan	0	0	0 %	
	8	Pemenuhan Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)				0	0	0.00 %
		1	Pemetaan Dan Penataan Penempatan Untuk Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0	0	0 %	
		2	Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru	0	0	0 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Guru	0	0	0 %	
		4	Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Paling Sedikit 1 (Satu) Orang Pada Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif	Kegiatan	0	0	0 %	
		5	Penempatan Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Kepala Sekolah	Kegiatan	0	0	0 %	
		6	Penempatan Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Pengawas Sekolah	Kegiatan	0	0	0 %	
		7	Pemetaan Kecukupan Jumlah Pengawas Sekolah Untuk Satuan Pendidikan		0	0	0 %	
	9	Pemenuhan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)				0	0	0 %
		1	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Belum Memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi Yang Diperyaratkan	Kegiatan	0	0	0 %	
		2	Pemberian Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	0	0	0 %	
		3	Fasilitasi Kepala Sekolah Atau Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak Untuk Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Guru Penggerak	Kegiatan	0	0	0 %	
3	Program Pendidikan Kesetaraan							
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)				4,806,634,050	4,586,319,200	95.42 %
		1	Pendataan Warga Negara Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun Yang Tidak Bersekolah	Peserta Didik	35,750,000	35,341,200	98.86 %	
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		3	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Kekurangan Daya Tampung	Peserta Didik	4,715,384,050	4,495,618,000	95.34 %	
		4	Penyediaan Layanan Pendidikan Di Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal	Peserta Didik	55,500,000	55,360,000	99.75 %	
	11	Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)				60,991,400	59,540,200	97.62 %
		1	Pembentukan Komunitas Belajar Dan Memastikan Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah Terlibat Aktif Dalam Komunitas Tersebut	Unit Komunitas	22.000.000	21,850,400	99.32 %	
		2	Pelatihan/Seminar/Lokakarya Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dan Guru	Kegiatan	38,991,400	37,689,800	96.66 %	
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)				0	0	0 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%	
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%	
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%	
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%	
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)				0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%

4.7.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten				5,992,571,512	4,104,489,725	68.49 %
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,048,634,393	716,503,410	68.33 %	
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	442,602,304	304,324,614	68.76 %	
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	232,476,730	145,758,171	62.70 %	
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	2,289,488,155	1,877,501,700	82.01 %	
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	875,775,800	511,538,560	58.41 %	
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	380,950,290	165,892,500	43.55 %	
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	155,355,000	114,062,470	73.42 %	
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	13,520,000	8,742,000	64.66 %	
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	42,364,840	28,666,750	67.67 %	
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	74,960,370	46,041,640	61.42 %	
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	391,653,630	158,702,740	40.52 %	
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	44,790,000	26,755,170	59.73 %	
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%	
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%	

4.7.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			3,504,034,000	3,504,034,000	100.00 %
	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			2,954,018,000	2,954,018,000	100.00 %
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	2,954,018,000	2,954,018,000	100 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1	1	100 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1	1	100 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1,170,000,000	1,170,000,000	100 %
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	600,000	600,000	100 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1,184,000,000	1,184,000,000	100 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1	1	100 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1	1	100 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		1	1	100 %
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1	1	100 %
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1	1	100 %
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1	1	100 %
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	1	1	100 %
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		1	1	100 %
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	1	1	100 %
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	1	1	100 %
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1	1	100 %
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1	1	100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1	1	100 %	
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	1	1	100 %	
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	1	1	100 %	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					550,016,000	550,016,000	100 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				550,016,000	550,016,000	100 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	1	1	100 %	
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1	1	100 %	
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1	1	100 %	
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	550,000	550,000	100 %	
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1	1	100 %	
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1	1	100 %	
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1	1	100 %	
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1	1	100 %	
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1	1	100 %	
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		1	1	100 %	
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	1	1	100 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1	1	100 %
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	1	1	100 %
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	1	1	100 %
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	1	1	100 %
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1	1	

4.7.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
1	Program Pengembangan Perumahan				249,300,700	238,001,962	95.47 %	
	1	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0	0 %	
		1	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %	
		2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0	0	0 %	
		3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	Dokumen	0	0	0 %	
		4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen	0	0	0 %	
		5	Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %	
		6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	Dokumen	0	0	0 %	
	2	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				249,300,700	238,001,962	95.47 %
		1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	174,780,700	165,673,162	94,79 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
		2	Penyusunan Site Plan Dan/Atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Ha	0	0	0 %
		4	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	74,520,000	72,328,000	97,06 %
		5	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0 %
		6	Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0 %

4.7.5 BIDANG URUSAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)				3,760,369,556	3,722,079,354	98.98 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,474,830,346	3,439,431,794	98.98 %
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Kasus	2,757,723,266	2,729,354,509	98.97 %
		2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kasus	20,120,000	20,114,350	99.97 %
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Dokumen	64,188,700	63,753,800	99.32 %
		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen	88,905,460	87,837,000	98.80 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	131,187,310	130,548,235	99.51 %	
		6	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen	140,677,500	140,384,300	99.79 %	
		7	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Unit	245,546,590	241,794,600	98.47 %	
		8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Dokumen	4,601,000	4,509,700	98.02 %	
		9	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Laporan	21,880,520	21,135,300	96.59 %	
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota				149,853,910	148,781,850	99.28 %
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	57,468,610	56,908,900	99.03 %	
		2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Laporan	50,557,300	50,225,900	99.34 %	
		3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	41,828,000	41,647,050	99.57 %	
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				135,685,300	133,865,710	98.66 %
		1	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Laporan	135,685,300	133,865,710	98.66 %	
	2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)				1,738,077,656	1,633,560,934	93.99 %
		4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			308,510,200	282,997,420	91.73 %
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	308,510,200	282,997,420	91.73 %	
		5	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			254,898,712	209,192,370	82.07 %
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		3	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab	Dokumen	0	0	0%	
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	48,344,812	40,018,000	82.78 %	
		5	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%	
		6	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	113,905,450	90,905,070	79.81 %	
		7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		92,648,450	78,269,300	84.48 %	
		8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	0	0	0%	
		10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	0	0	0%	
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	0	0	0%	
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0	0	0%	
	6	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana				1,169,543,494	1,136,731,144	97.19 %
		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	0	0	0%	
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1,169,543,494	1,136,731,144	97.19 %	
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0%	
		6	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Dokumen	0	0	0%	
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5,125,250	4,640,000	90.53 %
		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	5,125,250	4,640,000	90.53 %	
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten	Dokumen	0	0	0%	
		4	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
		5	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				2,927,459,334	2,804,259,123	95.79 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,758,750,162	2,688,136,773	97.44 %
		1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	21,620,000	18,834,500	87.12 %
		2	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,547,435,532	2,521,060,423	98.96 %
		3	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Laporan	32,986,280	27,828,000	84.36 %
		4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16,325,000	2,896,000	17.74 %
		5	Standarisasi Sapra Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	5,201,500	4,445,750	85.47 %
		6	Pengadaan Sapra Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	76,014,030	65,207,100	85.78 %
		7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	45,652,900	40,235,000	88.13 %
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	13,514,920	7,630,000	56.46 %
		10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			17,128,300	16,752,350	97.81 %
		1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	8,268,500	8,041,350	97.25 %
		2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	8,859,800	8,711,000	98.32 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			17,033,700	10,513,750	61.72 %
		1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	17,033,700	10,513,750	61.72 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
	11	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran				76,663,472	39,713,750	51.80 %
		1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Orang	46,422,432	20,751,250	44.70 %	
		2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		30,241,040	18,962,500	62.70 %	
		3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sapra	Dokumen	0	0	0%	
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				57,883,700	49,142,500	84.90 %
		1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Penimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	12,233,700	8,100,000	66.21 %	
		2	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Dokumen	5,377,500	5,179,500	96.32 %	
		3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Unit	35,480,500	34,063,000	96.00 %	
		4	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Laporan	4,792,000	1,800,000	37.56	

4.7.6` BIDANG URUSAN SOSIAL

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				2,001,897,690	1,902,249,549	95.02 %	
	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				2,954,018	2,954,018	94.83 %
		1	Penyediaan Permakanan	Orang	633,731,040	594,802,478	93.86 %	
		2	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	
		3	Penyediaan Alat Bantu	Orang	32,537,940	27,432,992	84.31 %	
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	68,220,600	65,603,120	96.16 %	
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Orang	82,999,916	74,219,840	89.42 %	
		6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Orang	0	0	0 %	
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0 %	
		8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	49,976,786	46,561,255	93.17 %	
		9	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	0	0	0 %	
		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	761,640,800	744,516,644	97.75 %	
		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	77,512,728	70,989,364	91.58 %	
		12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen	53,798,670	45,326,143	84.25 %	
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota				241,479,210	232,797,713	241,479,210
		1	Penyediaan Makanan	Orang	241,479,210	232,797,713	241,479,210	
		2	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0 %	
		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	0	0	0 %	
		4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	0	0	0 %	
		5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	0	0	0 %	

BAB V

PENUTUP

Kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pemenuhan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan realisasi pelaksanaan program pembangunan yang disajikan dalam Laporan ini merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023.

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal, walaupun disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Tantangan Kabupaten Solok ke depan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat dan mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan.

Demikian Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun 2023 ini, semoga bermanfaat untuk bahan evaluasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok ke depannya, terima kasih.



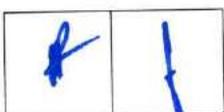
BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 100 - 019 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PERIVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

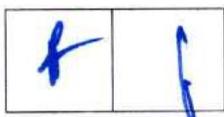
: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusun dan Tim Pereviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Penyusun

1. mengumpulkan data dan dokumen pendukung LPPD;
2. menyusun dokumen data dasar capaian



kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD; dan

3. menyusun dokumen LPPD Tahun 2023.

B. Tim Pereviu

1. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. membuat laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 05 Februari 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
 NOMOR : 100- 019 -2024
 TANGGAL : 05 Februari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Wakil Ketua I
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Inspektur Daerah	Anggota
9	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	Kepala Bidang PSDAIK pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
16	Perencana Ahli Muda di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
17	Perencana Ahli Muda di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
18	Perencana Ahli Muda di Bidang PSDAIK pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
20	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
23	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota

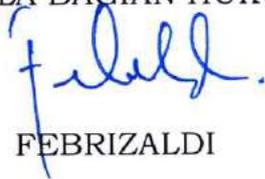
24	Acil Fasra, S.IP, MM	Anggota
25	Welly Fauzan, S.IP	Anggota
26	Gerry Candra, S.STP, M.Si	Anggota
27	Agung Satria MTD, S.IP, M.Si	Anggota
28	Kharin Ramadhani, S.Tr.IP	Anggota

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 100- 019 -2024
TANGGAL : 05 februari 2024

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

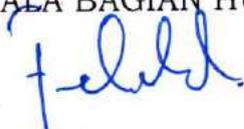
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mience Dasril, SE	Irban I	Ketua
2	Netti Herawati, SE	Auditor Madya	Wakil Ketua
3	Bisri Muthova, SE	P2UPD Muda	Anggota
4	Sri Hidayati, S.Pd	P2UPD Muda	Anggota
5	Yuliana, SE QRMA	Auditor Pertama	Anggota

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI